

# Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- Strategi Penangkalan Nuklir Korea Utara melalui Uji Coba Nuklir dalam Menghadapi Interaksi Konflik di Asia Timur periode 2006 – 2009  
Elistania, Yugolastarob Komeini, Yusran
- Meminimalisir Risiko Perubahan Iklim di Indonesia melalui Penerapan *Implementasi Agreement PAKLIM* antara Pemerintah Indonesia-Jerman  
Jeanie Annissa
- Globalisasi dan Ideologi Pasar Global dalam Tatatan Ekonomi Neoliberal  
Arin Fithriana, Sony Iriawan
- Analisis Konseptual Dampak Perusahaan Swasta Militer dan Keamanan (*Private Military and Security Company/PMSC*) terhadap Perang Generasi Keempat  
Tulus Yuniasih, Budi Hartono
- *The Impact of Trafficking and Sexual Exploitation towards Woman Migrant Worker in Riau: Socio Culture, Psychological, and National Security Analysis*  
Denik Iswardani Witarti et.al
- Telaah Konseptual Dinamika Persenjataan: Perlombaan Senjata (*Arm Race*) dan Pembangunan Kapabilitas Persenjataan Militer (*Arms Military Build-UP*) dalam Pola Aksi-Reaksi  
Anggun Puspitasari



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Budi Luhur

# *Transnasional*

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

**Pimpinan Redaksi:**  
**Dekan FISIP**

**Redaktur Pelaksana:**  
**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

**Dewan Redaksi:**  
**Arin Fithriana**  
**Denada Faraswacyen L. Gaol**

**Sekretaris Redaksi**  
**Samsinar**

**Pemasaran**  
**Anggun Puspitasari**

**Alamat Redaksi:**  
**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur**  
**Jln. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260**  
**Telp. (021) 5853753 Ext. 252**

**Email**  
[Transnasional\\_bl@yahoo.co.id](mailto:Transnasional_bl@yahoo.co.id)

## **PENGANTAR REDAKSI**

Pembaca yang budiman,

Sebelumnya, kami sangat menyesal dengan keterlambatan penerbitan jurnal ini. Ada beberapa kendala yang harus kami hadapi sehingga kami akhirnya bisa menerbitkan kembali jurnal ini. Banyak hal yang harus kami perbaiki berkaitan penyuntingan dan manajemen serta sirkulasinya. Kami sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam jurnal ini. Kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Desember 2013

Salam kami,

Dewan Redaksi

## DAFTAR ISI

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <i>Elistania<br/>Yugolastarob Komeini<br/>Yusran</i> | Strategi Penangkalan Nuklir Korea Utara melalui Uji Coba Nuklir dalam Menghadapi Interaksi Konflik di Asia Timur periode 2006 – 2009                         | 97 – 115  |
| <i>Jeanie Annissa</i>                                | Meminimalisir Risiko Perubahan Iklim di Indonesia Melalui Penerapan <i>Implementation Agreement PAKLIM</i> antara Pemerintah Indonesia – Jerman              | 116 – 130 |
| <i>Arin Fithriana<br/>Sony Iriawan</i>               | Globalisasi dan Ideologi Pasar Global dalam Tatatan Ekonomi Neoliberal   | 131 – 143 |
| <i>Tulus Yuniasih<br/>Budi Hartono</i>               | Analisis Konseptual Dampak Perusahaan Swasta Militer dan Keamanan ( <i>Private Military and Security Company/PMSC</i> ) terhadap Perang Generasi Keempat     | 144 – 160 |
| <i>Denik Iswardani<br/>Witarti, et.al</i>            | <i>The Impact of Trafficking and Sexual Exploitation towards Women Migrant Workers In Riau: Socio Culture, Psychological, and National Security Analysis</i> | 161 – 171 |
| <i>Anggun Puspitasari</i>                            | Telaah Konseptual Dinamika ( <i>Arm Race</i> ) dan Pembangunan Kapabilitas Persenjataan Militer ( <i>Arms Military Build-Up</i> ) dalam Pola Aksi-Reaksi     | 172 – 180 |

# STRATEGI PENANGKALAN NUKLIR KOREA UTARA MELALUI UJI COBA NUKLIR DALAM MENGHADAPI INTERAKSI KONFLIK DI ASIA TIMUR PERIODE 2006 – 2009

Elistania<sup>1</sup>, Yugolastarob Komeini<sup>2</sup>, Yusran<sup>3</sup>  
yusran\_ubl@yahoo.com, yugolastarob@gmail.com, tanya.heinous@gmail.com

## Abstract

*Rapid economic growth among the countries of East Asia bring the countries in the region to get involved in improving its military capabilities. Development of nuclear weapons is a good option for some countries which seek to meet the needs for security (security needs) country, as a form of deterrence or as the ultimate weapon to protect their country from invasion of other countries. Likewise with North Korea that is inseparable from the political constellation-security on the Korean Peninsula which forced the country to undertake various forms of testing as part of a deterrence strategy against countries that have a conflictual relationship with North Korea, such as America, Japan and South Korea. This research ultimately aims to answer the research question of how North Korea's nuclear deterrence strategy through nuclear test in the face of conflict interaction in East Asia 2006 – 2009. Analyzed using the approach of nuclear deterrence theory to explain the form of nuclear weapons development to produce nuclear weapons shown to build nuclear deterrence strength. Through this approach, the research illustrates that East Asian constellation encourage North Korea to develop nuclear as a strategy in the face of the enemy. These capabilities can make a party opposing the invasion discouraged to do considering this form of attack in retaliation for a much more destructive invasion.*

**Keywords:** nuclear, East Asia, deterrence, North Korea

## Pendahuluan

Konflik Korea Utara dan Korea Selatan merupakan konflik berkepanjangan yang hingga kini terus berlangsung. Momen atau tonggak terpenting dalam menggambarkan konflik keduanya tidak terlepas dari perang Korea tahun 1950 yang hingga kini “terhenti” hanya melalui kesepakatan genjatan senjata saja.<sup>4</sup> Dalam sejarahnya, sebelum terbagi menjadi dua negara, paska kolonialisme Jepang wilayah Korea diduduki oleh dua negara yang berkepentingan di dalam Perang Dunia II, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pendudukan dua negara ini mengakibatkan wilayah selatan yang cenderung berpihak pada AS, sementara wilayah Utara lebih mendukung nilai-nilai komunisme yang dianut

<sup>1</sup> Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat ini sedang studi lanjut pada Kajian Eropa di Universitas Indonesia Jakarta

<sup>2</sup> Mengajar di SESKOAL dan Pemerhati Hubungan Internasional

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

<sup>4</sup> Jack L. Snyder (Eds), *the Korean War: an International History*, New Jersey: Princeton University Press, 1995, h. 23.

Uni Soviet. Dampak dari keberpihakan tersebut membuat Korea terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>5</sup>

Keunikan dari konflik kedua negara tersebut tidak hanya diwarnai oleh keinginan Korea Utara yang menginginkan adanya reunifikasi atau penyatuan kembali dua Korea saja, namun juga, hingga saat ini dipengaruhi oleh kehadiran atau keberadaan beberapa negara besar baik di dalam dan luar kawasan Asia Timur, seperti Cina dan AS. Paska keterlibatan Uni Soviet dan AS di tahun-tahun sebelumnya yang lebih diwarnai adu pengaruh ideologi, konstelasi politik dan pertahanan-keamanan kini bergeser pada beberapa isu yang gencar menjadi perhatian dunia, di antaranya adalah pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara.

Pengembangan senjata nuklir sebetulnya telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari sebuah ketakutan masyarakat internasional dikarenakan senjata nuklir merupakan senjata warisan Perang Dingin yang sangat mematikan. Sebagai buktinya, implikasi senjata nuklir dapat dilihat pada tahun 1945 yang oleh Sekutu digunakan untuk menundukkan Jepang di Hiroshima dan Nagasaki. Di sisi lain, pengembangan senjata nuklir justru menjadi pilihan tepat bagi beberapa negara yang berupaya memenuhi kebutuhan akan keamanan (*security needs*) negaranya, sebagai sebuah bentuk *deterrence* atau sebagai senjata pamungkas untuk melindungi negara mereka dari invasi negara lain. Bentuk *deterrence* atau penangkalan yang dicapai melalui pengembangan senjata nuklir yang kemudian diimplementasikan melalui strategi nuklir memberikan sebuah bentuk penangkalan yang jauh berbeda dengan strategi penangkalan yang hanya bersandar pada kemampuan militer lainnya.

Salah satu negara yang mengadopsi strategi tersebut adalah Korea Utara. Negara tersebut melakukan uji coba pertama kali tahun 2006 di sebuah terowongan pantai timur Semenanjung Korea. Upaya Korea Utara tidak berhenti sampai di situ, Pada tahun 2008, Korea Utara akhirnya mau menuruti apa yang diharapkan masyarakat internasional, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu terkait dengan latar belakang mengapa Korea Utara melakukan pengembangan nuklir. Belum berjalan satutahun, pada Mei 2009, Korea Utara meluncurkan rudal di atas Jepang yang diklaim sebagai rudal pengecek cuaca. Semakin gencarnya pengembangan senjata nuklir Korea Utara tidak terlepas dari konstelasi politik-keamanan di Asia Timur yang memaksa Korea Utara untuk melakukan berbagai bentuk uji coba sebagai bagian dari strategi penangkalannya terhadap negara-negara yang memiliki hubungan konflikual dengan Korea Utara, seperti AS, Jepang, dan terutama

---

<sup>5</sup>*Ibid.* h. 19-21.

Korea Selatan.<sup>6</sup> Hubungan konflikual antara Korea Utara dengan beberapa negara di Asia Timur ditambah dengan AS, membuat Korea Utara, pada akhirnya, memutuskan untuk melakukan pengembangan senjata nuklir. Bukti kepemilikan senjata nuklir tersebut ditunjukkan kepada dunia melalui berbagai uji coba senjata nuklir. Uji coba senjata nuklir tersebut merupakan perilaku *show off* Korea Utara di mata dunia untuk menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk memiliki senjata nuklir.<sup>7</sup>

Perkembangan konstelasi politik yang menyajikan hubungan konflikual antar negara-negara di kawasan Asia Timur, serta adanya pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara dan dibuktikan melalui serangkaian uji coba nuklir pada periode 2006 sampai 2009, menjadi poin penting untuk dianalisa. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan memahami “Bagaimana strategi penangkalan nuklir Korea Utara melalui Uji Coba Nuklir dalam menghadapi interaksi konflik di Asia Timur periode 2006 – 2009?”

## Pembahasan

Asia Timur yang terdiri dari Asia Timur Laut dan Asia Tenggara merupakan wilayah yang mempertemukan kepentingan banyak negara besar. Kawasan ini sejak lama dikenal menjadi bagian dunia yang memang penuh dinamika. Pasca Perang Dingin yang ditandai jatuhnya Uni Soviet, membuat kawasan ini dapat diartikan telah jatuh ke tangan AS. Kehadiran AS di kawasan Asia Timur menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran akan peningkatan proyeksi kekuatan regional yang berpotensi menjadikan kawasan Asia Timur menjadi wilayah rivalitas pengaruh dan kepentingan dari negara-negara besar Asia Timur lainnya seperti Republik Rakyat Cina, Jepang dan Korea Selatan.<sup>8</sup> Tak dapat disangkal, peningkatan proyeksi kekuatan regional tersebut pada akhirnya terlihat dari bagaimana negara-negara Asia Timur meningkatkan kapabilitas militernya.

Kawasan Asia Timur memang dikenal sebagai kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama sebelum terjadinya krisis moneter yang melanda kawasan ini, sehingga beberapa negara yang berada dalam kawasan Asia Timur ini disebut juga sebagai *The New Industrialized Countries (NIC's)*. Akan tetapi walaupun kawasan ini sempat dilanda krisis moneter yang bergulir menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, Asia Timur kembali bangkit dan mengalami pertumbuhan

<sup>6</sup> Daniel A. Pinkston, *North Korea Motivations for Developing Nuclear Weapons*, h.1, diunduh melalui [http://cns.miis.edu/north\\_korea/Korea\\_Utaramotv.pdf](http://cns.miis.edu/north_korea/Korea_Utaramotv.pdf), pada tanggal 15 Mei 2011

<sup>7</sup> Frank Barnaby, *How to Build a Nuclear Bomb and Other Weapon of Mass Destruction*, London: Granta Books, 2003, h. 93.

<sup>8</sup>Bintarto Bandoro, “*Isu Keamanan di Asia Pasifik*”: Rekomendasi untuk ASEAN dan Indonesia, dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXII No. 4, Jakarta, 1993. Hlm. 297.

ekonominya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan derasnya arus perdagangan di negara-negara kawasan Asia Timur meningkatkan kerawanan dalam hubungannya satu sama lain, yang berupa masalah sengketa teritorial, ketegangan akibat konflik warisan sejarah masa lalu seperti Perang Dunia II dan Perang Korea, serta ketegangan yang diakibatkan oleh kecurigaan dalam peningkatan kapabilitas militer dari masing-masing negara tersebut.

#### **A. Peningkatan Kapabilitas Negara-negara Asia Timur**

Dikemukakan oleh Deger dan Sen dalam *Military Expenditure the Political Economy of International Security*, bahwa negara-negara yang sedang membangun mengidentifikasi makna dari *Military Expenditure* dan peningkatan program senjata dalam angkatan bersenjata suatu negara, adalah dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi dasar dari negara-negara yang sedang membangun tersebut. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa proses perbelanjaan persenjataan distimulasi oleh peningkatan harga minyak di pasaran antara bangsa konflik yang kerap terjadi dalam suatu wilayah serta perluasan kemampuan bagi pembelian senjata.<sup>9</sup> Sementara itu R.P Smith juga mengemukakan pemikirannya dalam hal ini, bahwa pengeluaran atau peningkatan belanja militer sangat ditentukan oleh karakter proses pembuat kebijakan suatu negara dan relevansi militer yang mempunyai keterkaitan pengaruh ekonomi dan politik dalam ruang lingkup domestik, kawasan dan internasional atau global. Kebijakan untuk menaikkan atau meningkatkan anggaran militer sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Sebagai wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi secara pesat, tentu Asia Timur memiliki konsekuensi logis tempat negara-negara yang memendam potensi konflik mau tidak mau dihadapkan pada kondisi untuk memperkuat postur militernya. Fakta berbicara bahwa, negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Timur merupakan negara-negara yang mengalami peningkatan terpesat di bidang anggaran belanja militer dari pada wilayah lainnya di dunia. Strategi dan ukuran militer Asia Timur yaitu dengan memandanghubungan antara tiga atau lebih kekuatan militer utama dari kawasan ini, yaitu: Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Kekuatan ini dilihat dari suatu hubungan jaringan yang kompleks antara kekuatan utama dengan kekuatan negara-negara lain di Asia Timur dan implikasinya terhadap regional *balance of power* (kekuatan yang seimbang) di kawasan ini. Bahwa basis keamanan Asia Timur

<sup>9</sup> Deger, Saadet dan Sen, Somnath. 1990. *Military expenditure the political economy of international security*, dalam Caroline Simatupang, *Perbelanjaan Ketenteraan Indonesia Selepas Krisis Ekonomi 1997*, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 2008.

<sup>10</sup> R.P Smith, *Models of Military Expenditure*, *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 4, No. 4, John Wiley & Sons, 1989.

berputar mengelilingi aktor-aktor utama, dan setiap perkembangannya terutama mengenai stabilitas keamanan sangat tergantung pada jaringan itu.<sup>11</sup> Di wilayah itu ada Cina dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Selain itu ada Jepang sebagai bangsa industri Asia pertama dan kemajuan menonjol dalam teknologi dan ekonomi. Dua bangsa itu diketahui mempunyai hubungan tradisional yang bersifat *love hate relationship* serta ada Korea Selatan sebagai sekutu AS yang juga menarik perhatian kawasan.

## B. Tensi Politik dan Kecurigaan Antarnegara di Asia Timur

Beberapa negara-negara Asia Timur yang meningkatkan anggaran militernya untuk mendukung kapabilitas militer negaranya masing-masing di antarnya ialah Cina, Jepang dan Korea Selatan. Pola interaksi yang terjadi antarnegara Asia Timur menarik untuk diamati, sebab negara-negara ini akhirnya memperlihatkan setiap kekuatan aliansi atau persekutuan. Dari tujuan setiap negara dalam meningkatkan kapabilitas militernya, tiap negara masing-masing mempunyai sasaran untuk menyeimbangkan kekuatan lainnya.

Cina misalnya dengan berdasar pada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, memiliki tujuan di balik peningkatan kapabilitas militernya. Bentuk ancaman yang paling serius dalam perspektif Cina adalah aliansi pertahanan yang dibangun Jepang dengan AS. Bangunan aliansi antara Jepang dan AS sudah dimulai sejak tahun 1951 yang bertujuan untuk membendung gerakan anti-Soviet di kawasan Asia pasifik selama berlangsungnya perang dingin. Aliansi tersebut pasca berakhirnya perang dingin masih berjalan secara intensif.

Berbeda dengan Cina, Jepang justru merasa terancam oleh Korea Utara ketika negara tersebut mengumumkan bahwa negara tersebut memiliki senjata nuklir. Bagi Jepang ini menjadi angin segar sekaligus sebuah ancaman. Negara tersebut telah lama terhalang oleh konstitusi Jepang yang bersifat pasifis (antiperang).<sup>12</sup> Maka dengan itu Kementerian Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency*) merevisi NDPO pada tanggal 3 September 2001. Latar belakang perlunya merevisi kembali NDPO antara lain adalah percobaan peluru kendali yang melewati teritorial Jepang pada tahun 1998 oleh Korea Utara, selain itu pula beberapa kapal mata-mata negara tersebut telah melakukan penyusupan ke daerah perairan Jepang. Pemerintah Jepang telah menyatakan bahwa ambisi Korea Utara untuk menguasai senjata nuklir dan modernisasi militer merupakan ancaman utama Jepang.

<sup>11</sup>Alwi Shihab, "Diplomasi RI Memasuki Abad Ke-21 Perkembangan Dunia dan Kebijaksanaan Luar Negeri" (Jakarta : 2000) dalam <http://www.deplu.go.id>

<sup>12</sup> "Pertahanan Asia Timur: Ekonomi Krisis Bangun Senjata Jalan Terus", Majalah Angkasa, Jakarta 1 Oktober 2001, Hal 1.

Perlombaan senjata *arm race* yang dilakukan negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa negara benar adanya akan selalu berusaha melindungi negaranya dari ancaman negara lainnya. Ancaman yang datang akan mempengaruhi negara tersebut untuk bersekutu dengan negara lainnya. Dari pemaparan interaksi negara-negara di atas, terlihat bagaimana Jepang bersama dengan Korea Selatan merasa terancam dengan peningkatan kapabilitas militer Cina. Namun begitu, berbeda dengan Korea Utara yang tidak merasa terancam dengan Cina. Akan tetapi sebagaimana asumsi realisme, negara akan selalu curiga dan selalu mencari cara untuk melindungi keamanan nasionalnya. Oleh sebab itu, di balik siapa yang memulai peningkatan kapabilitas militer di kawasan Asia Timur, sebagai negara Korea Utara juga turut ikut membuat kebijakan bagi militernya.

### **C. Peningkatan Uji Coba Nuklir Korea Utara (2006 – 2009)**

Pada dasarnya Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara atau Korea Utara) adalah sebuah negara Komunis dengan sebuah perekonomian yang kurang berkembang. Keterbatasan perdagangan dan hubungan transportasi Korea Utara dengan negara lain dan lingkungan yang dibatasi dengan ketat bahwa orang asing dapat memasuki negeri itu dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Alat komunikasi dalam banyak tempat tidak memungkinkan, dan orang asing dapat mengharapkan bahwa komunikasi mereka dimonitor oleh petugas Korea Utara. Dalam tahun belakangan ini, Korea Utara telah mengalami kelaparan sementara, kekurangan bahan bakar yang kronis dan kekurangan listrik, dan menjangkitnya penyakit. Banyak negara, termasuk AS telah menyokong kepada usaha penanggulangan internasional untuk membantu penduduk Korea Utara.<sup>13</sup>

Korea Utara menerima ajaran Marxisme-Leninisme sebagai filosofi kekuasaannya ketika ia memproklamasikan pendiriannya dalam tahun 1948, tetapi dalam sebuah revisi Konstitusional dalam tahun 1972, menambahnya dengan ideologi *juche*, atau percaya diri nasional. Kedua filosofi itu dikombinasikan ke dalam satu “ide *juche* dari Partai Pekerja Korea, sebuah aplikasi kreatif dari Marxisme-Leninisme dengan kondisi negara kami”. Dalam tahun 1980, ideologi resmi itu disederhanakan sebagai “pikiran *juche* dari Pemimpin Besar, Kim Il- Sung”. Menurut Konstitusi Korea Utara, *juche* adalah “sebuah ideologi revolusioner yang berpusat pada pandangan manusia di dunia yang bertujuan untuk merealisasikan massa yang mandiri, merupakan prinsip kepemimpinan dalam aksinya”. *Juche* terdiri dari dua bagian: teori filosofi yang mengklaim bahwa massa merupakan majikan dari sejarah dan revolusi, dan prinsip bahwa massa memerlukan kepemimpinan dari seorang pemimpin (Kim Il-Sung dan putranya, Kim Jong-Il) untuk

---

<sup>13</sup>Sejarah Korea Utara. Diakses dari [http://www.globalsecurity.org/military/world/north\\_korea/history.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/north_korea/history.htm)

mencapai takdir mereka. Penduduk dimotivasi untuk mengikuti *juche* melalui suatu kampanye ideologi intensif dan sebuah program indoktrinasi politik yang dapat merembes. Sejak awal, *juche* terutama menekankan kemandirian dari kekuatan eksternal, namun rejim itu kini menghadapi dilema tentang bagaimana untuk memperluas perdagangan dan investasi dengan dunia luar dengan tujuan untuk menyadarkan ekonomi, tanpa membahayakan stabilitas politiknya.

#### a) ***Doctrine of Massive Retaliation* Korea Utara**

Strategi penangkalan nuklir merupakan strategi yang ditujukan tidak hanya pada pembentukan doktrin sebagai *guidance* dalam mengembangkan kemampuan penangkalan, tapi juga sebagai komoditi politik untuk menggambarkan kesiapan negara dalam membangun kekuatan militernya.<sup>14</sup> Meski begitu, bentuk kesiapan kekuatan militer tidak berdiri sendiri namun menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh doktrin agar dapat berjalan sesuai dengan arah doktrin militer negara.

Doktrin militer yang menjadi pondasi intelektual dalam membangun sebuah kekuatan militer, memiliki kecenderungan dalam merefleksi kondisi eksternal di luar negara.<sup>15</sup> Karena itu, doktrin militer menjadi payung besar dalam mengarahkan negara dalam membangun kekuatan militer untuk menghadapi ancaman yang ada. Beberapa pemikir strategis menjelaskan bahwa faktor sistem internasional merupakan refleksi utama dalam memformulasikan pengembangan doktrin militer, baik doktrin yang bersifat ofensif maupun defensif.<sup>16</sup>

Dalam kasus pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang memicu terjadinya uji coba senjata nuklir, diawali dengan pengembangan doktrin militer yang menjadi arahan dalam pengembangan kekuatan militer. Doktrin nuklir militer Korea Utara menjadi dasar pengembangan senjata nuklir sekaligus pengimplementasian senjata nuklir sebagai kekuatan militer Korea Utara untuk menghadapi konflik di Asia Timur.

Perumusan doktrin nuklir militer Korea Utara, dirumuskan dalam *Pyongyang's Nuclear Doctrine*. Doktrin ini menjadi landasan bagi Korea Utara untuk menerapkan pengembangan dan penggunaan senjata nuklir sebagai bagian dari strategi militernya. Pengembangan senjata nuklir yang pada akhirnya ditujukan untuk melakukan penangkalan melalui uji coba senjata nuklir dikembangkan sesuai dengan perumusan

<sup>14</sup> Stephen J. Rosow, "Nuclear Deterrence, State Legitimation, & Liberal Democracy," *Polity*, Vol. 21, No. 3, (spring, 1989), h. 563.

<sup>15</sup> Yugolastarob Komeini, *Doktrin Militer dalam Budaya Strategis*, h. 36, dalam AA Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro, *Pengantar Kajian Strategis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

<sup>16</sup> Jack Snyder, *Correspondence: The Origins of Offense and the Consequence of Counterforce*, *International Security*, Vol. 11, No. 3 (Winter 1986/87); Richard Rosecrance, *Review: Explaining Military Doctrine*, *International Security*, Vol. 11, No. 3 (Winter, 1986-1987); Ka Po Ng, *Interpreting China's Military Power: Doctrine Makes Readiness*, USA: Taylor and Francis Group, 2005.

doktrin nuklir militer. Doktrin nuklir militer tersebut menjadi dasar kebijakan yang mengarahkan pada dijalankannya strategi nuklir sebagai bentuk penangkalan yang menjelaskan berbagai kumpulan asumsi mengenai esensi persenjataan nuklir yang akan dikembangkan.<sup>17</sup>

Meski tidak secara eksplisit tertulis di dalam berbagai dokumen, namun penerapan strategi senjata nuklir tidak dapat berjalan tanpa ada dasar pengembangan kebijakan doktrin yang mengarahkan pada penggunaan senjata nuklir sebagai kekuatan militernya. Dalam berbagai sumber, perumusan sampai pada implementasi doktrin nuklir militer Korea Utara sebagai bagian dalam peningkatan kekuatan militernya, tentu saja telah tertulis dengan baik di dalam pikiran Kim Jong Il.<sup>18</sup> Hal itu dapat dilihat dengan berbagai upaya pembangunan kekuatan militer yang tidak fokus pada akuisisi atau pengembangan senjata lain selain nuklir.

Pengakuan adanya perumusan doktrin nuklir militer yang mendasari pengembangan dan uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara, setidaknya diketahui secara publik pada tahun 2002. Pengakuan Korea Utara kepada dunia global disampaikan negara tersebut pada pertemuan Korea Utara dengan Asisten Menteri Sekretaris Negara AS, James Kelly di Pyongyang. Saat itu, Korea Utara mengakui bahwa mereka melakukan program pengembangan senjata nuklir secara aktif. Argumentasi Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir berdasarkan pada kesamaan hak dengan negara lain untuk memiliki senjata nuklir.<sup>19</sup> Apa yang disampaikan Korea Utara kepada masyarakat dunia tersebut merupakan pengakuan Korea Utara atas motivasi negara tersebut untuk menganut doktrin nuklir sebagai strategi militernya. Dalam hal ini, dorongan konflik yang dihadapi Korea Utara membuat negara tersebut mengalihkan kemampuan militernya pada kekuatan nuklir yang diarahkan oleh doktrin nuklir untuk menghadapi interaksi permusuhan terhadap Korea Utara di wilayah Asia Timur.

### **b) Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara**

Uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara tidak terlepas dari pengembangan senjata nuklir. Uji coba senjata nuklir diimplementasikan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, 5 Juli 2006. Uji coba tersebut mengkhawatirkan beberapa negara. Hal itu memicu Korea Selatan, Jepang, AS, dan Australia dengan melakukan protes sekaligus kecaman atas tindakan uji coba yang dilakukan Korea Utara

<sup>17</sup> Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*, April 2007, Hal. 102 diunduh pada tanggal 8 Maret 2011 melalui <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub771.pdf>

<sup>18</sup>*ibid.*

<sup>19</sup>*ibid.* h. 101.

tersebut. Dampak dari uji coba tersebut memicu Dewan Keamanan PBB pada 5 Juli 2006 untuk membahas atas permintaan perwakilan Jepang di PBB.

Tidak sampai di situ, Korea Utara kembali melakukan uji coba senjata nuklir pada 09 Oktober 2006. Uji coba tersebut dilakukan di sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi langsung mendapatkan banyak protes dari negara tetangga. Aksi uji coba senjata nuklir tersebut semakin menjelaskan kesiapan strategi penangkalan Korea Utara mengingat tindakan uji coba sangat terkesan terbuka sehingga memicu perhatian dunia.

**Tabel1: Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara**

| Tahun           | Tempat Uji Coba                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 5 Juli 2006     | Semenanjung Korea                |
| 09 Oktober 2006 | Terowongan di pantai timur       |
| Mei 2009        | Di atas kedaulatan negara Jepang |
| Oktober 2009    | Peledakan nuklir bawah tanah     |

Data diolah dari berbagai sumber seperti Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*, April 2007, Hal. 101 diunduh pada tanggal 8 Maret 2011 melalui <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub771.pdf>; CRS Report for Congress, *North Korea's Nuclear Report Program*, Congressional Research Service: the Library of Congress, 2006

Uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara sebetulnya telah disampaikan melalui pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Korea Utara pada Oktober 2006. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa “*will in the future conduct a nuclear test*”.<sup>20</sup> Pernyataan yang ditujukan untuk mempertegas adanya kepemilikan senjata nuklir sekaligus pesan kepada dunia internasional bahwa Korea Utara kini tidak lagi dapat dianggap sebagai negara lemah, tidak hanya diklaim oleh pemerintah setempat, tetapi juga sengaja diumumkan kepada dunia internasional. Sikap dan pernyataan Korea Utara melalui uji coba tersebut juga disampaikan pada April 2003 di *Beijing Talks* dan Agustus 2003 pada *Beijing Meeting*.<sup>21</sup> Adanya pernyataan sekaligus sikap tegas dalam uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara merupakan upaya

<sup>20</sup> CRS Report for Congress, *North Korea's Nuclear Report Program*, Congressional Research Service: the Library of Congress, 2006. h. 1.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 8.

Korea Utara untuk menunjukkan bahwa saat ini kekuatan militer negara tersebut sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama pada kemampuan senjata nuklir.

Penggunaan senjata nuklir dalam kerangka uji coba senjata merupakan rangkaian proses pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang dilakukan melalui pengembangan fasilitas Yongbyon program nuklir untuk melakukan pembuatan senjata nuklir negara tersebut.<sup>22</sup> Uji coba senjata nuklir tersebut merupakan pesan strategis Korea Utara kepada lawan-lawannya terutama di Asia Timur untuk mewaspada tindakan provokatif yang dapat memicu terjadinya eskalasi konflik yang lebih tinggi. Kondisi itu berimbang pada pemahaman lawan untuk tidak melakukan serangan pertama, namun justru dengan mengurungkan niat untuk melakukan invasi. Keengganan lawan dalam melakukan invasi menjelaskan adanya bentuk kekhawatiran AS dan sekutunya sebagai langkah politik dan militer politik Korea Utara terhadap bentuk ketakutan dan kerugian yang diderita pihak lawan jika tidak mengindahkan unjuk kekuatan senjata nuklir Korea Utara sebagai bagian dari kebijakan untuk menangkal setiap musuh yang berupaya menekan.

Melihat perubahan sikap dari Amerika dan negara-negara lain yang mencoba menghadapi Korea Utara, terlihat bahwa uji coba senjata nuklir Korea Utara memberikan hasil yang sangat signifikan bagi perubahan konflik yang ada. Adanya keengganan pihak lawan, membuat Korea Utara sukses dalam membentuk strategi penangkalan melalui tindakan provokatifnya.

### **c) Kekuatan Pemaksaan Korea Utara**

#### **1. Posisi Tawar Korea Utara melalui Opsi Tidak Terbatas (*Unlimited Option*)**

Ketidakamanan yang dirasakan Korea Utara memotivasi negara tersebut dalam meningkatkan kekuatan militernya melalui senjata nuklir. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan doktrin nuklir yang diadaptasi negara tersebut sesuai dengan kebijakan militernya untuk menghadapi berbagai ancaman eksternal, terutama Amerika dan negara-negara aliansinya.

Menyadari ancaman yang besar dari negara-negara yang menentang pembangunan kekuatan militernya, Korea Utara bersikeras tetap melakukan pengembangan dan bahkan uji coba yang ditujukan untuk mengubah pola perimbangan kekuatan politik melalui pengembangan senjata nuklir sebagai alat pemaksa yang mendorong konflik mengarah pada perlawan. Pada awalnya, Korea Utara membangun nuklir untuk berbagia kebutuhan domestik, namun pada akhirnya juga ditujukan untuk memperkuat kekuatan militernya sebagai kekuatan pemaksa. Kecurigaan dunia terletak pada terhadap Korea Utara yang melakukan pengembangan

---

<sup>22</sup>Op.Cit, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, h. 95.

senjata nuklir dibuktikan dengan adanya laporan Badan Atom Internasional. Hal ini yang kemudian memicu protes keras dari negara-negara yang selama ini menjadi lawan politik Korea Utara.

Protes dari berbagai lawan-lawan politiknya tersebut semakin membuat Korea Utara menghadapi ketakutannya dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan militer. Konflik antara Korea Utara dengan Amerika dan beberapa negara lainnya membuat hubungan politik sangat memanas sehingga pilihan nuklir menjadi sangat ideal dalam menghadapi kekuatan militer lawan-lawannya mengingat terdapat ketidakseimbangan kekuatan.

Pilihan senjata nuklir menjadi sangat tepat mengingat karakter senjata nuklir memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang seimbang. Bentuk keseimbangan ofensif dan defensif senjata nuklir Korea Utara terletak pada uji coba senjata nuklir yang menjadi pesan kepada lawan-lawan politiknya untuk menyadari bahwa Korea Utara memiliki kemampuan militer yang tidak dapat diremehkan. Hal ini menjadi kekuatan pemaksa yang mendorong perubahan konstelasi politik, terutama di Asia Timur serta terciptanya berbagai jenis persenjataan rudal yang memiliki hulu ledak nuklir dengan berbagai jangkaun, terutama daya jelajah yang mampu mencapai negara-negara yang memiliki hubungan konflik dengan Korea Utara, seperti:

- a. Rudal Taepodong 2 dengan daya jelajah 5000 – 6000 kilometer dan mampu menjangkau AS
- b. Rudal Taepodong 1 dengan daya jelajah 2200 kilometer dan mampu menjangkau Kota Okinawa, Jepang
- c. Rudal Taepodong X dengan daya jelajah 2500 – 4000 kilometer

Melihat berbagai kemampuan daya jelajah dan kelengkapan rudal yang diserta hulu ledak nuklir memberikan peningkatan yang signifikan bagi Korea Utara untuk memiliki posisi tawar dalam bidang politik dan militer. Posisi tawar yang dimiliki Korea Utara dengan mengedepankan senjata nuklir memberikan tidak hanya kemampuan penangkalan, tapi juga mendorong negara-negara lain untuk berupaya mengantisipasi pergerakan negara tersebut.

**Gambar 1: Daya Jelajah Senjata Nuklir Korea Utara dalam Menjangkau AS**

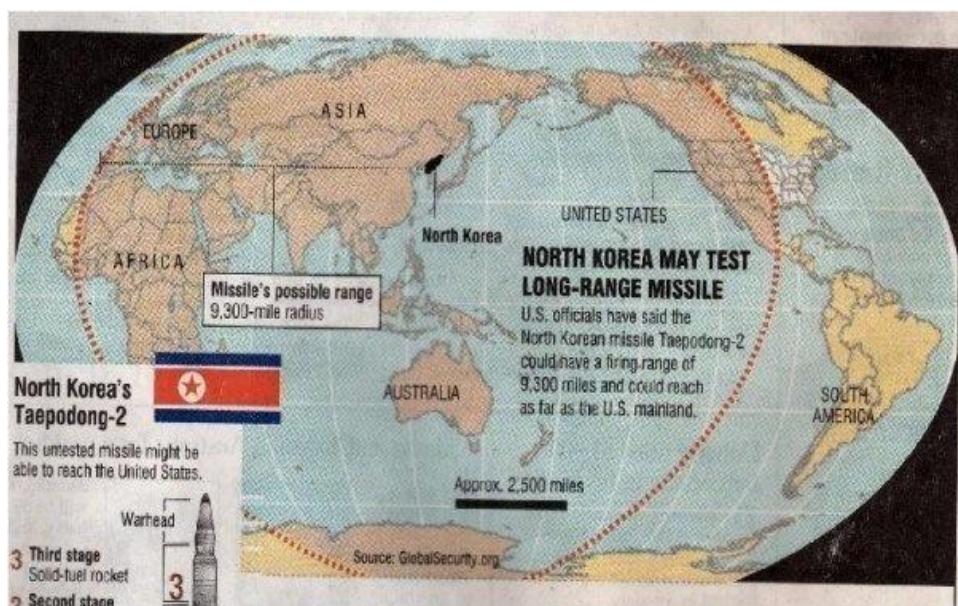


Sumber diolah dari [http://farm3.static.flickr.com/2498/3690280524\\_e70e7774d6\\_o.jpg](http://farm3.static.flickr.com/2498/3690280524_e70e7774d6_o.jpg)

Dengan adanya senjata nuklir yang menjadi senjata pamungkas Korea Utara untuk melakukan perimbangan memberikan pengaruh yang signifikan bagi negara tersebut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi, baik berupa ancaman militer maupun tindakan-tindakan politik. Senjata nuklir yang menjadi kekuatan militer yang memiliki kemampuan dalam memberikan kehancuran masif dan destruktif menggambarkan bahwa kini kekuatan militer tidak hanya berbicara pada pembangunan kekuatan militer untuk kekuatan udara, darat, ataupun laut. Di sisi lain, senjata nuklir Korea Utara telah memaksa Amerika dan negara-negara lainnya, seperti Korea Selatan, Jepang, dan sekutu Amerika lainnya untuk mengurangi intensitas tekanan politik sehingga hal itu membuat Korea Utara setidaknya memiliki posisi tawar dan kemampuan memaksa yang lebih baik.

Dengan adanya posisi tawar dan kemampuan pemaksa yang ada, membuat AS dan sekutunya kini tidak lagi memiliki disparitas dominasi yang besar. Korea Utara yang dulu hanya merasakan ancaman dan berupaya menghadapi ancaman kini dapat memberikan ancaman yang sama sehingga AS pun dituntut untuk waspada dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Korea Utara. Kondisi ini menggambarkan bentuk perimbangan kekuatan pada bidang politik dan militer karena setiap pihak berupaya mengantisipasi pergerakan lawannya.

**Gambar 2: Kemampuan Serangan Senjata Nuklir Korea Utara**



Sumber diolah dari [http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs028.snc1/3167\\_1133710991620\\_1492663093\\_30341693\\_5797939\\_n.jpg](http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs028.snc1/3167_1133710991620_1492663093_30341693_5797939_n.jpg)

Kekuatan pemaksa senjata nuklir yang memiliki kemampuan desktruktif menggambarkan bahwa serangan senjata nuklir memiliki kredibilitas serangan yang memiliki dampak kehancuran yang bersifat masif. Karena itu, serangan senjata nuklir amat sangat perlu diantisipasi mengingat dampak serangan senjata nuklir akan membuat bentuk pertahanan militer sekuat apapun tidak akan mampu menahan kehancuran masif yang disebabkan senjata nuklir.

Kemampuan militer Korea Utara yang tidak berimbang dengan lawan-lawan politiknya, serta perlunya membangun kekuatan militer yang besar dan sangat *urgent*-nya dalam mendapatkan keamanan (*security needs*), membuat negara tersebut sangat perlu untuk mengembangkan dan memiliki senjata yang benar-benar mampu membuat Korea Utara untuk mendapatkan posisi tawar dalam konflik militernya. Pilihan senjata nuklir menjadi sangat tepat bagi Korea Utara mengingat dukungan kekuatan militer tersebut akan membuat pihak lain untuk enggan melakukan *first strike attack*.

## 2. Perimbangan Kekuatan melalui Opsi Terbatas (*Limited Option*)

Dalam menghadapi AS dan negara-negara sekutunya, Korea Utara juga berupaya untuk mendorong lawan-lawan politiknya untuk berada pada pilihan ideal jika memang upaya kekuatan militer sebagai upaya terakhir. Pengembangan senjata nuklir negara tersebut merupakan langkah implementasi kebijakan pertahanan untuk menghadapi ketakutan atas tekanan politik dan militer Amerika. Kebijakan keamanan

ini pada akhirnya juga ditujukan untuk membujuk AS dan negara-negara lain dalam forum diskusi langsung agar dapat mengakomodasi kepentingan Korea Utara.<sup>23</sup>

Diskusi langsung yang diinginkan Korea Utara merupakan dampak dari kebijakan pertahanan yang mengedepankan senjata nuklir sebagai alat tawar untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu untuk kembali menyatukan dua Korea atau reunifikasi dua Korea.<sup>24</sup> Bentuk reunifikasi dua Korea inilah yang selama ini selalu diusung Korea Utara namun selalu mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, terutama AS. Upaya Amerika dalam menentang bentuk reunifikasi yang menjadi tujuan dari Korea Utara merupakan sikap untuk tetap menjaga pengaruhnya terhadap Korea Selatan sekaligus memperkuat pengaruh AS di Asia Timur. Hal itulah yang menjadi alasan Amerika untuk tidak menyepakati adanya bentuk reunifikasi. Dengan kata lain, sebuah bentuk reunifikasi yang sama sekali ditentang AS mengingat bentuk reunifikasi tersebut sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan negara *superpower* di wilayah regional tersebut.<sup>25</sup>

Atas dasar itulah, Korea Utara menganggap AS menghalang-halangi upaya normalisasi hubungan Korea Utara dan Selatan. Karena itu, Korea Utara terus merasa curiga terhadap kebijakan AS di wilayah Semenanjung Korea.<sup>26</sup> Kecurigaan tersebut yang kemudian membuat konflik politik dan militer antara kedua belah pihak semakin meruncing. Keinginan Korea Utara untuk menarik Amerika di dalam sebuah perundingan secara langsung, salah satunya mengusung tujuan reunifikasi tersebut.

Di sisi lain, kepentingan Korea Utara yang ditawarkannya kepada AS sebagai pilihan untuk perundingan dalam meredakan ketegangan juga terletak pada keinginan untuk mendapatkan bantuan ekonomi, namun tujuan tersebut sampai sekarang belum menemui titik terang sehingga Korea Utara tetap berupaya untuk menggunakan senjata nuklirnya sebagai alat penangkal sekaligus berupaya mencari solusi dalam memperbaiki ekonomi negaranya.<sup>27</sup>

Upaya penangkalan yang dilakukan Korea Utara selain untuk menjaga keamanan nasionalnya dari serangan militer, juga ditujukan untuk menghindari berbagai tekanan politik dari dunia internasional, serta ketakutan atau *security fears*.<sup>28</sup> Dalam berbagai upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Korea Utara berupaya untuk memberikan berbagai opsi, baik opsi yang tidak terbatas seperti

<sup>23</sup> Cha & Kang, *Nuclear North Korea: a Debate on Engagement Strategies*, New York: Columbia University Press, 2003, h. 2.

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 165 – 166.

<sup>25</sup> *Ibid.* h.169.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 134.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 135.

<sup>28</sup> *Ibid.*

indikasi untuk mempersiapkan perang dengan menggunakan nuklir dan dengan dampak serangan yang sangat besar, baik dalam skala kehancuran maupun dampak dari serangan, juga opsi yang bersifat terbatas, seperti bentuk perundingan yang mampu meredakan ketegangan sehingga berbagai kepentingan nasional coba dicapai dengan mengakomodasi berbagai bentuk perundingan dengan memanfaatkan sikap Amerika yang sedikit melunak.

## Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu bagaimana strategi nuklir Korea Utara dalam menghadapi interaksi konflik yang terjadi di Asia Timur. Analisa yang dilakukan dengan menggunakan teori *nuclear deterrence strategy* akhirnya menjawab bahwa pertama, Korea Utara menggunakan senjata nuklir untuk menjaga keamanan nasionalnya dari serangan militer, juga ditujukan untuk menghindari berbagai tekanan politik dari dunia internasional, serta ketakutan atau *security fears*.

Tindakan Korea Utara tersebut memang berdasar dengan sebab negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur meningkatkan kapabilitas militernya. Asia Timur sebagai kawasan dengan peningkatan ekonomi yang sangat baik tentu akan meningkatkan program senjata dan kapabilitas militernya. Negara-negara ini tentu memiliki konsekuensi logis di mana negara-negara yang memendam potensi konflik mau tidak mau dihadapkan pada kondisi untuk memperkuat postur militernya. Fakta berbicara bahwa, negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Timur merupakan negara-negara yang mengalami peningkatan terpesat di bidang anggaran belanja militer daripada wilayah lainnya di dunia.

Cina, Jepang, dan Korea Selatan merupakan kekuatan yang memiliki suatu hubungan jaringan yang kompleks antara kekuatan utama dengan kekuatan negara-negara lain di Asia Timur dan implikasinya terhadap regional *balance of power* (kekuatan yang seimbang) di kawasan ini. Tempat basis keamanan Asia Timur berputar mengelilingi aktor-aktor utama, dan setiap perkembangannya terutama mengenai stabilitas keamanan sangat tergantung pada jaringan itu.

Walaupun perekonomian Korea Utara tidak sebaik ketiga negara di atas, akan tetapi faktor dalam dan luar negerinya membuat negara ini turut meningkatkan kapabilitas militer dan pertahanannya. Adanya doktrin nuklir militer yang dimiliki Korea Utara menjadi dasar pengembangan senjata nuklir sekaligus pengimplementasian senjata nuklir sebagai kekuatan militer Korea Utara untuk menghadapi konflik di Asia Timur. Perumusan doktrin nuklir militer Korea Utara, dirumuskan dalam *Pyongyang's Nuclear Doctrine*. Doktrin ini

menjadi landasan bagi Korea Utara untuk menerapkan pengembangan dan penggunaan senjata nuklir sebagai bagian dari strategi militernya. Pengembangan senjata nuklir yang pada akhirnya ditujukan untuk melakukan penangkalan melalui uji coba senjata nuklir dikembangkan sesuai dengan perumusan doktrin nuklir militer.

Doktrin tersebut akhirnya menjadi dasar bagi Korea Utara untuk melakukan uji coba nuklir yang dimilikinya. Uji coba nuklir Korea Utara yang dilakukan pertama kali pada tahun 2006 tidak lepas dari pengembangan senjata nuklir negara tersebut. Uji coba ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negaranya telah memiliki kesiapan strategi penangkalan Korea Utara mengingat tindakan uji coba sangat terkesan terbuka sehingga memicu perhatian dunia. Uji coba nuklir yang dilakukan itu juga menandakan bahwa penggunaan kekuatan militer dijadikan sebagai strategi penangkalan hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer yang ditujukan sebagai usaha untuk menjaga keamanan nasional negara tersebut.

Uji coba senjata nuklir tersebut merupakan pesan strategis Korea Utara kepada lawan-lawannya terutama di Asia Timur untuk mewaspadai tindakan provokatif yang dapat memicu terjadinya eskalasi konflik yang lebih tinggi. Kondisi itu berimbang pada pemahaman lawan untuk tidak melakukan serangan pertama, namun justru dengan mengurungkan niat untuk melakukan invasi. Keengganan lawan dalam melakukan invasi menjelaskan adanya bentuk kekhawatiran AS dan sekutunya sebagai langkah politik dan militer politik Korea Utara terhadap bentuk ketakutan dan kerugian yang diderita pihak lawan jika tidak mengindahkan unjuk kekuatan senjata nuklir Korea Utara sebagai bagian dari kebijakan untuk menangkal setiap musuh yang berupaya menekan.

Dari tindakan Korea Utara untuk melakukan uji coba nuklir yang dimilikinya membuktikan bahwa karakter dari kekuatan nuklir menjelaskan bentuk kredibilitas strategi penangkalan yang dapat menghadapi ancaman dan segala bentuk intimidasi pihak lain yang berusaha melakukan penekanan, baik itu intervensi militer maupun intervensi politik. Senjata nuklir yang menjadi kekuatan militer yang memiliki kemampuan dalam memberikan kehancuran masif dan destruktif menggambarkan bahwa kini kekuatan militer tidak hanya berbicara pada pembangunan kekuatan militer untuk kekuatan udara, darat, ataupun laut. Di sisi lain, senjata nuklir Korea Utara telah memaksa Amerika dan negara-negara lainnya, seperti Korea Selatan, Jepang, dan sekutu Amerika lainnya untuk mengurangi intensitas tekanan politik sehingga hal itu membuat Korea Utara setidaknya memiliki posisi tawar dan kemampuan memaksa yang lebih baik.

Hasil dari analisis penelitian ini akhirnya menjelaskan bahwa adanya bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara serta interaksi konflik yang terjadi di Asia Timur menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bentuk pengembangan

senjata nuklir yang kini telah menghasilkan berbagai jenis persenjataan. Selain itu, pengembangan senjata nuklir ini memiliki implikasi dan dapat memicu konflik yang sangat besar yang dapat terjadi di kawasan regional. Apabila hal tersebut terjadi, tentu mengancam juga Indonesia yang secara geografis dekat dengan kawasan Asia Timur. Oleh karena itu saran penulis tentu saja diperlukan upaya diplomasi pertahanan yang mampu meredam krisis yang terjadi di Semenanjung Korea. Konteks diplomasi pertahanan sebaiknya dijalankan untuk menciptakan konteks perdamaian yang diatur di dalam kontrol senjata sehingga dampak peningkatan dan perimbangan kekuatan militer yang dilakukan Korea Utara tidak lagi menuju titik maksimal. Diplomasi dapat dicapai sesuai dengan subjektif Korea Utara melalui diskusi dan perundingan.

### **Daftar Pustaka**

- Alwi Shihab. 2000. *“Diplomasi RI Memasuki Abad ke-21 Perkembangan Dunia dan Kebijaksanaan Luar Negeri”* dalam <http://www.deplu.go.id>
- Andrew, K. Hamani. 2005. “Japan and Military Balance of Power in Northeast Asia” dalam, Judith F. Korenberg and John R. Faust, “Cina in World Politics; Policies, Processes, Prospects, Lynne Rienner.
- Andrew Scobell, *North Korea’s Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*, April 2007, Hal. 102 diunduh pada tanggal 8 Maret 2011 melalui <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub771.pdf>
- Barry Buzan. 1991. *People, State, and Fear*. Second Edition. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Bantarto Bandoro, “*Isu Keamanan di Asia Pasifik*”: *Rekomendasi untuk ASEAN dan Indonesia*, dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXII No. 4, Jakarta, 1993. Hlm. 297.
- Bruce Bennett, “The Emerging Ballistic Missile Threat: Global and Regional Ramifications”,
- Cha & Kang. 2003. *Nuclear North Korea: a Debate on Engagement Strategies*, New York: Columbia University Press.
- CRS Report for Congress, *North Korea’s Nuclear Report Program*, Congressional Research Service: the Library of Congress 2006. h. 1.
- Cina’s Defense Budget*. Data diolah dan diakses melalui <http://www.globalsecurity.org>
- Daniel A. Pinkston, *North Korea Motivations for Developing Nuclear Weapons*, h. 1, diunduh melalui [http://cns.miis.edu/north\\_korea/Korea\\_Utaramotv.pdf](http://cns.miis.edu/north_korea/Korea_Utaramotv.pdf), pada tanggal 15 Mei 2011

- Deger, Saadet dan Sen, Somnath. 1990. Military expenditure the political economy of international security, dalam Caroline Simatupang, Perbelanjaan Ketenteraan Indonesia Selepas Krisis Ekonomi 1997, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 2008.
- Douglas J. Murray and Paul R. Viotti (Eds). 1994. *The Defence Policy of Nation: A Comparative Study*. Third Edition. London: The JhonHopkins University Press. Hal.336
- Frank Barnaby. 2003. *How to Build a Nuclear Bomb and Other Weapon of Mass Destruction*, London: Granta Books.
- Horst Afheldt dan Philipp Sonntag. 1973. *Stability and Deterrence through Strategic Nuclear Arms*, Journal of Peace Research, Vol. 10, No. 3, Special Issue: Peace Research in the Federal Republic of Germany.
- Jack L. Snyder (Eds). 1995. *The Korean War: An International History*, New Jersey: Princeton University Press.
- Jack Snyder. 2005. *Correspondence: The Origins of Offense and the Consequence of Counterforce*, International Security, Vol. 11, No. 3 (Winter 1986/87); Richard Rosecrance, *Review: Explaining Military Doctrine*, International Security, Vol. 11, No. 3 (Winter, 1986-1987); Ka Po Ng, *Interpreting Cina's Military Power: Doctrine Makes Readiness*, USA: Taylor and Francis Group.
- John Baylis, S. Smith, P. Owens (4ed). 2008. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- K.J. Holsti, 1992. *The Interaction of States: Conflict and Conflict Resolution*, New Jersey: Prentice Hall.
- "Pertahanan Asia Timur: Ekonomi Krisis Bangun Senjata Jalan Terus", Majalah Angkasa, Jakarta 1 Oktober 2001, Hal 1.
- R.P Smith. 1989. *Models of Military Expenditure*, Journal of Applied Econometrics, Vol. 4, No. 4, John Wiley & Sons.
- Robert Powell. 1990. *Nuclear Deterrence Theory: The Search for Credibility*, New York: Cambridge University Press.
- Samuel S. Kim. 2010. *North Korea's Nuclear Strategy and Interface between International and Domestic Politics*, Asian Perspective, Vol. 34, No. 1.
- Stephen J. Rosow. 1989. *Nuclear Deterrence, State Legitimation, & Liberal Democracy*, Polity, Vol. 21, No. 3.

Sejarah Korea Utara. Diakses dari  
[http://www.globalsecurity.org/military/world/north\\_korea/history.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/north_korea/history.htm)

Stephen J. Rosow, "Nuclear Deterrence, State Legitimation, & Liberal Democracy," Polity, Vol. 21, No. 3, (spring, 1989), h. 563.

You Ji, The Military Modernation in the 1990's, "dalam Stuart Harrits and Gary Klinworth. Ed, Cina as A Great Power: Myths, Realities and Challenges in take Asia-Pasific Region (New York: ST. Martin's Press, 1995) hal. 231

**MEMINIMALISIR RISIKO PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA MELALUI PENERAPAN  
IMPLEMENTATION AGREEMENT PAKLIM  
ANTARA PEMERINTAH INDONESIA – JERMAN**

Jeanie Annissa<sup>1</sup>  
jeanieannissa@gmail.com

**Abstract**

*GIZ (Deutsche Gessellschaft Für International Zusammenarbeit) is a German government agency that has an attention to social issues. GIZ Institute and Ministry of Environment in Indonesia has been cooperated to resolve issues related to environmental, especially climate change, mitigation and reduction of greenhouse gases through agreements PAKLIM 1. This study was to examine the role of GIZ in minimizing the risks of climate change in Indonesia by using many theories as a pluralism approach, cooperation theory and the theory of sustainable development. This study used qualitative methods with primary and secondary data techniques through depth interviews and literature study. These results indicate the existence of significant GIZ institutions in an effort to reduce the risks of climate change in Indonesia.*

**Keywords:** *climate change, GIZ, environmental issues*

**Pendahuluan<sup>2</sup>**

Beberapa dekade terakhir, kajian mengenai perubahan iklim telah menjadi isu penting dalam kehidupan. Laju pembangunan yang semakin meningkat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga mempengaruhi risiko perubahan iklim di tingkat lokal maupun internasional. Keresahan terhadap kondisi iklim yang semakin ekstrim, memicu masyarakat internasional khususnya negara maju untuk memberikan andil dalam mencegah risiko perubahan iklim yang semakin buruk.

Perubahan iklim adalah suatu fenomena yang disebabkan oleh pemanasan global. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan komposisi gas rumah kaca pemerangkap panas yang terdapat di atmosfer yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Emisi gas rumah kaca ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, perubahan pemanfaatan lahan seperti penggundulan hutan, dan pembakaran sampah. Perubahan iklim mencakup semua bentuk inkonsistensi iklim, seperti lebih seringnya terjadi kekeringan, banjir, topan, serta dampak jangka panjang seperti kenaikan permukaan air laut, gagal panen, dan lenyapnya keanekaragaman hayati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

<sup>2</sup> Penulisan ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Peran GIZ (Deutsche Gessellschaft Fur Internationale Zussamenerbaeit) dalam Meminimalisir Resiko Perubahan Iklim di Indonesia Berdasarkan Implementasi Agreement Antara Pemerintah Indonesia dan Jerman”

<sup>3</sup>Dalam dokumen “Jerman dan Indonesia: Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kerjasama yang Inovatif, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Jakarta, hal.4.

Berdasarkan kondisi itulah, maka keberadaan Indonesia sebagai negara mayoritas di bidang agraris dan kelautan yang memiliki keanekaragaman hayati menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Keberadaan pulau yang berjumlah kurang lebih 17.000 pulau dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan air laut, perubahan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim yang menjadi masalah utama. Dengan bertambahnya intensitas dan frekuensi dari kejadian iklim ekstrim, risiko bencana banjir selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau akan semakin meningkat. Hal tersebut akan berdampak pada sektor sumber daya air, pertanian dan kehutanan, perikanan, kesehatan serta sarana dan prasarana. Penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir, kekeringan, longsor, dan kebakaran hutan telah dirasakan sebagai bencana yang merusak dan merugikan bagi Indonesia. Untuk menghindari dampak berganda dari bencana alam, maka tindakan adaptasi pada tingkat nasional dan daerah menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, kebijakan nasional untuk merespon perubahan iklim harus segera disusun.<sup>4</sup>

Dalam upaya memprioritaskan, mendesain, dan melaksanakan tindakan adaptasi perubahan iklim, sangatlah penting untuk memiliki satu pendekatan, kerangka kerja dan metodologi untuk mengkaji tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi. Kajian isu lingkungan dan risiko Perubahan Iklim merupakan salah satu dari agenda utama yang dikembangkan secara aktif oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, didukung oleh GIZ dan *Australian Government*.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan isu perubahan iklim, negara-negara maju seperti Jerman telah memberikan perhatian terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia. Wujud perhatian itu direalisasikan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Jerman dalam upaya meminimalisir perubahan iklim melalui suatu perjanjian yang bernama PAKLIM (Program Advis Kebijakan Untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim) yang telah dibuat di Jakarta. Kontribusi pemerintah Jerman direpresentasikan oleh keberadaan lembaga GIZ (*Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit*) yang berkontribusi melalui pengadaan tenaga ahli dan pengadaan bahan, serta biaya operasional dan administratif. Melalui program PAKLIM (Program Advis Kebijakan Untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim) diharapkan dapat meminimalisir terjadinya krisis perubahan iklim di Indonesia yang semakin ekstrim.

GIZ (*Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit*) merupakan sebuah lembaga pemerintah Jerman yang diperintahkan untuk membina dan menyediakan

<sup>4</sup> Dalam dokumen “Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim Tarakan, Sumatera Selatan dan Malang Raya: Ringkasan Untuk Pembuat Kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Juni 2012, hal. 1.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 1

pelayanan kerjasama internasional dalam hal pembangunan berkelanjutan. GIZ berpusat di Bonn dan Eschborn dan memiliki 17.000 staf dari seluruh dunia. GIZ beroperasi dalam berbagai bidang, meliputi pembangunan ekonomi dan promosi pekerjaan, pemerintahan dan demokrasi, keamanan, rekonstruksi, membangun perdamaian dan transformasi konflik sipil, kesehatan dan pendidikan dasar, perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya, serta mitigasi perubahan iklim. GIZ beroperasi di seluruh wilayah Jerman dan bekerja Sama dengan lebih dari 130 negara di dunia.

Dalam mengefektifkan kerangka kerjanya, GIZ berperan secara menyeluruh dalam mengelola perubahan dengan menyediakan tenaga terampil dan solusi. Namun, dalam peranannya yang menyeluruh tersebut, GIZ memberikan wewenang kepada partner kerja (Kementerian Lingkungan Hidup) untuk membentuk sendiri proses pembangunannya. Selain itu, GIZ juga berperan dalam memberikan saran kepada pembuat kebijakan dalam menentukan pandangan objek politik mereka serta menjadi penengah dalam menangani perbedaan kepentingan.

Perjanjian mengenai kebijakan lingkungan dan perubahan iklim yang dilakukan oleh GIZ dengan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup telah dilakukan sejak tahun 2009. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan GIZ dalam bidang mitigasi perubahan iklim yang berupa *International Agreement PAKLIM* yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko perubahan iklim di Indonesia. Isi dari perjanjian ini adalah berupa proyek kerjasama teknis yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam bidang kajian risiko perubahan iklim. Tujuan dari kerjasama ini, agar pemerintah nasional dan kota-kota di Indonesia serta perusahaan-perusahaan industri dapat merencanakan, mengimplementasikan strategi dan perangkat baru dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan situasi tersebut, peranan GIZ sebagai lembaga yang mewakili Pemerintah Jerman dan memiliki *concern* terhadap persoalan perubahan lingkungan menjadi sangat penting keberadaannya untuk membantu mereduksi mitigasi gas rumah kaca dalam mengurangi kajian risiko terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa peranan GIZ baik dalam bentuk bantuan finansial dan non-finansial melalui perjanjian yang telah dilaksanakan oleh kedua pemerintah (Indonesia-Jerman), dalam upaya meminimalisir risiko dalam adaptasi perubahan iklim yang terjadi di wilayah Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan “Bagaimana upaya meminimalisir kajian risiko perubahan iklim yang terjadi di Indonesia merujuk kepada implementasi Kerjasama PAKLIM 1 tahun 2009 – 2012?”

## **Sejarah Kerjasama PAKLIM**

PAKLIM (*Policy Advice for Environment and Climate Change*) merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*) yang merupakan lembaga yang mengatasnamakan pemerintahan Jerman. Program ini ditujukan untuk mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah, industri, dan organisasi masyarakat sipil untuk menerapkan dan menyebarkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi iklim. PAKLIM mendukung tujuan nasional Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020 dari sumber daya sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Dalam mencapai tujuannya tersebut, GIZ bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian (Mol), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan tingkat kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Program ini fokus pada 4 *Work Area*. *Work Area 1* dan *2* mengkaji tentang saran kebijakan nasional dan instrumen (*climate mitigation policy*); *Work Area 3* mengkaji tentang perubahan iklim dan kota-kota (*climate change mitigation in industries and industrial estates*); *Work Area 4* mengkaji tentang efisiensi energi dan industri, serta pendidikan dan kesadaran akan iklim (*climate education and awareness*).<sup>6</sup> Dalam pengimplementasiannya, program ini menyediakan model dan struktur pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi, melalui:

1. Instrumen ekonomi dan fiskal insentif/disinsentif untuk bekerjasama dengan aktor swasta;
2. Pendanaan inovatif untuk tindakan mitigasi dan adaptasi;
3. Perjanjian kemitraan sukarela dan kemitraan pembangunan di industri yang intensif;
4. Dukungan sekolah ramah lingkungan dan inisiatif pemuda;
5. Pengembangan skenario referensi dan alat pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

Pelaksanaan PAKLIM di Indonesia merupakan wujud keberlanjutan program lingkungan ProLH pada periode 2003 – 2011. Tetapi setelah diadakannya Bali Concord di tahun 2007, ProLH telah memasuki fase kedua harus mengalami perubahan dengan alasan untuk tidak saja fokus terhadap isu lingkungan tetapi meluas terhadap isu perubahan iklim.

Program PAKLIM dibentuk menjadi dua fase yakni PAKLIM I dan II. Kajian dari penelitian ini hanya difokuskan kepada PAKLIM 1 yang dimulai pada tahun 2009 hingga

<sup>6</sup> [www.paklim.org/about/](http://www.paklim.org/about/) diakses tanggal 12 Februari 2014

2013. Program ini terdiri dari 3 struktur saran kebijakan nasional yaitu perubahan iklim di kota-kota dan perkotaan, perubahan iklim di industri dan kawasan industri, serta membantu untuk mengembangkan kerangka kebijakan nasional untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pada tingkat nasional, program ini mendukung pengembangan konsep untuk aksi mitigasi nasional yang tepat, dan berdasarkan rencana aksi nasional untuk mitigasi GRK (RAN-GRK) serta pedoman bagi rencana aksi mitigasi lokal (RAD-GRK). Berdasarkan rencana tersebut, kementerian saat ini mengembangkan kebijakan mitigasi sektoral di 33 provinsi. Kebijakan-kebijakan ini akhirnya dapat dirumuskan sebagai NAMAs, untuk menjamin pengakuan internasional pemerintahan iklim Indonesia dan mengintegrasikan pendanaan internasional. Aplikasi pertama untuk NAMAs didukung di sektor transportasi telah diserahkan pada UNFCCC.

Sebuah sistem yang tepat dari pengukuran, pelaporan dan evaluasi (MRV) sangat penting untuk pengembangan NAMAs, karena mereka memastikan evaluasi dampak yang tepat dari ukuran. Oleh karena itu, sebuah penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan rekomendasi untuk setup kelembagaan seperti sistem MRV untuk Indonesia. Selain itu, peningkatan kapasitas telah terjadi di daerah itu, untuk mendirikan layak mitigasi, skenario untuk berbagai sektor dan provinsi.

Pada tingkat lokal, program ini mendukung pengembangan rencana aksi lokal diadaptasi untuk mitigasi dan adaptasi bekerja sama dengan 10 daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Program ini memberikan skenario gas rumah kaca emisi dan rekomendasi untuk layak, tindakan yang tepat secara lokal. Selain itu, ukuran mitigasi dimulai di bidang efisiensi energi. OSRAM Indonesia memasuki Kemitraan Pembangunan (DPP) untuk perkuatan penerangan jalan konvensional dengan LED. Kerjasama ini memberikan informasi tentang manfaat lingkungan dan kelayakan ekonomi dari aksi mitigasi tersebut dan menunjukkan potensi besar untuk penghematan energi.

PAKLIM juga berfokus pada integrasi sektor swasta ke dalam kegiatan mitigasi nasional. Ini didukung kemitraan sukarela pelaku sektor swasta dengan kementerian Perindustrian. Di sektor semen gugus tugas koperasi sudah di tempat untuk bernegosiasi rincian kesepakatan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kebutuhan dan ide-ide dari para pelaku sektor swasta, sebuah penelitian telah dilakukan, mengumpulkan sponsor diperlukan atau diinginkan oleh kementerian untuk pelaku industri. Sebuah langkah penting menuju kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta telah dicapai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan ruang Indonesian perdagangan KADIN.

Dua DPPs telah terealisasi di sektor industri. *Adidas Sourcing Ltd.*, memasuki DPP mengenai efisiensi energi dari rantai pasokan. PAKLIM memberikan pelatihan dan lokakarya tentang topik manajemen energi, opsi-opsi mitigasi mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah nyata, seperti perkuatan usang, teknologi energi - intensif. Di sektor semen, *Holcim* dan *Indocement* bekerja sama pada masalah pengelolaan limbah padat. DPPs ini sekarang menawarkan model praktik terbaik, dapat direplikasi oleh perusahaan lain.

Area kerja terbaru adalah pengenalan area kerja baru Pendidikan dan Kesadaran Iklim, sebagai pengalaman PAKLIM I telah menunjukkan bahwa ada kekurangan pemahaman terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. pada area ke-4 itu akan menjangkau pemuda Indonesia melalui inisiatif pemuda sekolah dan untuk meningkatkan kesadaran generasi berikutnya untuk kepentingan tinggi dari iklim dan lingkungan bagi kehidupan pribadi mereka dan perkembangan masa depan bangsa mereka.

Tujuan kerjasama PAKLIM ini bermaksud untuk memungkinkan pemerintah nasional, provinsi dan komunal untuk mengembangkan dan menerapkan strategi mitigasi dan adaptasi, untuk mengejar tujuan nasional untuk menurunkan gas rumah kaca - emisi Indonesia paling sedikit 26 % pada tahun 2020 (dibandingkan dengan skenario BAU – *Bussiness As Usual*). Penurunan emisi gas rumah kaca melalui teknologi hemat energi dan pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi bersih tidak hanya akan memiliki dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan. Ini juga akan secara langsung meningkatkan kualitas keseluruhan hidup masyarakat. Dampak selanjutnya dari strategi perubahan iklim seperti menyiratkan manfaat seperti pengurangan kemiskinan karena peningkatan air dan ketahanan pangan, atau lapangan kerja baru dan kondisi kerja yang nyaman karena ekonomi yang stabil dengan peningkatan produksi dan kualitas produk.

Semua kegiatan PAKLIM berusaha berkontribusi terhadap manfaat dan bertujuan untuk menciptakan *win-win solution* yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Proyek ini juga menempatkan fokus khusus pada pemberdayaan perempuan dan dorongan kesetaraan gender dengan secara khusus termasuk ahli perempuan dalam semua pelatihan dan proses pengambilan keputusan. Sejauh ini, wilayah yang merupakan mitra PAKLIM yaitu Blitar, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Semarang, Mojokerto, Yogyakarta, Salatiga, Surakarta, dan Pekalongan.

Pada umumnya cara kinerja PAKLIM terhadap mitra-mitranya tersebut sama, bagaimana diteliti terlebih dahulu penyebab atau sumber utama penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Umumnya kontributor terbesar emisi bersumber transportasi, perumahan, industri, sektor limbah atau penerangan jalan, dsb. Setelah mengetahui penyebabnya, dicarilah upaya mitigasi perubahan iklim sesuai dengan penanggulangan

yang tepat dalam mengatasi penyebab tersebut, seperti mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, melindungi lingkungan, meningkatkan kebersihan secara keseluruhan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan ruang hijau untuk memberikan iklim mikro yang lebih baik, menyerap polusi udara, meningkatkan infiltrasi air, dan untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat, mempromosikan daur ulang (3R) dan kompos di rumah, dan dengan menghasilkan energi dari gas metana. Selain itu upaya mitigasi yang disebabkan dari sektor transportasi dapat dilakukan melalui pengurangan kemacetan dan mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau yang merupakan prioritas dalam PAKLIM. Berikutnya di sektor energi, dilakukan efisiensi energi di gedung-gedung pemerintah, fasilitas pribadi, masyarakat, dan industri. Dari segi kesehatan, seperti bencana banjir, yang menyebabkan meningkatnya kasus demam berdarah serta hujan lebat dan angin kencang yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur telah menjadi prioritas tindakan adaptasi. Inisiatif untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut ialah dengan meningkatkan sistem pembuangan limbah kota, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memerangi perkembangbiakan nyamuk, dan meningkatkan tata kota dengan cara mengeluarkan izin bangunan yang sesuai.

PAKLIM mengundang perusahaan untuk bekerja sama secara erat dalam mengembangkan proyek-proyek yang akan memungkinkan mitra swasta untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri dalam hal meluncurkan teknologi inovatif di pasar Indonesia, penghijauan rantai suplai mereka, atau menerapkan langkah-langkah CSR yang berkelanjutan, sementara pada saat yang sama memberikan kontribusi bagi pengembangan NAMAs (Aksi Mitigasi nasional Tepat Guna) di sektor industri Indonesia (yaitu pengurangan GRK melalui peningkatan energi efisiensi, penggantian bahan bakar, dan atau modifikasi proses utama).

Inti dari pendekatan ini adalah untuk membawa penyedia teknologi Jerman dan internasional bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan industri di Indonesia yang membutuhkan dan tertarik dalam efisiensi energi atau teknologi iklim. Tujuannya adalah untuk mewujudkan proyek percontohan bersama mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan teknologi masing-masing, terkait dengan kemungkinan program pembiayaan atau instrumennya.

Saat ini, sebagian besar pembangkit listrik dan industri di Indonesia masih dilengkapi dengan teknologi rendah yang tidak efisien yang memancarkan gas rumah kaca. Selain itu, karena kekurangan di sisi pasokan energi, industri semakin mengalami pemadaman dan karenanya gangguan dalam proses produksi. Selain itu, dengan penghapusan bertahap dari subsidi energi tinggi menyebabkan harga energi meningkat.

Dalam menghadapi tantangan ini, industri sangat membutuhkan perubahan teknologi dan sistem yang diperlukan agar tidak kalah saing dengan industri internasional.

Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa undang-undang dalam beberapa tahun terakhir untuk mempromosikan perlindungan lingkungan dan konservasi energi. Namun demikian, ada kekurangan dalam penegakan hukum dan kurangnya kemampuan untuk menawarkan layanan manajemen energi yang diperlukan untuk mematuhi peraturan baru. Juga, di samping perusahaan, sebagian besar perusahaan mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi energi untuk biaya dan waktu intensif yang sulit untuk diterapkan. Industri sering kekurangan energi efisiensi terkait keterampilan teknis dan sumber daya dan sering tidak menyadari manfaat dari peningkatan efisiensi energi dalam hal pengurangan biaya.

### **Isi Perjanjian PAKLIM**

Project PAKLIM merupakan manifestasi kerjasama antar pemerintah dalam membahas upaya pembangunan yang berkelanjutan terkait isu lingkungan yang terdiri dari 4 komponen, yakni: Komponen *pertama*, Kebijakan Advis Nasional; komponen *kedua*, mitigasi dan adaptasi gas rumah kaca di kota-kota dan kawasan perkotaan; komponen *ketiga*, Mitigasi gas rumah kaca dan energi efisiensi di industri dan kawasan industri. *Keempat*, pendidikan dan kesadaran mengenai perubahan iklim. Masing-masing komponen memiliki tujuan dan indikator masing-masing sebagai tolak ukur pelaksanaan perjanjian tersebut.

Terkait hal tersebut, dalam penyelenggaraan projek PAKLIM maka masing-masing pemerintah memberikan kontribusi. Pemerintah Jerman yang diwakili oleh GIZ memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan pemerintah tertanggal 02 Oktober 2007 dan dilanjutkan dengan negosiasi antarpemerintah tertanggal 11 Maret 2010, bahwa Pemerintah Republik Federal Jerman akan mengalokasikan dana sebanyak 8,5 Juta Euro melalui GIZ dan sebagai tambahan AUSAID menyediakan dana hingga 850 ribu Euro untuk analisis kerentanan adaptasi perubahan iklim yang pelaksanaannya akan disertakan dalam komponen. Dana bantuan tersebut digunakan untuk biaya penyediaan tenaga ahli internasional dan nasional, tenaga ahli jangka pendek baik internasional maupun nasional, dan juga peningkatan kapasitas dan pelatihan (*training*), penyediaan peralatan dan perlengkapan, serta biaya operasional administratif.<sup>7</sup>

Sementara itu, Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan pemerintah tertanggal 02 September 2007 dan dilanjutkan dengan negosiasi antar pemerintah tertanggal 11 Maret 2010, bahwa kontribusi yang diberikan Pemerintah

---

<sup>7</sup> Dokumen Implementasi Perjanjian PAKLIM antara pemerintah Indonesia dan Jerman

Indonesia berupa penyediaan tenaga ahli dan staf tambahan yang bertanggung jawab terhadap program lingkungan hidup di daerah maupun tingkat provinsi. Selain itu, pemerintah Indonesia harus menyediakan lokasi, gedung dan tempat kerja; dan pemerintah juga sebagai pengatur kelembagaan komite pengarah PAKLIM telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-264/MENLH/10/2010 yang menetapkan struktur, peranan dan kewajiban komite pengarah dan komite teknis; sebagai *executing agency*; sebagai instansi pelaksanaan potensial yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang efisien; sebagai komite pengarah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasi dan memberikan arahan pada PAKLIM; serta sebagai komite teknis yang memandu aspek-aspek manajerial dan teknis.<sup>8</sup>

Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga memberikan beberapa fasilitas dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dilibatkan dalam proyek kerja sama ini. Kelompok *Executing Agency* yang diperankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga melibatkan beberapa lembaga lainnya yang bertugas mendukung dan mengkoordinasi pelaksanaan teknis dan administratif di Indonesia guna memfasilitasi koordinasi yang diperlukan untuk semua kegiatan, penyampaian informasi, permintaan dan formalitas guna memastikan hasil yang tepat waktu sehubungan dengan visa, perizinan, sertifikat registrasi dan lain-lain menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan perjanjian tersebut, setiap pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan projek PAKLIM baik dari segi sarana maupun prasarana hingga kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dari tingkat nasional dan internasional untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Perjanjian ini diawasi dan dievaluasi oleh kedua belah pemerintah dengan hasil pengawasan yang harus dilaporkan dalam pertemuan komite pengarah PAKLIM yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup melalui keputusan No.KEP-264/MENLH/10/2010 tertanggal 04 Oktober 2010. Komite pengarah ini bertanggung jawab dalam mengkoordinasi dan memberikan arahan sesuai dengan arahan kerangka kerja PAKLIM.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam proses evaluasi, GIZ dapat mengevaluasi selama dan sesudah pelaksanaan perjanjian tersebut dan GIZ menyediakan tenaga ahli penilai untuk mengevaluasi pekerjaan dan memeriksa segala dokumen yang diperlukan, setelah itu kementerian lingkungan hidup akan menerima hasil pengawasan dan evaluasi melalui sebuah laporan.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Dokumen Implementasi Perjanjian PAKLIM anatara pemerintah Indonesia dan Jerman

## Pelaksanaan Program PAKLIM

Pelaksanaan Program PAKLIM dapat di-breakdown berdasarkan unit area kerja yang ada. Penerapan **area kerja 1** di bidang advis kebijakan nasional, **area kerja 2** di bidang mitigasi dan adaptasi gas rumah kaca di kota-kota dan kawasan perkotaan, sedangkan di **area kerja 3** dilakukan dalam bidang mitigasi gas rumah kaca dan energi efisiensi di industri dan kawasan industri. **Area kerja 4** dilakukan dalam bidang pengetahuan dan kewaspadaan tentang perubahan iklim. Berdasarkan pembagian unit area kerja tersebut, maka telah dilakukan kegiatan mitigasi gas rumah kaca (MGRK) yang membutuhkan kebijakan dan standar yang mendukung teknologi konservasi energi dan efisiensi energi.

Implementasi kerjasama PAKLIM dalam unit area kerja 1 dan 2 telah dimanifestasikan dalam wujud penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara GIZ yang diwakili oleh Stefan Bundscherer sebagai Principal Advisor PAKLIM, Kementerian Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Hermien Roosita sebagai Sekretaris KLH-RI dan Haryadi Suyuti sebagai Walikota Yogyakarta mengenai pengembangan strategi kota yang terpadu dalam perubahan iklim. Kesepakatan ini dibuat untuk mempersiapkan rencana strategi dan rencana aksi daerah kota dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim.<sup>10</sup>

Kerjasama ini meliputi 2 (dua) hal penting yang *pertama*, adalah penyusunan strategi kota yang terpadu dalam perubahan iklim yang mencakup strategi menyeluruh tentang adaptasi dan mitigasi, serta integrasinya dalam rencana pembangunan kota. *Kedua*, pendampingan teknis dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan strategi terpadu dalam perubahan iklim. Dalam melaksanakan kedua hal tersebut, maka setiap pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan perubahan untuk menciptakan lingkungan kondusif untuk implementasi aksi mitigasi. Uji coba proyek kerja sama ini akan dilakukan di area perkotaan dan industri agar dengan mudah dapat direplikasi.<sup>11</sup>

Selanjutnya penerapan PAKLIM dalam unit area kerja 2 yang melingkupi tentang perubahan iklim dan kota-kota. Peningkatan emisi gas rumah kaca di perkotaan semakin meningkat akibat sibuknya kegiatan ekonomi dan intensitas kepadatan penduduk yang besar yang memerlukan jumlah konsumsi energi domestik dan komersial yang besar. Situasi ini diperparah dengan jumlah 50 persen populasi penduduk Indonesia yang

<sup>10</sup> kerjasama.jogjakota.go.id/?mod=berita&sub=berita&do=show&id=78 diakses tanggal 20 februari 2014

<sup>11</sup> Ibid.

bermukim di daerah perkotaan dan diperkirakan di tahun 2020 meningkat menjadi 67 persen.<sup>12</sup>

Urbanisasi yang tidak terencana mengakibatkan penggunaan lahan yang berlebihan dan ketergantungan pada transportasi pribadi bermotor. Ini menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca sehingga area perkotaan adalah penyumbang kedua terbesar dari emisi gas rumah kaca Indonesia. Tetapi, langkah-langkah yang ditempuh melalui kerjasama PAKLIM tersebut menyentuh area kerja sama dengan beberapa pemerintah kota setempat untuk mengurangi CO<sub>2</sub> secara signifikan.<sup>13</sup> Kerjasama ini melibatkan beberapa wilayah kota dan perkotaan untuk diarahkan mengenai cara pembuatan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mengajarkan tentang cara membuat proposal pendanaan terkait perubahan iklim.

Dalam mengurangi mitigasi gas rumah kaca di area perkotaan, maka dukungan pemerintah Jerman meliputi 6 (enam) hal, yakni<sup>14</sup> :

1. Mendukung pengembangan rencana aksi iklim terpadu bersama kota mitra di Indonesia dengan melibatkan masyarakat sipil;
2. Mendukung pengenalan teknologi efisien melalui kemitraan pembangunan dengan sektor swasta sebagai model inovatif untuk kebijakan mitigasi perubahan iklim di kota dan area perkotaan (misalnya melalui lampu jalan hemat energi);
3. Mendukung pengembangan kapasitas untuk kebijakan mitigasi perubahan iklim bagi masyarakat perkotaan (contohnya melalui modul pembelajaran tentang efisiensi energi di sekolah kejuruan teknik);
4. Mendukung perencanaan dan pengembangan skema transportasi perkotaan yang berkelanjutan;
5. Mendukung investasi dalam solusi transportasi umum yang rendah karbon, misalnya *commuter rail system* di Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung peralihan moda transportasi yang ramah iklim;
6. Mendukung perencanaan dan penerapan pengelolaan sampah yang rendah karbon dan ramah lingkungan di perkotaan.

Untuk unit area kerja 3 dalam bidang mitigasi gas rumah kaca dan energi efisiensi di industri dan kawasan industri. Di antara tahun 2008 hingga 2010 sektor industri telah menyumbang 30 persen terhadap PDB sebagai salah satu penggerak pembangunan Indonesia. Namun, pada waktu bersamaan, sektor ini merupakan salah satu pengguna

---

<sup>12</sup> [www.paklim.org/id/tentang/komponen-dua/](http://www.paklim.org/id/tentang/komponen-dua/) diakses pada tanggal 20 Februari 2014

<sup>13</sup> Artikel Mitigasi Gas Rumah Kaca di Area Perkotaan dalam booklet "Jerman dan Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kerjasama yang Inovatif", Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Jakarta,

<sup>14</sup> *ibid*

akhir energi terbesar (48%) dan kontributor yang kian besar dalam meningkatnya emisi gas rumah kaca. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil adalah salah satu penyebab utama perkembangan ini. Selain itu, industri penghasil gas rumah kaca terbesar adalah di bidang baja, semen, bubur kertas (*pulp*), pupuk dan tekstil. Industri Indonesia dapat mengurangi gas rumah kaca melalui mengganti teknologi efisiensi rendah, mengganti bahan bakar, dan memperbaiki proses produksi. Cara-cara ini juga memungkinkan untuk menghemat biaya energi dan memperkuat keunggulan dalam persaingan.

Unit area kerja 4 dalam bidang pengetahuan dan kewaspadaan terhadap perubahan iklim. Unit area kerja ini telah melaksanakan program penghijauan terhadap beberapa sekolah di wilayah pulau jawa. Hal ini dimaksudkan agar para pemuda yang menjadi generasi penerus dapat memahami dan mengolah sumber daya alam secara cermat dan bijak. *Public awareness* dan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting untuk melepaskan Indonesia dari persoalan lingkungan yang mengarah terhadap risiko bencana hingga konservasi biodiversitas. Pendidikan dalam pengolahan sampah dan membentuk lahan penghijauan di lingkungan sekolah melalui media seminar dan *workshop* yang dilaksanakan oleh GIZ bekerja sama dengan pemerintah lokal dan beberapa sekolah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaan bagi generasi muda terhadap pemanfaatan kekayaan alam.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kerjasama PAKLIM sendiri berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon melalui:

1. Rencana aksi perubahan iklim di perkotaan yang terintegrasi;
2. Insentif fiskal dan ekonomi untuk beralih ke teknologi rendah karbon;
3. Pengembangan dan penggunaan energi terbarukan;
4. Pengelolaan sumber daya yang efisien pada industri dan gedung-gedung;
5. Peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan;
6. Kerja sama untuk penerapan teknologi rendah karbon.

Jika dikaji berdasarkan teori kerja sama menurut James Dougherty bahwa bentuk kerjasama melalui Perjanjian PAKLIM adalah sebagai suatu bentuk respon pemerintah sebagai aktor-aktor politik untuk bekerjasama dengan negara internasional untuk mengatasi persoalan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam isu lingkungan melalui serangkaian regulasi ataupun prosedural pengambilan keputusan yang mempertemukan kepentingan negara dalam suatu lingkup hubungan internasional dengan negara lain dalam hal ini GIZ sebagai perwakilan dari Pemerintah Federal Republik Jerman.

Sejalan dengan itu, jika melihat dari pandangan Holsti, bahwa kerjasama PAKLIM merupakan wujud dari kolaborasi aktor negara dalam menyelesaikan permasalahan yang beranekaragaman dari segi nasional, regional, maupun global yang memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Kegiatan PAKLIM dalam unit kerja 1, 2, dan 3 telah melibatkan 14 titik wilayah kota dan perkotaan serta wilayah industri guna mengurangi mitigasi gas rumah kaca dan polutan industri yang menjadi salah satu penyebab dampak risiko perubahan iklim di Indonesia. Kegiatan di beberapa wilayah tersebut dilakukan dengan pelaksanaan seminar dan *workshop* dengan tujuan mengurangi emisi 26% di tahun 2020 dan 41 % di tahun setelah 2020.

Pada bulan Oktober 2011 hingga Februari 2012 telah dilakukan *workshop* di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Denpasar, Makassar, Samarinda, Padang, dan Banda Aceh serta beberapa wilayah lainnya yang menekankan pada tiga isu utama, yakni perubahan iklim, tata pemerintahan yang baik, dan pembangunan sektor swasta. Lebih lanjut, *Principal Advisor* PAKLIM Dieter Brulez menjelaskan bahwa PAKLIM menyusun rencana aksi perubahan iklim melalui pilar reduksi mitigasi gas rumah kaca, pengelolaan limbah dan pemanfaatan energi dan industri.<sup>15</sup> Selain itu, Pemerintah Jerman telah berkontribusi terhadap 20.000 siswa sekolah kejuruan teknik di area perkotaan untuk mendapatkan modul mengenai efisiensi energi. Selain itu, sistem pencahayaan di sekolah dan jalan raya diganti dengan pencahayaan hemat energi yang bekerja sama dengan OSRAM.

## **Hasil Program PAKLIM**

Dalam pelaksanaan perjanjian PAKLIM 1 yang diakhiri pada bulan Desember 2013, telah dihasilkan beberapa agenda yang telah diseminarkan dan diterapkan di 14 titik wilayah kota dan perkotaan. Hasil kerja sama tersebut menghasilkan:

1. Pemberian *supporting* terhadap pelaksanaan *RAN-GRK(National Action Plan For Reducing GHG Emission)* dan *RAD-GRK (Local Mitigation Action Plan)*;
2. Bekerja sama dengan 10 kota di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dalam mengembangkan rencana adaptasi untuk mitigasi dalam pengembangan wilayah lokal,
3. Melakukan kerja sama dengan OSRAM untuk memberikan penerangan jalan yang ramah lingkungan dengan menggunakan lampu LED dalam upaya berkontribusi terhadap aksi pengurangan mitigasi tersebut;

---

<sup>15</sup><http://www.prasetya.ub.ac.id> diakses pada tanggal 21 Februari 2014  
Dalam judul catatan “Jalinan Komitmen Jerman Pada Negara Berkembang”

4. Bekerja sama dengan *stakeholders* lain seperti *Adidas, Ltd.* dan *Holcim Indocement* tentang penggunaan efisiensi energi dengan penggunaan karbon rendah di lingkungan perindustrian.
5. Menciptakan gerakan “sekolah hijau” yang ramah lingkungan dan efisiensi energi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa kerja sama PAKLIM antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman memiliki signifikansi bagi kedua negara. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya kajian reduksi perubahan iklim untuk mengurangi mitigasi gas rumah kaca di wilayah perkotaan dan industri sangat berpengaruh terhadap *outcomes* yang dihasilkan oleh para kelompok kepentingan, karena kerja sama ini sesungguhnya melibatkan semua lapisan masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim yang semakin hari semakin mendekati titik ekstrim. Dengan kata lain, jika merujuk berdasarkan pendekatan teori kerja sama, maka dapat dijelaskan bahwa kerja sama ini dapat tercipta karena setiap pihak memiliki kepentingan yang sama untuk menyelesaikan persoalan isu lingkungan dan perubahan iklim.

## **Daftar Pustaka**

Dokumen “Jerman dan Indonesia: Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kerjasama yang Inovatif, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Jakarta

Dokumen “Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim Tarakan, Sumatera Selatan dan Malang Raya: Ringkasan Untuk Pembuat Kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, and Juni 2012.

Dokumen Implementasi Perjanjian PAKLIM antara Pemerintah Indonesia dan Jerman

Kedutaan Besar Republik Federal Jerman, Jakarta, Artikel Mitigasi Gas Rumah Kaca di Area Perkotaan dalam *booklet* “Jerman dan Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kerjasama yang Inovatif”,

[www.giz.de/themen/en/36046.htm](http://www.giz.de/themen/en/36046.htm) diakses pada 17 februari 2014

“World Commission on Environment and Development (WCED), *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*”

[www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pembangunan-berkelanjutan.html](http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pembangunan-berkelanjutan.html)  
diakses pada 24 februari 2014

[http://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD\\_env\\_kates\\_0504.pdf](http://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD_env_kates_0504.pdf) Robert W. Kates, Thomas M. Parris, dan Anthony A. Leiserowitz, ‘What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice,

[www.paklim.org/about/kerjasama.jogjakota.go.id/?mod=berita&sub=berita&do=show&id=78](http://www.paklim.org/about/kerjasama.jogjakota.go.id/?mod=berita&sub=berita&do=show&id=78) diakses pada 20 februari 2014

[www.paklim.org/id/tentang/komponen-dua/](http://www.paklim.org/id/tentang/komponen-dua/) diakses pada 20 Februari 2014

[www.prasetya.ub.ac.id](http://www.prasetya.ub.ac.id) Dalam judul catatan “Jerin Komitmen Jerman Pada Negara Berkembang” diakses pada 21 Februari 2014

# GLOBALISASI DAN IDEOLOGI PASAR GLOBAL DALAM TATANAN EKONOMI NEOLIBERAL

Arin Fithriana<sup>1</sup>, Sony Iriawan<sup>2</sup>  
arin\_030302@yahoo.com.au, soni.irawan19@gmail.com

## ***Abstract***

*This Peper aims to illustrate the basic conception of a social phenomenon which is called globalization. In general, a major issue discussed in this peper is the phenomenon of the globalization process and the foundation of the global market ideology contained in the scope of neoliberal doctrine. Manifesto of globalization and the trends that related with ideological values contained there in ideological practices that have profound relevance to the existence of the foundation for the development of neoliberal economic order.*

**Keywords:** *globalization, market globalism, neoliberalism, global market*

## **Pendahuluan**

Mengawali pembahasan dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan makna dan arti dari dua kata yang hampir terdengar saling berkaitan, yaitu antara globalisasi dan globalisme. Dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Manfred B Stegger bahwa terdapat perbedaan makna dan arti yang signifikan diantara keduanya. Pada umumnya globalisasi dipahami sebagai sebuah proses penyampaian material dan sosial yang seringkali diartikan secara berbeda-beda oleh sebagian kalangan tertentu, sehingga hal ini berdampak pada perbedaan penafsiran yang tidak jarang menimbulkan pertentangan. Sebagai sebuah fenomena dunia, globalisasi juga memiliki konsekuensi nyata terhadap kondisi kehidupan masyarakat global yang mendorong dunia ke arah yang lebih homogen dengan terintegrasi seluruh elemen-elemen kehidupan masyarakat ke dalam satu "wadah" atau yang biasa dikenal dengan sebutan *global village*.<sup>3</sup> Pandangan ini yang juga meyakini bahwa nilai-nilai dan moralitas dalam kebudayaan lokal yang terdapat di setiap negara-negara dunia akan hilang dan tergeser oleh kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Hal ini dianggap sebagai suatu proses perubahan secara luas dan menyeluruh, globalisasi tentu memiliki implikasi tersendiri.

Sebagai contoh, peningkatan mobilitas manusia dan percepatan yang menghubungkan antarnegara telah menghasilkan berbagai kesepakatan mengenai hubungan kerja sama di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik hingga budaya. Selain

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

<sup>2</sup> Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur

<sup>3</sup> Manfred B. Stegger, (2003), *Globalization: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, hlm. 7-8

itu, proses ini semakin diperkuat dengan adanya peningkatan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai aktivitas seperti perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi jejearing sosial, sehingga batas-batas teritorial kedaulatan suatu negara menjadi bias. Sementara itu secara berbeda, globalisme diartikan sebagai seperangkat teoritis yang berwujud pada ideologi pasar neoliberal yang memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai dan makna tertentu di dalam proses globalisasi. Sebagai sebuah ideologi, globalisme memberikan preskripsi-preskripsi normatif terhadap proses globalisasi. Paul Ricoeur menyatakan bahwa sebagaimana pemahaman ideologi pada umumnya, globalisme memiliki tiga karakteristik yakni distorsi, legitimasi, dan integrasi.<sup>4</sup> Berdasarkan ketiga karakteristik tersebut globalisme memberikan implikasi terhadap gambaran realitas sosial yang telah mengalami proses konstruksi, distorsi, dan simplifikasi, sehingga semesta realitas yang distrukturkan olehnya pada level sosial dapat berkembang menjadi bentuk kesadaran palsu. Melalui sistem legitimasi, globalisme memiliki mekanisme pengabsahan atas berbagai kerangka pemikiran dan acuan tindakan yang diajukan. Akhirnya globalisme memiliki fungsi integratif yakni menyediakan serangkaian simbol, norma, dan citra yang menghimpun dan membangun suatu identitas bagi individu ke dalam lingkungan kolektif.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan signifikan antara globalisasi dan globalisme terletak pada tataran praksis yaitu penggambaran antara proses dan ideologi. Selanjutnya hal utama yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah menelaah kembali transformasi globalisme yang dalam hal ini telah melebur menjadi sebuah ideologi pasar global atau yang disebut oleh Stegger dengan *market globalism*.<sup>6</sup> Keterbukaan ide pasar bebas dunia dalam ideologi *market globalism* bukanlah merupakan fenomena yang terjadi begitu saja, akan tetapi erat kaitanya dengan tatanan ekonomi neoliberal. Neoliberal telah meneguhkan superioritas ekonomi dan politik negara-negara di dunia ke dalam institusi-institusi global yang menjadi “wadah” bagi percaturan kebijakan ekonomi pasar bebas dunia. Untuk lebih jelasnya, tulisan ini menjelaskan perkembangan globalisasi dan ideologi pasar global atau *market globalism* dalam tatanan ekonomi neoliberal dengan beberapa penjelasan-penjelasan yang saling terkait dalam menunjukkan eksistensinya dalam tatanan sistem ekonomi global.

---

<sup>4</sup> Goerge H. Taylor, (1986), *Lectures on Ideology and Utopia*, New York: Colombia University Press. Dalam Jurnal M. Kholid Syeirazi, (2003), “Dilema Praktisi Globalisme Neoliberal”, Jogjakarta : UGM, Vol 7, nomer 1, hlm.2

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 2

<sup>6</sup> Manfred B. Stegger, (2005), *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, (trj), Adirio A. Salamun, Jogjakarta: Lafadi Pustaka, hlm. 74

## Globalisasi Proses Ekonomi dan Munculnya Institusi Ekonomi Global

Sebagaimana yang disampaikan oleh Jhon Bonython, bahwa globalisasi merupakan suatu fenomena yang secara implikasinya berdampak langsung kepada pelaku-pelaku ekonomi di bagian manapun di dunia. Secara teknis hal ini dapat dijelaskan karena fenomena ini menghantarkan pada peningkatan proses integrasi ekonomi yang didukung dengan adanya kegiatan pasar global yang melintas batas. David Enderson menanggapi, bahwa fenomena globalisasi secara efisien telah mempelopori pergerakan bebas barang, jasa, dan tenaga kerja atau buruh sehingga membentuk sebuah kesatuan makanasi pasar tersendiri. Brink Lindsey dalam bukunya *Against the Dead Hand*, mengarahkan pada sebuah pemahaman akan gelobalisasi kedalam tiga aspek makna yang berbeda, pertama untuk menggambarkan fenomena ekonomi dari peningkatan integrasi pasar lintas batas dengan adanya pengaruh kemajuan teknologi informasi yang “mempersempit” batas territorial negara. Kedua, untuk menggambarkan fenomena politik yang ditandai dengan menghilangnya hambatan-hambatan atau aturan yang diterapkan oleh pemerintah guna menyikapi masuknya arus barang produksi ke dalam negeri. Ketiga, menggambarkan fenomena politik yang jauh lebih luas mengenai perumusan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pasar baik pada skala domestik maupun internasional.<sup>7</sup>

Secara radikal globalisasi mendorong integrasi ekonomi melalui penerapan kebijakan sistem pasar bebas. Penerapan pasar bebas tentunya melandasi kewajiban mengenai penghapusan hambatan-hambatan ekonomi seperti, pajak, *nontariff barrier*, kuota impor, biaya transportasi, dll. Integrasi ekonomi secara luas mencakup aktivitas transaksi-transaksi ekonomi baik yang berkaitan dengan hasil barang produksi maupun tenaga kerja dan jasa, hal inilah yang disebut oleh para ekonom “faktor-faktor produksi”. Pada tataran praksis hampir seluruh negara memiliki semacam aturan mengenai batasan terhadap pergerakan pasar lintas batas. Dalam keadaan seperti dapat dipastikan bahwa jarak atau territorial bukanlah merupakan hambatan bagi negara-negara untuk melakukan aktivitas perdagangan dan pergerakan modal. Selain itu, peningkatan aktivitas perdagangan bebas juga memberikan peluang besar bagi para perusahaan multinasional (MNC'S) dalam penanaman modal asing atau yang disebut dengan *foreign direct investment (FDI)* serta menerapkan regulasi dan menekan subsidi pemerintah khususnya di sektor-sektor produksi dalam negeri.<sup>8</sup>

Selanjutnya hal yang juga dapat menggambarkan globalisasi sebagai proses ekonomi adalah dengan menampilkan pemahaman sejarah sebagai landasan studi guna

<sup>7</sup> Martin Wolf, (2004), *Why Globalization Works*, United Kingdom: Bryan Literary Agency, hlm. 17

<sup>8</sup> Manfred B. Stegger, (2009), *Globalism: The Great Ideological Struggle Of The Twenty-First Century*, USA: Rowman& Littlefield Publishers Inc, hlm. 28

menjelaskan keterkaitan antara globalisasi dan proses ekonomi. Pertumbuhan blok-blok ekonomi seperti seperti Uni Eropa, NAFTA, ASEAN, dan beragam asosiasi perdagangan regional lainnya, dapat dikatakan merupakan wujud dari integrasi ekonomi yang menciptakan keterkaitan dan ketergantungan antarnegara. Perlu diketahui bahwa, globalisasi menyampaikan gagasan mengenai esensi dari ketergantungan ekonomi antar negara dengan bertolak pada peningkatan hubungan ekonomi nasional dalam bentuk kerja sama ekonomi regional. Adapun beberapa akademisi berpendapat bahwa di beberapa dekade sebelumnya proses globalisasi dan keterkaitannya dengan fenomena ekonomi global dapat terlihat dari periode sejarah awal terbentuknya institusi ekonomi dunia pascaperang dunia II. Hal ini ditandai dengan konfrensi *Bretton Woods* tahun 1944. Pada saat itu AS dan Inggris, merupakan dua aktor utama yang mensponsori penghapusan kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh negara-negara barat di masa perang 1914 – 1939. *Bretton Woods* dirancang sebagai sistem yang di dalamnya meliputi liberalisasi perdagangan dan pembentukan aturan-aturan yang mengikat aktivitas-aktivitas ekonomi dunia. Negara-negara sepakat menempatkan *Bretton Woods* mengadopsi kebijakan mengenai standarisasi pertukaran mata uang dengan menetapkan nilai emas tetap dalam dollar AS bagi setiap mata uang negara-negara. Dalam aturan-aturan yang disepakati setiap negara bebas mengontrol agenda-agenda ekonominya sendiri, termasuk implementasi kebijakan dalam bidang pesejatran sosial.<sup>9</sup>

Salah satu yang terpenting adalah, konferensi *Bretton Woods* telah melandasi fondasi institusional dengan dibentuknya tiga institusional ekonomi internasional yaitu, IMF, GATT, *World Bank*. Ketiganya memiliki fungsional yang berbeda-beda, IMF dibentuk untuk merancang sistem moneter internasional, sedangkan *World Bank* dirancang untuk memberikan pinjaman Dana rekonstruksi pada negara-negara Eropa pascaperang. Mulai tahun 1950-an tujuannya diperluas untuk mendanai proyek-proyek industrialisasi di berbagai negara dunia ke-3. Pada tahun 1947 GATT menjadi organisasi perdagangan global yang diberi tanggung jawab membuat dan menyokong perjanjian-perjanjian dagang multilateral, yang pada perkembangannya di tahun 1995, GATT diubah menjadi WTO. Sebagaimana akan ditujukan pada urian berikut, kebijakan neoliberal dalam institusi-institusi ekonomi ini, menjadi pangkal tolak perdebatan ideologis seputar fenomena globalisasi ekonomi. Semasa beroprasinya kurang lebih tiga dekade, sistem *Bretton Woods* telah kembali mengagaskan pertumbuhan emas ekonomi negara-negara Eropa, dan dikenal sebagai *golden age of controlled capitalism* yang ditandai dengan terpenuhinya padat kerja dan meluasnya kesejatran melalui peningkatan upah dan layanan sosial. Realitas ini menjadi tanda keberhasilan besar yang dicapai oleh *Bretton Wood's*,

<sup>9</sup> Stegger, *Globalism*, hlm. 29

walaupun pada akhirnya sistem ini kembali mengalami kebuntuan di tahun 1970an dan memaksa Presiden AS, Ricahard Nixon untuk melepas sistem nilai tukar tetap bersarkan emas.<sup>10</sup>

Adanya dorongan dari politisi-politisi partai konservatif AS dan inggris telah mendesak gerak pertumbuhan neoliberal menuju ekspansi pasar global. Selanjutnya dinamika ekonomi global dipastikan akan bertumpu pada kebijakan-kebijakan deregulasi sistem finansial domestik, pelepasan bertahap terhadap kontrol kapital, dan meningkatnya transaksi-transaksi finansial global. Selama tahun 1980 – 1990-an, upaya Inggris dan AS membangun pasar global lebih banyak disokong oleh perjanjian menyeluruh terhadap liberalisasi perdagangan yang mendongkrak arus sumber-sumber daya ekonomi yang melintasi batas teritorial. Perkembangan teori-teori pasar bebas yang disponsori oleh Friedrick Hayek dan Milton Friedman tampil sebagai paradigma ekonomi baru. Liberalisasi perdagangan finansial memungkinkan pesatnya mobilitas di antara segmen-semen industri finansial, yang ditopang oleh teknologi komunikasi. Para pemburu laba dan spekulan global menengkuk hasil spektakuler dengan cara mengambil keuntungan dari lemahnya sistem regulasi perbankan dan keuangan di negara berkembang.

### Globalisasi dan Akar Ideologi *Market Globalism*

Berakhirnya perang dingin di tahun 1990-an, telah berdampak pada perubahan besar bagi situasi dunia. Tumbangnya Uni-Soviet sebagai revalitas Amerika Serikat menandakan berakhirnya perdebatan seputar cita-cita revolusi Marxist-sosialis dengan Liberal *Laissez faire* yang pernah menjadi pembahasan utama dalam menggambarkan struktur politik internasional dalam beberapa dekade yang lalu. Beberapa akademisi mencatat bahwa kejatuhan Uni-Soviet merupakan “babak” baru bagi masa depan dunia kontemporer di bawah pengaruh Liberal Anglo American. Seperti apa yang digambarkan oleh Francis Fukuyama, di dalam karyanya *The End of History: and the Last Men*, yang menjustifikasi bahwa peradaban barat telah keluar sebagai *the champion* dari perdebatan ideologi yang beberapa dekade lalu telah berjuang dalam memenangkan pertarungan besar melawan Marxisme sosialis. Fukuyama dalam prediksinya meyakini bahwa penyebarluasan nilai-nilai barat dan di segala bidang kehidupan sudah tidak dapat dihentikan. Hal ini diperkuat dengan adanya logika pembangunan pasar kapitalisme yang didukung dengan sistem pemerintahan gaya demokrasi. Tidaklah heran jika hal tersebut dianggap sebagai bentuk akhir dari sistem pemerintahan dan ekonomi masyarakat dunia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, .hlm. 30

<sup>11</sup>Francis Fukuyama, (1999), “Second Thoughts: The Last Men in a Bottle”, National affairs, no56, hlm 16

Selanjutnya prediksi mengenai peningkatan “*marketization*” dan terciptanya kondisi masyarakat yang terhubung dalam dunia yang ter-global-kan, didedikasikan untuk menjangkau kepentingan dalam logika kalkulasi ekonomi atau *profit accumulation*. Di beberapa penjelasan selanjutnya, Fukuyama mengkokohkan pendapatnya bahwa berakhirnya era perdebatan ideologi secara langsung telah menjadikan konsep *market globalism* menjadi satu-satunya rujukan setiap negara dalam mewujudkan integrasi ekonomi global yang saling menguntungkan. Namun segala kemenangan barat atas perdebatan ideologi di dunia belum seutuhnya dapat mengamankan tatanan mereka, hal ini terbukti dengan tragedi 9/11 yang diindikasikan berasal dari gerakan-gerakan perlawanan dari sekelompok fundamentalis agama yang untuk mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan aksi-aksi teror yang lahir dari muatan pemikiran radikalistik. Dengan kata lain, apa yang disebut dengan *market globalism* akhir-akhir ini kembali dihadapkan dengan dua penantang sekaligus yaitu *justice globalism* dan *jihadist globalism*. Pemberian kontrol mengenai pengertian konseptual globalisasi, merupakan sebuah hasil dari penetapan bentuk dan aktualisasi proses globalisasi.<sup>12</sup>

Fenomena *market globalism* yang saat ini telah melanda dunia, tidak lain merupakan suatu ideologi politik yang memiliki pengaruh dominan. Dominasi tersebut juga didukung oleh adanya hegemoni dari sistem yang mengklaim sebagai seperangkat aturan porses perubahan sosial masyarakat yang biasa disebut dengan globalisasi. Dengan kata lain, *Market Globalism*, merupakan ideologi yang dibawa dalam kesatuan material dari proses globalisasi yang juga merupakan agenda politik dunia yang digambarkan melalui peningkatan keterbukaan perdagangan dan transportasi barang dan jasa tanpa hambatan. Adapun Manfred mencatat bahwa, *market globalism* merupakan ideologi yang telah mendominasi sistem ekonomi dunia saat ini. *Market globalism* berusaha untuk membatasi kebijakan publik terkait makna dari karakter agenda proses globalisasi yang membahas hal-hal yang dapat mendukung agenda politik tertentu. Pesan-pesan terkait gambaran sekilas *market globalism*, dibuat seolah ideologi tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari perubahan situasi dunia yang ter-global-kan.<sup>13</sup> Seperti apa yang pernah digubris dalam tajuk utama *Newsweek*, dengan memperlihatkan sebuah kalimat yang bertuliskan “*Like it or not, you’re married to the market, and the market will marry to us*”. Dapat dipahami bahwa unsur pernyataan tulisan tersebut berusaha untuk menyampaikan pesan kepada pembaca tentang gambaran umum dari representasi realitas sosial yang terjadi. Pernyataan tersebut menghantarkan pada

---

<sup>12</sup> Stegger, *Globalism*, hlm. 5

<sup>13</sup> Ibid.,hlm.7

sebuah analisis yang lebih terpadu dalam menggambarkan sekilas mengenai unsur-unsur ideologis dan fungsi dari *market globalism*.<sup>14</sup>

### Klaim-klaim Globalisasi Terkait Ideologi *Market Globalism*

Stegger mencatat bahwa *market globalism* dapat dilihat sebagai sebuah seperangkat aturan yang menandakan akan kebangkitan ideologi pasar. Dalam hal ini Stegger mencoba menjelaskan permasalahan seputar justifikasi globalisasi dan ideologi *market globalism* yang didasari pada lima bentuk klaim utama yang dilontarkan oleh kaum globalis.<sup>15</sup> Klaim pertama: globalisasi yang saat ini sedang berlangsung merupakan “kendaraan” utama yang menghantarkan materi ideologi *market globalism* yang di dalamnya memuat sejumlah atribut seperti liberalisasi dan integrasi pasar. Klaim lebih difokuskan pada hubungan negara dengan pasar. Negara dan pasar merupakan dua entitas yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pasar global. Negara harus memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM bagi kebebasan individu dalam iklim masyarakat demokratis. Negara sebaiknya tidak ikut campur tangan dalam ruang privat pasar agar terlaksananya fungsi pasar global. Segala hal yang berkaitan dengan regulasi haruslah diserahkan ke mekanisme pasar. Munculnya pasar global yang terintegrasi secara bersamaan diharapkan akan membuka lahirkan kebebasan politik yang lebih besar bagi semua warga dunia.

Klaim kedua, globalisasi merefleksikan penyebaran kekuatan pasar yang tidak dapat dibendung yang keberadaannya turut ditopang oleh kemajuan inovasi teknologi sehingga menjadikan arus integrasi perekonomian global menjadi tidak terelakkan. Negara dalam hal ini seolah tidak memiliki pilihan lain kecuali menyesuaikan dan “mengekor” dengan arus globalisasi tersebut. Segala bentuk kerja sama lintas negara-negara harus berimplikasi pada kinerja pasar global. Klaim ketiga: Globalisasi dikendalikan oleh pasar dan teknologi. Sejatinya manusia dapat mempercepat atau memperlambat globalisasi, namun sebenarnya yang peranan fokus kendali adalah tangan “gaib” pasar yang selalu menerapkan kebijakan yang superior. Klaim keempat: globalisasi menguntungkan semua pihak. Klaim ini didasarkan pada ideologi *market globalism* bahwa perdagangan bebas dan pasar terbuka yang tertuang dalam globalisasi memberikan prospek bagi tersedianya lapangan pekerjaan, merangsang pertumbuhan ekonomi makro dan mikro, meningkatkan standar hidup masyarakat di seluruh dunia.

Klaim kelima: globalisasi menghantarkan pada penyebaran sistem demokrasi di seluruh dunia. Klaim ini didasarkan pada wacana publik dengan menyetarakan pasar

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Manfred B. Stegger, (2005), “From Market Globalism to Imperial Globalism: Ideology and American Power after 9/11”, Royal Melbourne Institute of Technology: Routledge, Vol. 2, No. 1, hlm. 33-39

bebas dengan perkembangan iklim demokrasi. Strategi yang sering dibuat oleh kaum neoliberal untuk menarik dukungan massa adalah pendiskreditan tradisionalisme dan sosialisme. Para pendukung globalisasi sangat menekankan korelasi antara tingkat perkembangan ekonomi suatu negara dengan keberhasilan sistem demokrasi. Memang korelasi yang terjadi tidak dapat ditangkap secara langsung namun tingkat perkembangan ekonomi yang dihasilkan globalisasi memberikan situasi yang kondusif bagi terciptanya masyarakat sipil dan kelas menengah yang kuat. Kelas menengah yang kuat inilah yang akan mendorong demokrasi. Dari keseluruhan klaim ini menunjukkan bahwa ideologi pasar *market globalism* cukup komprehensif dan sistematis untuk dianggap sebagai ideologi. Lima klaim inilah yang coba ditekankan oleh Steger sebagai pertimbangan yang masuk akal. Dengan menyimpulkan bahwa globalisme yang berkembang menjadi ideologi pasar *market globalism* ini dapat memperkuat pengaruh dan tujuan politis dengan memanfaatkan fenomena globalisasi sebagai kendaraan untuk memperkuat dan meningkatkan ekspansi ideologi pasar mereka. Selanjutnya analisis yang lebih mendalam dikemukakan oleh Manfred melalui komperasi keterkaitan antara *market globalism* dengan neoliberal. Dengan kata lain, globalisasi adalah sebuah konsep yang diciptakan untuk mendukung *market globalism* yang membawa pesan neoliberal kepada dunia internasional.

### **Implikasi *Market Globalism* dalam Tatatan Ekonomi Neoliberal**

Prinsip utama neoliberalisme adalah mengenai keutamaan pertumbuhan ekonomi seperti, pentingnya perdagangan bebas, deregulasi peran negara dalam urusan pasar, peningkatan investasi, peluang bagi bagi perusahaan multinasional (MNC'S) dan advokasi dari bentuk evolusi pengembangan sosial yang bertumpu pada pengalaman *the western* dan berlaku untuk seluruh dunia. Neoliberalisme adalah pengembangan dari perspektif ekonomi *classical liberalism* yang berakar pemikiran filsuf Inggris, Adam Smith (1723 – 1790), David Ricardo (1772 – 1823), dan Herbert Spencer (1820 – 1903). Dari beberapa filsuf tersebut secara umum mereka meyakini mengenai dasar pemikiran *homo economicus* yang menganggap bahwa seseorang atau individu merupakan mahluk ekonomis. Dalam pandangan Smith, ekonomi dan politik adalah dua hal yang terpisah. Smith mengklaim bahwa landasan aturan ekonomi terbaik adalah ketika campur tangan pemerintah di bawah sistem hukum mengenai ekonomi telah dinihilkan. Pasar memiliki peranan besar dalam merumuskan *self regulating mechanism* yang cenderung mengarahkan pada keseimbangan penawaran dan permintaan, sehingga mengamankan alokasi sumberdaya paling efisien. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa Smith memunculkan sebuah kontradiksi terhadap doktrin ekonomi merkantilisme yang

mensyaratkan atas kendali mutlak ekonomi oleh negara. Smith dengan tegas mendukung "ter-bebasnya" pasar dari regulasi negara. Visi kebebasan ekonomi liberal klasik merupakan hal yang menjadi tumpuan dalam doktrin neoliberal kontemporer. Dengan prinsip pasar *laissez-faire*-nya, bagi Smith hal ini merupakan sebuah dukungan terhadap mekanisasi perdagangan bebas yang cocok dengan prinsip-prinsip *laissez faire*, yang di dalamnya juga termasuk penghapusan tarif impor dan hambatan lain untuk perdagangan dan arus modal antarbangsa.

David Ricardo dalam merumuskan keunggulan produksi barang, membumikan sebuah teorinya yang biasa disebut dengan "*comparative advantage*", yang berkaitan dengan mekanisasi impor dan ekspor yang juga menjadi acuan pedagang bebas kontemporer. Ricardo berpendapat bahwa *comperative advantage* ditujukan untuk memberikan *win-win solution* bagi setiap aktor yang berperan dalam perdagangan bebas. Setiap negara yang terlibat dalam mitra perdagangan bebas diwajibkan untuk fokus dan mengkhususkan produksi komoditas barang yang dianggap memiliki keunggulan komparatif tersendiri dan berbeda dengan hasil produksi komoditas dari negara lainnya. Sebagai contoh, jika Italia bisa menghasilkan anggur lebih murah daripada Inggris dan Inggris bisa menghasilkan kain yang lebih murah daripada Italia, atau jika Jepang bisa unggul dengan produksi otomotifnya, Thailand bisa unggul dengan produksi agrarinya, dengan begitu kedua negara akan mendapat manfaat dari spesialisasi perdagangan. Ricardo sendiri pengungkapkan bahwa manfaat dari spesialisasi dan perdagangan akan bertambah, jika setiap negara mutlak mendapatkan keuntungan dalam memproduksi setiap komoditi produk yang diperdagangkannya.<sup>16</sup>

Selanjutnya formulasi yang dianggap paling berpengaruh dari konsep pemahaman liberalisme klasik dapat terlihat dalam justifikasi Spencer mengenai "*natural dominance*" dari *laissez faire* kapitalisme barat atas seluruh dunia. Spencer menganggap bahwa, ekonomi pasar bebas merupakan bentuk paling beradab dari persaingan manusia. Hal tersebut secara alami telah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk lebih terbuka dalam mengembangkan potensi ekonominya. Spencer menambahkan bentuk-bentuk gangguan internal seperti stagnasi sosial, korupsi, dan birokrasi yang tidak efisien merupakan sesuatu hal yang dapat menghambat kinerjasitas proses produksi kapitalis industri. Spencer mengecam doktrin sosialisme, bahkan serikat buruh yang mengusung dasar bentuk regulasi sosial seperti hukum keselamatan pabrik dikatakan sebagai "*over regulation*" yang bertentangan dengan kemajuan rasional dan kebebasan individu. Dalam karyanya *Social Statics*, ia meyakini kapitalisme *laissez faire* sebagai final sistem

<sup>16</sup> Theodore Chon, (2000), *Global Political Economy: Theory and Practice*, New York: Long-man, hlm. 200-203

yang mengarahkan semua masyarakat berkembang di bawah “gaya” kepemimpinan ekonomi dan budaya negara-negara Anglo-Amerika. Tingginya persaingan pasar bebas menjadi sumber alamiah dari kebebasan dan kemakmuran individu. Dengan demikian teori dan pandangan Spencer sangat berkontribusi terhadap doktrin hegemoni ekonomi pasar bebas dalam tatanan ekonomi neoliberal.

KONSEPSI neoliberal yang berkembang pada saat ini ternyata tidak dapat dipisahkan dari adanya gejolak politik yang terjadi di awal abad ke 19 hingga terjadinya Perang Dunia I yang merupakan tantangan terbesar dari ide-ide terkait ekonomi pasar bebas. Krisis ekonomi dan konflik selama bertahun-tahun menyebabkan ide-ide pasar bebas seolah kehilangan daya tariknya. Aroganitas nasionalisme yang terwujud dalam kebijakan proteksionisme perdagangan muncul sebagai reaksi ekstrim dari *laissez-faire* kapitalisme. Kondisi ini berlanjut hingga sampai pada pasca perang dunia II. Hal ini mendorong ekonom seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman untuk kembali memunculnya ide-ide ekonomi liberal klasik. Pada akhir tahun 1970 menemukan konteks ekonomi yang baik sebagai upaya untuk keluar dari inflasi, tingginya angka pengangguran, dan masalah struktural lainnya yang melanda negara-negara industri Barat melalui apa yang ia sebut sebagai “Second Coming Capitalism or Turbo Capitalism”.<sup>17</sup> Proses menuju pasar bebas mulai terjadi secara massif sejak tahun 1970-an yang pada dasarnya dikendalikan oleh doktrin neoliberal. Doktrin neoliberalisme mencakup keutamaan dalam pembangunan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pasar bebas tanpa hambatan dan restriksi, pemangkasan regulasi pemerintah, dan pembelaan atas model pembangunan sosial evolusioner yang berjangkar arus modernitas Barat yang dapat diterapkan ke seluruh dunia.

Para ekonom Anglo-Amerika tersebut menitikberatkan pada bentuk neoliberal dengan mengadopsi varian *laissez-faire* doktrin ekonomi klasik. Hal ini juga menjadi perhatian bagi kepemimpinan intelektual Keith Joseph dan Margaret Thatcher yang bertujuan untuk merevitalisasi kembali doktrin neoliberal. Pada akhir 1980-an, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Presiden AS Ronald Reagan berhasil mampu mengembalikan sikap kebijakan luar negeri yang pragmatis guna memperluas proyek neoliberal menjadi ideologi tunggal di pasar dunia. Kejayaan pasar global kembali direpresentasikan oleh ekonom Amerika pemenang Hadiah Nobel yaitu Joseph Stiglitz melalui apa yang disebut dengan *Roaring Nineties*. Menandakan bahwa penafsiran umum globalisasi jatuh pada proporsional elit kekuasaan global, yang terikat dengan prinsip-prinsip filosofis dan revolusi ekonomi “Thatcher-Reagan”. Keruntuhan Uni-Soviet dan

<sup>17</sup> Edward Luttwak, (1999), *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in The Global Economy*, New York: Harpercollin, dalam Review, Eric Brahm, (2002), “Globalization, Modernity, and Their Discontents”, CARTSS Series, hlm. 5

komunismenya di 1989-1991 terbukti menjadi fenomena besar yang sangat menentukan restorasi *market globalism*. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah adanya peran media, dalam hal ini, media merupakan aktor yang juga sangat berperan dalam mengilustrasikan masyarakat dunia akan pentingnya globalisasi. Contoh *Business Week* melansir pemberitaan yang mengandung pesan bahwa beberapa dekade ini para politisi dan pebisnis telah mendesak publik Amerika untuk menuju masa depan dunia yang lebih baik di bawah “payung” globalisasi.<sup>18</sup>

Hal ini juga disambut oleh hasil persentase yang didapat dari dua sensus nasional yang berbeda mengenai tanggapan masyarakat terhadap globalisasi, dan ideologi pasar bebas. Dari hasil pengamatan pertama 65% dari koresponden menganggap bahwa globalisasi memberikan dampak akomodatif untuk konsumen, pebisnis, dan investor. Namun di sisi lain, 70% koresponden mengatakan tentang kekhawatiran mereka bahwa globalisasi tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada hilangnya lahan pekerjaan.<sup>19</sup> Selanjutnya terdapat dua informasi penting berkaitan dengan dimensi penyebaran globalisasi. Pertama, para politisi yang didukung oleh pelaku bisnis, secara aktif terlibat dalam perumusan kebijakan dalam upaya untuk “menjual” ide pasar global kepada masyarakat dunia. Pembangunan ide globalisasi secara bertahap merupakan upaya yang sangat menentukan dalam mewujudkan suatu tatanan global yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas. Secara bersamaan, Visi-visi yang diusung dalam globalisasi dibuat untuk menanamkan opini publik, bahwasanya ide-ide perjuangan terus-menerus meyakinkan masyarakat menganai proses globalisasi. Pengambil keputusan neoliberal menjadi suatu desain menarik yang telah digagas sebagai wadah ideologis untuk agenda politik pasar yang menguntungkan. Mengingat bahwa pertukaran komoditas merupakan kegiatan inti dari pasar global maka, wacana globalisasi itu sendiri berubah menjadi komoditas yang sangat penting untuk menanamkan konsumsi publik.

Kedua, data polling yang disajikan dalam *Business Week* mengungkapkan adanya disonansi kognitif yang luar biasa antara orientasi normatif rakyat Amerika terhadap globalisasi yang diakibatkan adanya pengalaman pribadi mereka di dunia global. Sebagian besar koresponden tatap merasa khawatir bahwa globalisasi akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun menjadi sangat kontradiktif ketika banyaknya permintaan publik terkait globalisasi. Ideologi *pro market* yang terkandung dalam visi globalisasi berpengaruh besar terhadap pembentukan opini publik, hingga sampai pada kesimpulan bahwa publik Amerika mempercaya adanya keterbukaan dan perdagangan bebas yang baik bagi perekonomian. Dapat disimpulkan bahwa media

<sup>18</sup> Stegger, *Globalism*, hlm.13

<sup>19</sup> Ibid., hlm.14-15

sedemikian rupa menyajikan potret globalisasi untuk memajukan kepentingan material dan ideal kelompok-kelompok dalam kelompok-kelompok yang paling diuntungkan dari liberalisasi ekonomi, privatisasi BUMN, deregulasi peran pemerintah, pengembalian atas modal yang efisien, dan devolusi kekuasaan ke sektor swasta. Sama halnya ideologi pada umumnya, *market globalism* terus terlibat dalam tindakan penyederhanaan, distorsi, legitimasi, dan integrasi sebagai upaya untuk menumbuhkan keyakinan publik bahwa *market globalism* adalah hal yang mutlak bagi perkembangan kerja sama ekonomi di era kontemporer. Ketika sebuah negara menerima klaim *market globalism*, secara bersamaan negara tersebut menerima seperangkat aturan mengenai otoritas kerangka politik, ekonomi, dan intelektual yang komprehensif dari neoliberalisme.

Dengan demikian, jangkauan ideologis *market globalism* jauh melampaui makna sempit seputar penjelasan mengenai arti proses globalisasi. Pada akhir 1990-an, *market globalism* berhasil menyebar ke seluruh belahan dunia dengan menggunakan *hegemony power* dibawah control negara-negara barat melalui representasi ideologis, kooptasi dari elit lokal, pemaksaan politik, dan kemampuan ekonomi. Meskipun ideologi *market globalism* telah berhasil meleburkan dunia dalam suatu "wadah" ideologi pasar bebas dibawah ciata-cita neoliberal. Melalui klaim-klaim ini, kelompok neoliberal berupaya mengisi ideologi *market globalism* dengan nilai, kepercayaan, dan makna yang menopang perwujudan masyarakat global yang berdasar atas prinsip-prinsip pasar.

## Kesimpulan

Dari serangkaian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi tidaklah terbatas hanya pada peningkatan mobilitas manusia yang didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, atau hanya sebatas peningkatan berbagai hubungan kerja sama di segala bidang, seperti ekonomi, politik hingga budaya. Lebih dari itu, globalisasi telah mengahantarkan pada sebuah pemahaman ideologi yang disebut oleh Stegger sebagai globalisme atau seperangkat teoritis yang berwujud pada ideologi pasar neoliberal yang memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai dan makna tertentu di dalam proses globalisasi. Doktrin neoliberal yang telah melebur dalam globalisme menjadi sebuah ideologi pasar global atau *market globalism*. *Market globalism* secara nyata telah menjadi "fitur" utama tatanan ekonomi neoliberal yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi secara alamiah akan terwujud dengan adanya perdagangan bebas, deregulasi pemerintah dalam urusan pasar, peningkatan investasi, serta peluang bagi masuknya perusahaan multinasional ke dalam suatu negara. Selanjutnya keterkaitan antara globalisasi dan tatanan ekonomi neoliberal dapat dilihat dari terbentuknya institusi ekonomi global yang secara periodesasinya diawali ditandai tebentuknya konferensi

*Bretton Woods* yang melahirkan tiga institusi ekonomi global yakni, *IMF*, *World bank*, *GATT* atau yang saat ini dikenal dengan *WTO*. Dengan ini, tatanan ekonomi neoliberal telah meneguhkan superioritas ekonomi dan politik terhadap negara-negara di dunia ke dalam institusi-institusi global yang menjadi “wadah” bagi percaturan kebijakan ekonomi pasar bebas dunia di bawah pengaruh globalisasi dan ideologi pasar global *market globalisme*.

### **Daftar Pustaka**

- Brahm Eric. 2002. *Globalization, Modernity, and Their Discontents*. CARTSS Series.
- Chon. Theodore. 2000. *Global Political Economy: Theory and Practice*. New York: Longman.
- Fukuyama Francis. 1999. *Second Thoughts: The Last Men in a Bottle*. National affairs, no. 56.
- Luttwak Edward. 1999. *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy*. New York: Harpercollin.
- Stegger B. Manfred. 2003. *Globalization: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- , 2005. *from Market Globalism to Imperial Globalism: Ideology and American Power after 9/11*. Royal Melbourne Institute of Technology: Routledge, Vol. 2, No. 1.
- , 2005. *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, (trj), Adirio A. Salamun. Yogyakarta: Lafadi Pustaka.
- , 2009. *Globalism: The Great Ideological Struggle of the Twenty-First Century*. USA: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Syeirazi M. Kholid. 2003. *Dilema Praktisi Globalisme Neoliberal*. Yogyakarta: UGM, Vol 7, Nomor 1.
- Taylor H Goerge H. 1986. *Lectures on Ideology and Utopia*. New York: Colombia University Press.
- Wolf Martin. 2004. *Why Globalization Works*. United Kingdom: Bryan Literary Agency.

# ANALISIS KONSEPTUAL DAMPAK PERUSAHAAN SWASTA MILITER DAN KEAMANAN (*PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANY/PMSC*) TERHADAP PERANG GENERASI KEEMPAT (*FOURTH GENERATION WARFARE/4GW*)

Tulus Yuniasih<sup>1</sup>, Budi Hartono<sup>2</sup>  
tulusyuniasih@live.com, hartono1989@yahoo.com

## ***Abstract***

*This writing conceptually discusses the impact of the existence of private military and security company (PMSC) in fourth generation warfare (4GW). This conceptual analysis is conducted through the elaboration on indicators of both 4GW and PMSC, and the relevancy of both in terms of cause-effect relation of the latter to the previous one and vice versa. Using the indicators of both, the analysis then involves the 'deterrence' concept to help understanding the impact of PMSC towards 4GW. The results show that PMSC conceptually gives significant impacts to 4GW. The existence of PMSC in the 4GW zone results on the dynamics in achieving the goals of actors in 4GW-which is to reduce or even abolish the will of opponents to start the offense-and in assymetrical aspect of 4GW.*

**Keywords:** *private military and security company (PMSC), fourth generation warfare (4GW), deterrence, asymmetric war, conceptual analysis*

## **Dinamika Perang Kontemporer**

Dalam ilmu perang kontemporer, peperangan generasi keempat atau *fourth generation warfare* (yang untuk selanjutnya disingkat menjadi 4GW) menjadi jenis peperangan yang penting untuk diperhatikan perkembangannya. Jenis peperangan yang asimetris ini sebenarnya bukan hal baru dalam politik domestik dan internasional. Perang asimetris merupakan perang yang banyak berlaku sebelum Perjanjian Westphalia. Meskipun demikian, perang asimetris ini menjadi hal yang berada di luar logika sektor militer. Selama ratusan tahun, sebagian besarnya telah mengadopsi dan menjalankan doktrin perang simetris dalam bentuk generasi kedua (2GW) dan generasi ketiga (3GW).<sup>3</sup>

Pada saat yang sama, konteks medan perang telah diwarnai dengan berbagai faktor yang bersifat metodologis. 'Fog of war' semakin kental. Selain berkembangnya metode perang gerilya, perang turut melibatkan aktor non-negara termasuk jaringan teroris yang mengandalkan pergerakan bersel-sel serta dukungan warga sipil. Kemutakhiran dalam inovasi teknologi informasi dan komunikasi serta faktor globalisasi juga membawa perang dari dimensi kontak fisik kepada kontak non-fisik, tidak hanya

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

<sup>2</sup> Alumnus Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Kandidat Magister Sains Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat.

<sup>3</sup> William S. Lind, (15 Januari 2004), *Understanding Fourth Generation War*, <http://www.antiwar.com/lind/?articleid=1702> diakses pada 22 Juli 2013.

dalam lingkup domestik tetapi juga melibatkan aktor-aktor transnasional dan global. Negara mau tidak mau berhadapan pada Medan yang bersifat non-konvensional.

Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam mengalahkan pihak lawan turut berubah. Keunggulan taktis tidak cukup untuk menghadapi medan perang non-konvensional. Serangan yang dijalankan kemudian lebih bersifat strategis dengan cara mengurangi atau menghilangkan keinginan pihak lawan untuk memulai serangan<sup>4</sup>, baik dengan menggunakan senjata konvensional maupun non-konvensional. Sebagai contoh adalah pemberdayaan opini publik masyarakat Amerika Serikat (AS) pada Perang Vietnam yang tidak popular, dan pembukaan informasi oleh pemerintah Iraq kepada publik mengenai isi perjanjian bilateral keamanannya dengan AS pada tahun 2008 (sebelum diselenggarakannya Pemilu Presiden di AS).<sup>5</sup> Sifat peperangan yang demikian sebenarnya memberikan banyak keuntungan. 4GW tidak hanya mengurangi biaya peperangan secara langsung, tetapi juga mengurangi korban dan biaya politik peperangan yang muncul akibat pelanggaran kemanusiaan.

Sifat peperangan yang asimetris juga menandakan bahwa 4GW tidak bersifat eksklusif yang hanya dapat dimulai oleh pihak negara. Aktor-aktor di luar negara, seperti teroris bahkan media Massa, juga dapat menciptakan peperangan jenis ini. Yang menarik adalah ketika pada gua bekas tempat persembunyian kelompok Al-Qaeda ditemukan artikel mengenai 4GW.<sup>6</sup> Perubahan pola konflik dan peperangan kontemporer juga diwarnai dengan kehadiran perusahaan swasta di bidang militer atau keamanan (*private military and security company* yang selanjutnya disingkat sebagai PMSC). PMSC hadir di dalam wilayah konflik atau perang sebagai pihak yang disewa untuk mengamankan baik orang, lokasi maupun logistik, oleh pihak individu, perusahaan atau negara. PMSC juga dapat disewa untuk pelatihan militer serta untuk menjalankan fungsi intelijen.<sup>7</sup>

Signifikansi kehadiran PMSC dalam wilayah konflik atau perang dapat dilihat dari beberapa sisi. Dari segi kuantitas, jumlah personel PMSC yang hadir dalam wilayah-wilayah konflik atau perang beberapa kali terbukti lebih banyak dibandingkan jumlah

<sup>4</sup> William S. Lind, et. al., (1989) "The Changing Face of War: Into the Fourth-Generation", *Marine Corps Gazette*, Oktober 1989 dikutip dalam Simon Murden, (2007), "Staying the Course in 'Fourth-Generation Warfare': Persuasion and Perseverance in the Era of the Asymmetric Bargaining War", *Contemporary Security Policy*, Vol. 28, No.1 (April 2007), hal. 197-198.

<sup>5</sup> Arms Control Center, (11 Juni 2008), "Beyond the Headlines: The U.S.-Iraq Security Agreement, Permanent Bases, and Fourth-Generation Warfare", [http://armscontrolcenter.org/issues/iraq/articles/permanent\\_bases\\_4gw/](http://armscontrolcenter.org/issues/iraq/articles/permanent_bases_4gw/) diakses pada 22 Juli 2013.

<sup>6</sup> William S. Lind, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> Åse Gilje Østensen, (2011), "UN Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies", *SSR Paper 3*, The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, <http://www.dcaf.ch/Publications/UN-Use-of-Private-Military-and-Security-Companies-Practices-and-Policies> diakses pada 15 Juli 2013; M. Mancini, et. al., (2011), "Old Concepts and New Challenges," dalam Francesco Francioni and Natalino Ronzitti (ed.), (2011), *War by Contract*, Oxford University Press dikutip dalam Jose L. Gómez del Prado, (11 Agustus 2012), "The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare", <http://www.globalresearch.ca/the-role-of-private-military-and-security-companies-in-modern-warfare/32307> diakses pada 15 Juli 2013.

personel militer atau tentara negara.<sup>8</sup> Dari segi kualitas, dengan biaya sewa yang lebih kecil dibandingkan biaya pengiriman tentara oleh negara,<sup>9</sup> kemampuan personel PMSC dapat disamakan dengan tentara negara. Hal ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang personel sebagai bekas atau pensiunan tentara bahkan pasukan khusus negara.<sup>10</sup>

Perhatian kepada kehadiran aktor nonnegara yang bahkan sebetulnya tidak boleh terlibat langsung dalam konflik atau peperangan ini semakin besar dengan berlakunya pelanggaran kemanusiaan seperti penembakan membabi buta (*indiscriminate shooting*) oleh Blackwater (yang kemudian berubah nama menjadi Xe) di Baghdad pada tahun 2007. Pelanggaran kemanusiaan tersebut mendorong berkembangnya literatur terkait penguatan hukum internasional kemanusiaan (*International Humanitarian Law/IHL*) yang mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam konflik termasuk PMSC.

Di sisi lain, tim penulis memandang bahwa signifikansi kehadiran PMSC juga perlu diperhatikan tidak hanya dalam konflik bersenjata secara umum serta ajeg kepada kaitannya terhadap pelanggaran kemanusiaan dan penegakan hukum perang, tetapi juga dalam 4GW. Meskipun 2GW dan 3GW masih relevan, pada saat yang sama, aktor-aktor yang berkonflik telah mengembangkan dan mengamalkan 4GW sebagai pendukung 2GW dan 3GW. Maka, tulisan ini kemudian bertujuan untuk menganalisa 4GW dan PMSC secara konseptual. Kemudian, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis secara konseptual sejauh mana kehadiran PMSC dapat memberikan dampak kepada 4GW. Pembahasan secara konseptual ini penting dalam rangka memberikan pemahaman mengenai konsep 4GW itu sendiri dan kemudian PMSC, sebelum menggunakan ketiga pembahasan tersebut dalam tataran praktis.

### **Tren Perang Generasi Keempat (*Fourth Generation Warfare/4GW*)**

Seperti telah dijelaskan di atas, perang generasi keempat atau 4GW dapat didefinisikan sebagai jenis peperangan yang bersifat asimetrik. Dalam perang asimetrik, tidak terdapat keseimbangan antara sumber dan filosofi pertempuran. Dalam perang jenis ini, yang berlaku tidak hanya menyerang dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan militer, tetapi juga secara langsung menyerang dan menggunakan budaya,

<sup>8</sup> Moshe Schwartz dan Joyprada Swain, (13 Mei 2013), "Department of Defense Contractors in Afghanistan and Iraq: Background and Analysis", CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress R40764, Congressional Research Service; David Isenberg, "Contractors in War Zones: Not Exactly "Contracting", " TIME, (9 Oktober 2012), <http://www.cato.org/publications/commentary/contractors-war-zones-not-exactly-contracting> diakses pada 15 Juli 2013; T. Christian Miller, "Contractors outnumber troops in Iraq," Los Angeles Times, (4 Juli 2007) dikutip dalam David Isenberg, (2009), *Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq*, Westport: Praeger Security International, hal. 9.

<sup>9</sup> Carlos Ortiz, (2010), *Private Armed Forces and Global Security: A Guide to The Issues*, California: Praeger, hal. 118-126.

<sup>10</sup> Christopher Kinsey, (2006), *Corporate Soldiers and International Security: The Rise of Private Military Companies*, Oxon: Routledge, hal. 16-24.

politik atau masyarakat dalam rangka memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan pada jalur yang kedua dilakukan dengan cara menurunkan keinginan pihak lawan untuk berperang.

Sifat asimetrik dalam perang sendiri sebenarnya masih mengalami perdebatan dalam pendefinisian. Perang asimetrik adalah situasi konflik yang salah satu aktor yang lebih lemah menggunakan serangan yang bersifat idiosinkretik yaitu taktik non-tradisional atau tidak lazim yang dilakukan terhadap pihak musuh yang lebih kuat.<sup>11</sup> Oleh salah satu pemikir perang asimetrik, Kenneth F. Mckenzie Jr, perang asimetrik didefinisikan sebagai pemanfaatan kekuatan taktis atau operasional aktor yang lemah untuk menyerang kelemahan dari lawan yang lebih unggul untuk memberikan efek proporsional dengan tujuan menghancurkan lawan dalam rangka mencapai tujuan strategis dari aktor asimetrik.<sup>12</sup> Serupa dengan perang asimetrik, porsi penggunaan kekuatan militer dalam 4GW adalah lebih kecil dari generasi sebelumnya. 4GW lebih banyak menggunakan bidang politik, diplomasi, dan ekonomi.

Istilah 4GW sendiri dikembangkan pertama kali oleh William S. Lind. Lind menyatakan bahwa 4GW merupakan perang yang memiliki karakteristik bahwa negara kehilangan monopoli dalam sebuah pertempuran. Perang ini lebih radikal dibandingkan yang lainnya sejak perang perdamaian Westphalia. Kemudian, pada masa kini, hampir seluruh negara di dunia memerangi aktor nonnegara.<sup>13</sup> Donald Rumsfeld juga menyatakan bahwa kekuatan militer dalam 4GW hanya sedikit digunakan dalam menyerang musuh dan peperangan ini difokuskan untuk melawan jaringan luas dari aktor nonnegara.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa 4GW relevan dalam hal menganalisa manajemen konflik yang melibatkan aktor-aktor non-negara. Era globalisasi yang dicirikan dengan kemudahan atau pengembangan teknologi secara signifikan dalam hal telekomunikasi dan transportasi menjadi akselerator pengembangan jaringan di antara aktor-aktor dalam konflik. Perluasan jaringan yang didukung oleh teknologi nonmiliter diikuti pula dengan pengembangan ideologi dan budaya. Oleh karena itu, 4GW dinilai dapat mewakili konteks konflik yang berkembang dalam dunia kontemporer.

Dari segi aktor, sumber ancaman dalam pandangan 4GW didominasi oleh aktor nonnegara yang ingin menunjukkan eksistensinya. Martin Van Creveld memperkuat hal di

---

<sup>11</sup> Motgomery C. Meigs, (2003), "Unorthodox Thoughts about Asymmetric Warfare," *Parameters* (Summer 2003), hal. 4 diakses dari <http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/03summer/meigs.pdf> diakses kembali pada 9 January 2015.

<sup>12</sup> Kenneth F. Mckenzie, Jr, (2001), *The Rise of Asymmetric Threats: Priorities for Defense Planning*, Washington, D.C.: National Defense University Press, hal 76.

<sup>13</sup> William S. Lind, (2004), "Understanding Fourth Generation", *Military Review*, hal 13.

<sup>14</sup> Sean Cannon, *The War against Terrorism: A New Generation of Warfare*, hal 45. [http://www.byui.edu/perspective/v2n1pdf/v2n1\\_cannon.pdf](http://www.byui.edu/perspective/v2n1pdf/v2n1_cannon.pdf)

atas dalam bukunya yang berjudul “*The Transformation of War*” bahwa dia menyatakan bahwa “*future war will increasingly be non-trinitarian and waged outside the nation-state framework*”.<sup>15</sup> Dapat dikatakan bahwa aktor dalam perang tidak lagi didominasi oleh negara, melainkan terdapat aktor-aktor nonnegara. Kemudian, Antulio J. Echevarria dalam jurnalnya yang berjudul *Fourth-Generation War and Other Myths* juga menjelaskan bahwa dalam perang generasi keempat, aktor nonnegara yang mencakup teroris, pemberontak, dan tentara bayaran pada perkembangannya mempunyai kemampuan setara dengan pasukan nasional.<sup>16</sup> Artinya, kehadiran aktor nonnegara pada dasarnya memiliki signifikansi yang kurang lebih sama dengan aktor negara dalam perang.

Dalam 4GW, perbedaan antara “sipil” dan “militer” juga seperti menghilang. Musuh (teroris atau pemberontak) mampu menyusup ke dalam masyarakat sipil lalu mencoba meruntuhkan/mengalahkan musuh dari lingkungan internalnya.<sup>17</sup> Target operasi di dalam lingkungan *internal* musuh mencakup hal-hal seperti mendapatkan dukungan dari masyarakat musuh dan mengetahui kebudayaan dari musuh. Hal ini membuat tidak adanya perbedaan titik medan perang dan perbedaan antara masyarakat sipil dan musuh.<sup>18</sup> Sebab, serangan musuh bisa saja terjadi di seluruh wilayah suatu negara atau bahkan di dunia maya. Dengan demikian pihak musuh akan leluasa menyerang tanpa takut serangannya diketahui oleh aktor lain khususnya aktor negara, baik menggunakan serangan secara konvensional maupun non-konvensional.

Secara spesifik, tindakan konvensional meliputi penggunaan senjata, granat, tank, pesawat tempur, dll. Sedangkan tindakan non-konvensional mencakup eksploitasi ketegangan *internal* suatu negara atau wilayah dengan menyerang ideologi, sosial, agama, ekonomi, mendapatkan dukungan opini publik dari masyarakat musuh, dan mengidentifikasi strategi musuh.<sup>19</sup> Lind menyatakan bahwa mengetahui informasi musuh merupakan hal yang mutlak dalam metode perang ini.<sup>20</sup> Dengan mengetahui informasi musuh maka aktor akan mengetahui kebudayaan musuh. Jika mengetahui kebudayaan musuh maka aktor tersebut memiliki modal sebagai input atas strategi dalam mendapatkan simpati bahkan dukungan masyarakat, yang kemudian akan memberikan kemenangan dalam perang. Tindakan non-konvensional tersebut

---

<sup>15</sup> Martin van Creveld, (1991), *The Transformation of War*, New York: Free Press.

<sup>16</sup> Antulio J. Echevarria II, (2005), *Fourth-Generation War and Other Myths*, Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute, hal 5.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> William S. Lind, Col Keith Nightengale, Capt John F. Schmitt, Col Joseph W. Sutton, and LtCol Gary I. Wilson, (1989), *The Changing Face of War: Into the Fourth Generation*, Marine Corps Gazette. Hal 23.

<sup>19</sup> Roger Trinquier, (1985), *Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency*, London: Pall Mall Press Ltd., hal. 6.

<sup>20</sup> William S. Lind, Col Keith Nightengale, Capt John F. Schmitt, Col Joseph W. Sutton, and LtCol Gary I. Wilson, 1989, “*The Changing Face of War: Into the Fourth Generation*,” *Marine Corps Gazette*, hal 23.

biasanya diterapkan ketika tindakan konvensional dianggap tidak berjalan secara optimal dalam menghadapi ancaman yang bersifat non-konvensional.

Masih mengenai metode, perkembangan teknologi juga diduga menjadi pemicu penggerak 4GW. Perkembangan teknologi militer telah menciptakan berbagai macam teknologi. Sebagai contoh teknologi robot, pesawat dengan pengendali jarak jauh (*drones*), dan teknologi komunikasi yang tidak rentan dengan penyadapan. Salah satu teknologi yang paling strategis dalam 4GW adalah taktik penggunaan media. Dengan media, berita-berita mengenai perang dapat diumumkan dan kebenarannya pun dapat dimanipulasi sehingga membentuk opini publik yang dapat menjadi serangan psikologis bagi aktor yang berperang. Operasi penyerangan yang dapat melemahkan kondisi psikologis lawan adalah senjata andalan dari 4GW. Aktor yang dicontohkan dalam 4GW oleh Lind adalah terorisme. Teroris menggunakan keterbukaan dan kebebasan dalam masyarakat. Mereka menggunakan kebebasan berdemokrasi untuk melakukan penekanan dan melindungi diri mereka. Jika pemerintah menembak mereka, para teroris dapat membuat opini publik bahwa mereka yang menjadi korban. Di samping itu, kegiatan teroris pun sulit dideteksi, karena mereka dapat membaur dengan masyarakat dan mengandalkan jaringan mereka dalam mengirimkan pesan untuk melakukan suatu serangan.

### **Perusahaan Swasta Militer dan Keamanan (*Private Military and Security Company/PMSC*) sebagai Aktor dalam Perang Kontemporer**

Seperti dicantumkan dalam bagian pendahuluan, terdapat sebuah aktor di luar negara selain yang telah dicantumkan di atas yang terdapat dalam medan 4GW, yaitu perusahaan swasta militer dan keamanan atau PMSC. PMSC pada dasarnya merupakan istilah gabungan dari perusahaan swasta militer (PMC) dan perusahaan swasta keamanan (PSC/PSF) dalam rangka memudahkan penyebutan tanpa bermaksud untuk merujuk pada perusahaan yang menggabungkan jasa militer dan keamanan.

P.W. Singer dalam jurnalnya yang berjudul *Corporate Warrior: The Rise and Ramifications of the Privated Military Industry* mendefinisikan perusahaan militer swasta atau PMC sebagai organisasi berorientasi profit yang berbasis penyediaan jasa profesional yang berhubungan erat dengan peperangan.<sup>21</sup> Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam penyediaan keterampilan militer yang meliputi operasi taktik tempur, perencanaan strategis, pengumpulan data intelijen dan analisis, dukungan operasional, pelatihan pasukan, dan bantuan teknis militer. Perusahaan-perusahaan ini merekrut anggota dari para mantan tentara nasional yang biasanya adalah mantan

<sup>21</sup> P.W. Singer, (2001), *Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privated Military Industry*, International Security, hal 1.

pasukan khusus karena dianggap memiliki kemampuan di atas tentara-tentara *regular*. Di antaranya adalah mantan Delta Force dan NAVY SEAL dari AS, Gurkha didikan Inggris dari Nepal, pasukan elit SAS (*special air service*) dari Kerajaan Inggris, sejumlah mantan komandan polisi Afrika Selatan, serta serdadu Kolombia dan El Salvador yang dilatih AS.<sup>22</sup>

Sebelum masuk kepada pembahasan mendalam mengenai ruang lingkup dari PMSC, penting untuk menempatkan sebuah pembedaan terlebih dahulu antara PMC dan tentara bayaran (*mercenaries*). Dari segi motivasi, Singer menyatakan terdapat perbedaan antara PMC dan tentara bayaran. Motivasi dari PMC adalah pencarian profit untuk perusahaan, sedangkan tentara bayaran termotivasi oleh keuntungan pribadi. Lalu pada prinsipnya PMC bekerja tidak hanya pada satu klien, tetapi banyak klien lainnya yang bahkan tersebar di seluruh dunia, dan pilihan layanan yang diberikan oleh PMC pun bermacam-macam, tidak hanya menyewakan “*bodyguard*”. Berbeda dengan tentara bayaran yang hanya terfokus pada satu klien dan hanya menyediakan satu layanan saja yaitu fokus terhadap pertempuran.

Dominasi tentara bayaran dengan upah tinggi dalam perang dan kesejahteraan bangsa Eropa tahun 1700-an<sup>23</sup> kemudian dapat ditandingi oleh patriotisme dan Konvensi Jenewa pada abad 20 yang merobohkan motif keuntungan atau setidaknya idealisasi motif berperang. AS dan Uni Soviet menyerahkan miliaran dolar pada negara-negara klien untuk mendukung militer mereka. Logikanya adalah mengapa menggaji pasukan bayaran jika kedua negara adikuasa akan mendanai pasukan negara Anda sendiri.<sup>24</sup> Dinamika pada akhir Perang Dingin dengan berkembangnya isu non-tradisional dengan aktor-aktor baru seperti kaum revolusionis, pemberontak, dan teroris, kelahiran negara-negara baru yang rentan secara politik (seperti keberhasilan *Executive Outcome* di Afrika yang tidak jarang diwarnai dengan konflik memperebutkan sumber daya semisal berlian atau minyak dalam mengalahkan pemberontak UNITA yang berpengalaman) dan hadirnya perusahaan-perusahaan asing (seperti perusahaan-perusahaan AS di Irak)<sup>25</sup> kemudian meningkatkan kebutuhan atas keamanan untuk dapatkan dari bantuan militer asing. Singer berargumen bahwa bantuan-bantuan tersebut bukan berasal dari negara atau bahkan organisasi internasional tetapi berasal dari pasar global. Pada dasarnya,

---

<sup>22</sup> T. Christian Miller, (2006), *Blood Money*, Jakarta: Ufuk Press, hal 227.

<sup>23</sup> P. W. Singer, (2003), *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, Ithaca: Cornell University Press, hal. 21 – 28 dikutip dalam buku T. Christian Miller, (2006), *Ibid.* hal 229.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.* hal 227.

tugas-tugas militer telah diserahkan kepada masyarakat sipil tanpa struktur, peraturan, dan perencanaan apapun.<sup>26</sup>

Meskipun PMC tergolong organisasi yang profesional dan memiliki banyak klien di seluruh dunia, namun hingga saat ini belum ada hukum jelas yang mengaturnya. PMC tidak memiliki pedoman yang jelas, karena negara asal mereka selalu menyangkal bertanggung jawab atas tindakan-tindakan PMC. Dalam bukunya yang berjudul *Restrict Private Military Security Contractors*, Antony Severin menyatakan bahwa,

*“PMC cannot be considered soldiers either, since they are not part of the army or in the chain of command, and often belong to a large number of different nationalities. Neither civilians nor combatants, these ‘private soldiers’ are in fact ‘unlawful combatants’. Paramilitaries and terrorist could claim the same legitimacy as these private soldiers”*<sup>27</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi PMC berada pada titik abu-abu yang membuat tidak adanya pedoman yang jelas dalam mengaturnya. Meskipun kerap melakukan pelanggaran namun PMC menghindari pemeriksaan lantaran mereka bekerja di wilayah abu-abu. PMC berpendapat seharusnya mereka diadili di negara mereka sendiri (seperti yang berlaku bagi PMC asal AS).<sup>28</sup> Hal itu tentunya memberikan kekebalan kepada PMC dari pengadilan lokal, tapi tidak mewajibkan negara asal atau negara mana pun memproses tuntutan. Ini berarti warga sipil lokal tidak memiliki solusi, seandainya harta mereka rusak atau mereka menjadi korban salah tembak. PMC dapat hanya memberikan kompensasi yang sifatnya informal. Pada perkembangannya, tindakan-tindakan PMC sebagai badan swasta komersil diatur di bawah regulasi militer negara penyewa (sebagai contoh adalah jika PMC tersebut milik AS maka dibatasi oleh regulasi militer AS), kontrak, hukum lokal tempat operasi berlangsung, dan hukum internasional untuk hanya terlibat dalam operasi membela diri.<sup>29</sup> Intinya adalah mereka boleh merespon serangan, bukan memulainya. Namun, persoalan terbesar menyangkut PMC adalah rendahnya akuntabilitas. Mereka hanya mematuhi hukum mereka sendiri yaitu berhasilnya misi mereka.<sup>30</sup>

Bagaimanapun, seperti halnya disampaikan dalam pendahuluan dan penjelasan sebelumnya, sebagian pakar internasional mulai memandang PMC sebagai solusi dalam perang kecil dan kejam yang mendominasi periode pasca-Perang Dingin. Komunitas internasional enggan menggerakkan pasukan dalam operasi menjaga perdamaian,

<sup>26</sup> Theory Talk, (2009), Peter W. Singer on Child Soldiers, Private Soldiers and Robot Soldiers, diakses dari <http://www.theory-talks.org/2009/04/theory-talk-29.html> pada 7 Januari 2015.

<sup>27</sup> Anthony Severin, (2012), *Restrict Private Military Security Contractors*, COG, hal 3.

<sup>28</sup> T. Christian Miller, (2006), *Op. Cit.*, hal 237.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 222.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 235.

sementara pemerintah lokal terlalu lemah untuk mengerahkan operasi militernya sendiri. Dengan beberapa kendala tersebut maka PMC mengisi kekosongan dari celah ini.

PMC berfokus kepada keuntungan relatif dalam penyediaan layanan militer. Sebagai unit bisnis, mereka terikat oleh pengaturan keuangan yang kompleks oleh perusahaan lain, baik di dalam dan di luar industri mereka sendiri,<sup>31</sup> mengingat PMC adalah bisnis yang didorong oleh keuntungan. Dalam sistemnya, PMC membentuk hierarki perusahaan secara permanen. Sebagai hasilnya, mereka dapat memanfaatkan pembiayaan korporasi yang kompleks melalui penjualan saham antar perusahaan agar dapat terlibat dalam kesepakatan dan kontrak yang lebih luas.<sup>32</sup>

Aktor yang biasanya menggunakan jasa PMC mulai dari individu, korporasi, negara, dan organisasi internasional yang notabene lebih mengandalkan pasar swasta ketimbang lembaga publik. Aktor-aktor tersebut memiliki permasalahan keamanan yang berbeda-beda, misalkan negara yang pemerintahannya dianggap gagal, untuk mencegah jatuhnya pemerintahan yang dilakukan oleh pemberontak, maka untuk membantu pasukan militernya, pihak pemerintah akan mencari bantuan keamanan eksternal. Pasukan penjaga perdamaian sebagai sebuah organisasi kemanusiaan membutuhkan jasa keamanan untuk melindungi para karyawannya dan logistik kemanusiaan di dalam zona konflik. Perusahaan multinasional membutuhkan jasa keamanan untuk menjaga fasilitasnya dari serangan pemberontak. Dari beberapa contoh tersebut, ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan keamanan yang beragam, maka mereka akan mencari dukungan militer dari luar negara. Biasanya, mereka memilih PMC untuk menjawab permasalahan keamanan tersebut.

### **Analisis Konseptual atas Dampak PMSC terhadap 4GW**

Dalam menganalisis kehadiran PMSC dalam 4GW, terdapat satu literatur yang telah mencoba menjelaskan hal tersebut. Col. T.X. Hammes, menyatakan bahwa PMC bukan merupakan aktor bagi satu generasi perang saja.<sup>33</sup> Dalam 4GW, kehadiran PMC justru memberikan kesempatan bagi negara-negara lemah. Sisi bisnis dalam PMC membuat perhatian pihak lawan teralihkan. Perang terbuka secara fisik militeristik kemudian menurun karena pihak lawan menganggap bahwa ketika PMC hadir, maka yang berlaku adalah sebuah kegiatan bisnis. Hal ini berpotensi mengalihkan penggunaan kekuatan militer oleh pihak lawan. Dengan demikian, pemberdayaan PMC mampu mencapai tujuan aktor dalam 4GW dengan melemahkan keinginan lawan untuk menggunakan kekuatan

<sup>31</sup> P. W. Singer, (2003), *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, Ithaca: Cornell University Press, hal 7.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Col. T.X. Hammes, (2007), "Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerged", *Military Review* (May-June 2007), diakses dari pada 22 Juli 2013.

militernya dalam perang. Artinya, 4GW semakin kuat dengan adanya kehadiran PMSC di dalamnya. Meskipun demikian, tim penulis memandang penting untuk melihat hubungan antara keduanya secara lebih detil dan rinci.

Berdasarkan pemaparan mengenai 4GW dan PMSC dalam bagian-bagian sebelumnya, terdapat beberapa indikator dalam 4GW yang menjadi unit analisis atau fokus yang terkena dampak kehadiran PMSC. Seperti disampaikan oleh Col. T.X. Hammes, indikator yang utama di antaranya tentu saja adalah tujuan strategis dari aktor dalam 4GW itu sendiri. Maka, menggunakan metode sebab-akibat, tim penulis menganalisis kemampuan PMSC secara teoritis (menggunakan indikator-indikator dalam PMSC) dalam mempengaruhi indikator-indikator dalam 4GW. Adapun dua indikator 4GW yang didapati berpotensi terkena dampak oleh kehadiran PMSC adalah indikator pencapaian tujuan 4GW dan indikator 4GW sebagai perang asimetris. Maka, penjelasan di bawah akan memberikan gambaran bagaimana kehadiran PMSC dapat ikut melemahkan psikologis lawan, atau justru menguatkan psikologis lawan dalam perang. Kemudian, adalah bagaimana kehadiran PMSC dapat menguatkan atau justru melemahkan karakter atau sisi asimetris dalam perang. Pada kedua indikator 4GW di atas, penjelasan tentu saja akan melibatkan indikator 4GW yang lain seperti penggunaan metode non-konvensional.

Dampak yang pertama berlaku ketika PMSC memiliki indikator dimana didukung oleh personil-personil yang memiliki kualitas secara militer dan interpersonal. Pemilikan kualitas kekuatan militer menjadi sebuah daya tangkal bagi sebuah aktor konflik, sehingga pihak lawan tidak akan memiliki keinginan untuk berperang melawan aktor konflik yang penyewa PMSC. Pemilikan kualitas tersebut turut didukung oleh adanya kenyataan bahwa PMSC merupakan perusahaan bidang militer dan keamanan yang sebagian besar personilnya merupakan mantan pasukan khusus negara-negara besar. Sebagai sebuah perusahaan, secara logis akan melakukan upaya untuk bertahan dan meningkatkan keuntungan. Peningkatan keuntungan dapat melalui peningkatan daya jual jasa oleh PMSC. Daya jual tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan daya saingnya dalam artian peningkatan ketersediaan dan kualitas baik personil maupun logistik.

Signifikansi PMSC sebagai daya tangkal dalam 4GW juga memberikan dinamika pada indikator penting 4GW selanjutnya, yaitu karakter perang yang asimetris. Daya tangkal juga berlaku bagi pemberdayaan PMSC oleh aktor konflik asimetris yang lebih lemah. Kontribusi PMSC ini bagi aktor tersebut adalah dengan memberikan kesempatan bagi pemilikan kekuatan militer yang lebih besar daripada sebelumnya. Secara nyata, perimbangan kekuatan oleh PMSC akan lebih didominasi dalam bentuk konvensional.

Penjelasan di atas mengingatkan tim penulis kepada konsep *deterrence*, baik yang bersifat segera (*immediate*) maupun umum atau jangka panjang (*general*). Konsep ini tampak sesuai dalam hal menurunkan keinginan pihak musuh untuk menyerang secara militer. Namun, dalam tulisan ini, tim penulis tidak mendiskusikan *deterrence* dalam konteks pemberdayaan nuklir, seperti halnya pada masa Perang Dingin atau bahkan setelahnya, yang dijelaskan oleh Kenneth Waltz dan tokoh akademik lainnya. Adapun konsep *deterrence* dalam tulisan ini digunakan untuk menggambarkan upaya protagonis baik pihak yang dominan (*defender*) ataupun yang lemah (*challenger*) untuk mendeter pihak lawan dengan cara meningkatkan kemampuan militernya, secara kualitas bukan kuantitas.

*Deterrence* didefinisikan sebagai strategi yang bertujuan mencegah (*prevent*) perilaku khusus dengan cara meyakinkan suatu aktor untuk merenungkan bahwa biaya (*cost*) [untuk melakukan perang atau tindakan ofensif lainnya] akan lebih besar daripada pendapatan (*gain*).<sup>34</sup> *Deterrence* di sini juga tidak membincangkan konflik antarnegara, namun *deterrence* sebagai konsep yang universal. Seperti dinyatakan oleh Zagare dan Kilgour, bahwa prinsip dinamika *deterrence* adalah sama, baik yang sifatnya interpersonal, antarkelompok maupun antarnegara.<sup>35</sup>

Kemudian, perimbangan kekuatan militer merupakan inti dari *deterrence* itu sendiri baik secara teoritis maupun praktis.<sup>36</sup> Bahkan, dalam Teori *Perfect Deterrence*, pengerahan kapabilitas secara minimum, bukan maksimum dan yang bersifat *overkill* - dan kredibilitasnya merupakan syarat penting dalam menukseskan *deterrence*.<sup>37</sup> Dari penjelasan di atas, terdapat dua potensi peningkatan *deterrence*. Yang pertama oleh pihak dominan, dan yang kedua oleh pihak yang lemah.

Robert Jervis menyatakan bahwa strategi *deterrence* dilakukan oleh pihak "protagonis" atau *defender* dari *status quo*.<sup>38</sup> Strategi *deterrence* juga dapat dilakukan oleh pihak yang lebih lemah dalam menghadapi pihak yang dominan atau lebih kuat. Meskipun penjelasan konsep ini oleh Kenneth Waltz erat kaitannya dengan penggunaan kekuatan nuklir, namun, beliau menjelaskan bahwa penggunaan nuklir tersebut adalah

---

<sup>34</sup> Richard Ned Lebow, (2001), "Deterrence and Reassurance: Lessons from the Cold War," *Global Dialogue* 3(4): Cold Wars, Old and New, Cyprus: Centre for World Dialogue, diakses dari <http://www.worlddialogue.org/content.php?id=170>

<sup>35</sup> Frank C. Zagare dan D. Marc Kilgour, (2004), *Perfect Deterrence*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 286.

<sup>36</sup> Richard Ned Lebow, (2001), *Op.Cit.*

<sup>37</sup> Frank C. Zagare dan D. Marc Kilgour, (2004), *Op.Cit.* Hal. 289-292.

<sup>38</sup> Theory Talk, (2008), Robert Jervis on Nuclear Weapons, Explaining the non-Realist Politics of the Bush Administration and US Military Presence in Europe, diakses dari <http://www.theory-talks.org/2008/07/theory-talk-12.html>

satu-satunya cara dalam men-deter sebuah kekuatan dominan.<sup>39</sup> Artinya, strategi deterrence itu sendiri juga dapat dilakukan oleh pihak yang mencoba menyeimbangkan kekuatan dalam 4GW (*challenger*). Maka PMSC dapat digunakan oleh kedua pihak bertikai dalam meningkatkan deterrence dalam 4GW.

Pihak yang dominan dapat menggunakan PMSC untuk meningkatkan kualitas kekuatan militernya. Pemberdayaan PMSC ini merupakan upaya pihak dominan untuk men-deter pihak *challenger* untuk semakin melakukan aksi-aksi yang menantang *status quo*. Pihak yang lemah dapat menggunakan PMSC untuk melakukan deterrence kepada pihak yang dominan dalam rangka menyeimbangkan kapabilitas dan kredibilitas kekuatan militernya dalam 4GW yang awalnya bersifat asimetris. Potensi penggunaan PMSC oleh kedua pihak juga menunjukkan sisi penunjukkan kapabilitas secara fisik maupun psikologis serta sifat resiprokal dalam deterrence.<sup>40</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengekalan status asimetris dalam hal kapabilitas dan kredibilitas militer masih merupakan cara lain dalam memenangkan 4GW. Penerapan teori *perfect deterrence* dalam penggunaan PMSC baik oleh pihak *defender* maupun *challenger* di atas juga tampak relevan dengan pengalaman 4GW. Peningkatan dan perimbangan militer yang dilakukan bersifat minimum dalam artian secukupnya sampai batas "kredibel" tercapai. Hal ini relevan dengan 4GW yang memiliki karakter atau indikator 4GW berupa berkurangnya penggunaan kekuatan militer. Kemudian, perlu dipahami juga bahwa ketika deterrence tercipta secara sempurna, maka perang terbuka saja yang secara harfiah tentu saja akan berhenti. Namun, hal ini tidak berarti menghentikan konflik laten yang masih ada di antara pihak *defender* maupun *challenger*, terutama mengingat 4GW yang melibatkan aspek-aspek non-tradisional seperti ideologi, nilai-nilai sosial dan budaya. Maka tidak berarti dapat secara otomatis menghapuskan eksistensi 4GW yang juga masih memiliki karakter lain seperti penggunaan metode-metode dan media-media non-konvensional.

Pada saat yang sama, ketika PMSC digunakan oleh pihak *challenger*, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan PMSC oleh *challenger* yang bersifat teroris dan pemberontak akan menyebabkan PMSC melanggar regulasi yang mengatur PMSC. Oleh karena itu, PMSC dapat mendapatkan hukuman atau sanksi. Meskipun pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa PMSC seringkali hanya fokus

<sup>39</sup> Theory Talk, (2011), Kenneth Neal Waltz – The Physiocrat of International Politics, diakses dari <http://www.theory-talks.org/2011/06/theory-talk-40.html>

<sup>40</sup> Pemahaman mengenai deterrence juga melibatkan pembahasan bahwa perimbangan kekuatan dalam deterrence tidak hanya dapat dilakukan secara militer. Secara teoritis dan ilmiah, deterrence dapat berlaku karena motivasi selain dari keberlangsungan hidup, yaitu ketiadaan sumber daya. Deterrence yang seperti ini disebut sebagai *scarcity deterrence* (sebagai contoh adalah yang berlaku antara AS dan Kanada). Philip Bobbitt, (2006), "Law, strategy, history" dalam Richard little dan Michael Smith (Ed.), (2006), *Perspectives on World Politics*, Edisi ke-3, Oxon: Routledge, hal. 115.

pada pencapaian misi, tim penulis memandang hal ini justru merupakan hal yang tidak rasional bagi PMSC, terlepas dari orientasi profit, kalkulasi material atau komersil yang dapat didapatkan secara ilegal. Pertimbangan yang kedua adalah dari segi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak *challenger* dalam menyewa jasa PMSC yang tinggi.

Masih berkaitan dengan pencapaian tujuan strategi memenangkan 4GW, signifikansi PMSC dalam 4GW juga dapat ditelaah dari indikator peningkatan kekuatan intelijen. Kehadiran mantan pasukan khusus atau bahkan intelijen kemudiannya juga berpotensi memberikan dampak dalam daya tangkal bentuk yang lain. Daya tangkal bentuk lain yang juga membantu tercapainya tujuan 4GW adalah dalam bentuk memenangkan hati masyarakat lokal tempat konflik berlaku. Keberadaan masyarakat lokal tersebut penting mengingat bahwa dalam 4GW, indikator penting selanjutnya adalah bahwa pihak musuh bersifat nonnegara dan menggunakan metode serta media yang bersifat non-konvensional. Oleh karena itu, pihak musuh memiliki kesempatan yang lebih besar dalam berbaur ke dalam masyarakat sipil. Maka, dalam menghadapi musuh sedemikian rupa, aktor konflik memerlukan sumber daya manusia yang dapat berbaur pula ke dalam masyarakat sipil.

Kondisi ini berpotensi menjadi pasar bagi PMSC, terutamanya PMSC yang memperkerjakan personil yang memiliki keahlian dalam mengumpulkan informasi yang bersifat intelijen seperti telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya. Personil yang memiliki kemampuan mengumpulkan informasi bersifat intelejen tidak hanya memiliki pengetahuan umum yang luas namun juga jaringan yang luas. Oleh karena itu, tujuan 4GW akan lebih mudah tercapai ketika aktor yang berkonflik menggunakan jasa PMSC dalam rangka masuk ke dalam masyarakat, mempelajari budaya masyarakat lokal, bahkan mengumpulkan intelijen mengenai musuh. Hal ini sesuai dengan penjelasan Lind dimana 4GW bukan hanya tercipta namun berhasil digunakan untuk mengalahkan musuh. Kondisi ini juga akan lebih menguntungkan negara yang terlibat konflik sebagai pihak pengguna jasa karena personil PMSC tidak teridentifikasi sebagai tentara negara.

Seperti pedang bermata dua, penggunaan PMSC sendiri pada akhirnya berpotensi menghilangkan salah satu sisi asimetrik dalam 4GW. Hal ini berlaku ketika PMSC digunakan sebagai upaya mengimbangi kekuatan. Yaitu, ketika penggunaan jasa PMSC pada akhirnya menciptakan tingkat kekuatan militer serta intelijen yang sama di antara dua pihak yang bertikai. Maka, sisi asimetris dari 4GW dalam artinya kekuatan (bukan hierarki struktur) akan menghilang. Namun, hal ini tidak berarti menghilangkan eksistensi 4GW secara keseluruhan mengingat 4GW juga mencerminkan konflik atau perang asimetris secara hierarki. Selain itu, masih terdapat karakter lain yang menyebabkan berlakunya 4GW seperti ancaman yang bersifat non-konvensional, penggunaan media

yang juga bersifat non-konvensional, serta keterlibatan unsur sosial, budaya, ideologi dan lainnya yang sejenis.

Bagaimanapun, kehadiran PMSC juga dapat memberikan dampak negatif bagi memenangkan 4GW ketika personil justru meningkatkan kecurigaan masyarakat lokal. Kondisi ini sangat mungkin berlaku ketika PMSC mempekerjakan personil yang merupakan warga asing. Kecurigaan akan menghasilkan resistensi atas eksistensi baik secara perilaku bahkan kepada tahap tindakan. Dengan adanya resistensi tersebut akan semakin sulit bagi personil bahkan untuk mendapatkan informasi. Jika pencarian informasi mengalami hambatan, maka akan lebih sulit untuk menang dari ancaman non-konvensional, terutama yang bersifat non-fisik seperti budaya atau ideologis. Pada saat yang sama, perubahan budaya atau ideologi membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sebentar dan tidak sedikit. Sehingga, 4GW akan semakin kekal dan akan semakin sulit bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memenangkan 4GW.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pihak yang menggunakan jasa PMSC akan dirugikan ketika PMSC tidak mampu membantu pihak yang menggunakan jasanya untuk memahami pihak musuh ataupun melakukan *deterrance* secara militer. Ketidakmampuan di atas bukan hanya akan semakin menjauhkan pihak tersebut dalam mencapai tujuan, tetapi juga menurunkan kapabilitas militernya. Seperti dinyatakan oleh Phillip Bobbitt bahwa kekuatan militer dapat melemah dengan cepat ketika negara tidak mengkonseptualisasi ancaman yang nyata secara akurat.<sup>41</sup>

## **Kesimpulan**

Terlepas dari perdebatan mengenai eksistensi 4GW dalam ilmu perang serta regulasi atas PMSC, perkembangan 4GW dan PMSC dalam studi konflik dan perang secara jelas memberikan alternatif dalam memahami konflik dan perang kontemporer. Namun, hal ini tidak menjadikan 2GW dan 3GW tidak penting, terutama ketika diskusi mengenai 5GW telah berkembang beberapa tahun terakhir. Kedua konsep yang selama ini jarang disatukan dalam satu diskusi menunjukkan pentingnya penelitian lanjutan mengenai korelasi keduanya bukan hanya secara teoritis dan konseptual, namun juga secara praktis.

Di antara indikator 4GW yang perlu diteliti, yang utama adalah dalam hal pencapaian tujuan dari penyelenggaraan 4GW itu sendiri yaitu melemahkan keinginan pihak musuh untuk berperang. Dengan kata lain, kajian kepada PMSC dalam 4GW perlu melihat sejauh mana PMSC memberikan kontribusi sebagai daya tangkal atau *deterrance*. Lebih lanjut, indikator lain yang perlu dikaji adalah karakter perang asimetrik

---

<sup>41</sup> Philip Bobbitt, (2006), *Op. Cit.* hal. 114.

dalam 4GW, meskipun masih terdapat definisi atau pemahaman tunggal mengenai perang asimetrik itu sendiri. Indikator selanjutnya yang dapat menjadi unit analisa atau fokus penelitian pada tataran praktis adalah pada karakter keberadaan ancaman non-konvensional dalam 4GW. Yang terakhir, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kontribusi PMSC dalam mencapai efisiensi secara ekonomi dan politik, serta signifikansi dalam bidang kemanusiaan yang dimiliki oleh 4GW dibandingkan generasi perang yang lainnya. Adapun indikator lain seperti penggunaan metode dan media non-konvensional dalam perang pada era globalisasi saat ini berupa teknologi militer dan telekomunikasi yang canggih dalam 4GW tidak secara khusus mendapatkan pengaruh yang signifikan dari keberadaan PMSC. Tim penulis memandang bahwa indikator tersebut dapat dipenuhi oleh aktor konvensional yaitu negara, baik secara mandiri atau melalui *outsourcing* kepada industri militer dan media massa.

Namun, pada kemudiannya, ketika PMSC dapat memenuhi kebutuhan keamanan pihak yang bertikai dari segi media non-konvensional seperti penggunaan dunia maya, kemutakhiran perangkat militer serta media massa, maka signifikansi PMSC dapat lebih besar dalam 4GW.

## Daftar Pustaka

- Arms Control Center. 11 Juni 2008. *Beyond the Headlines: The U.S.-Iraq Security Agreement, Permanent Bases, and Fourth-Generation Warfare*. [http://armscontrolcenter.org/issues/iraq/articles/permanent\\_bases\\_4gw/](http://armscontrolcenter.org/issues/iraq/articles/permanent_bases_4gw/) diakses pada 22 Juli 2013
- Philip Bobbitt. 2006. *Law, strategy, history*. Dalam Richard Little dan Michael Smith (Ed.), (2006), *Perspectives on World Politics*, Edisi ke-3, Oxon: Routledge
- Sean Cannon, *The War against Terrorism: A New Generation of Warfare*, [http://www.byui.edu/perspective/v2n1pdf/v2n1\\_cannon.pdf](http://www.byui.edu/perspective/v2n1pdf/v2n1_cannon.pdf)
- Martin van Creveld, (1991), *The Transformation of War*, New York: Free Press
- Antulio J. Echevarria II. 2005. *Fourth-Generation War and Other Myths*, Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute.
- Col. T.X. Hammes. 2007. *Fourth Generation Warfare Evolves, Fifth Emerged*. *Military Review* (May-June 2007), diakses dari pada 22 Juli 2013
- David Isenberg, Contractors in War Zones: Not Exactly "Contracting", *TIME*, (9 Oktober 2012), <http://www.cato.org/publications/commentary/contractors-war-zones-not-exactly-contracting> diakses pada 15 Juli 2013
- David Isenberg. 2009. *Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq*, Westport: Praeger Security International.
- Christopher Kinsey. 2006. *Corporate Soldiers and International Security: The Rise of*

*Private Military Companies*, Oxon: Routledge.

Richard Ned Lebow. 2001. *Deterrence and Reassurance: Lessons from the Cold War. Global Dialogue 3(4): Cold Wars, Old and New*, Cyprus: Centre for World Dialogue, diakses dari <http://www.worlddialogue.org/content.php?id=170>

William S. Lind, Col Keith Nightengale, Capt John F. Schmitt, Col Joseph W. Sutton, and LtCol Gary I. Wilson. 1989. *The Changing Face of War: Into the Fourth Generation*, Marine Corps Gazette.

William S. Lind. 15 Januari 2004. *Understanding Fourth Generation War*, <http://www.antiwar.com/lind/?articleid=1702> diakses pada 22 Juli 2013.

William S. Lind. 2004. *Understanding Fourth Generation. Military Review*.

Kenneth F. Mckenzie, Jr. 2001. *The Rise of Asymmetric Threats: Priorities for Defense Planning*, Washington. D. C.: National Defense University Press

Motgomery C. Meigs. 2003. *Unorthodox Thoughts about Asymmetric Warfare. Parameters* (Summer 2003), <http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/03summer/meigs.pdf> diakses kembali pada 9 January 2015.

T. Christian Miller. 2006. *Blood Money*, Jakarta: Ufuk Press.

Simon Murden. 2007. *Staying the Course in 'Fourth-Generation Warfare': Persuasion and Perseverance in the Era of the Asymmetric Bargaining War. Contemporary Security Policy*. Vol. 28, No.1 (April 2007)

Carlos Ortiz. 2010. *Private Armed Forces and Global Security: A Guide to the Issues*. California: Praeger

Jose L. Gómez Del Prado. 11 Agustus 2012. *The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfare*. <http://www.globalresearch.ca/the-role-of-private-military-and-security-companies-in-modern-warfare/32307> diakses pada 15 Juli 2013

Moshe Schwartz dan Joyprada Swain. 13 Mei 2013. *Department of Defense Contractors in Afghanistan and Iraq: Background and Analysis*. CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress R40764. Congressional Research Service.

Anthony Severin. 2012. *Restrict Private Military Security Contractors COG*.

P.W. Singer. 2001. *Corporate Warriors: The Rise and Ramifications of the Privated Military Industry*. International Security.

P. W. Singer. 2003. *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*, Ithaca: Cornell University Press.

Theory Talk. 2008. *Robert Jervis on Nuclear Weapons, Explaining the non-Realist Politics of the Bush Administration and US Military Presence in Europe*. diakses dari <http://www.theory-talks.org/2008/07/theory-talk-12.html>

Theory Talk. 2009. *Peter W. Singer on Child Soldiers, Private Soldiers and Robot Soldiers*. Diakses dari <http://www.theory-talks.org/2009/04/theory-talk-29.html> pada 7 Januari 2015

Theory Talk. 2011. *Kenneth Neal Waltz – The Physiocrat of International Politics*. Diakses dari <http://www.theory-talks.org/2011/06/theory-talk-40.html>

Roger Trinquier. 1985. *Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency*. London: Pall Mall Press Ltd.

Frank C. Zagare dan D. Marc Kilgour. 2004. *Perfect Deterrence*, Cambridge: Cambridge University Press.

# THE IMPACT OF TRAFFICKING AND SEXUAL EXPLOITATION TOWARDS WOMEN MIGRANT WORKERS IN RIAU: SOCIO CULTURE, PSYCHOLOGICAL, AND NATIONAL SECURITY ANALYSIS<sup>1</sup>

Denik Iswardani Witarti<sup>2</sup>, Syarifah Faradina, Melly Ridaryanthi, Anggun Puspitasari<sup>3</sup>  
deni\_kiss@yahoo.com, deen\_rc@yahoo.co.uk, m.ridaryanthi@gmail.com,  
anggunpuspit@gmail.com

## Abstrak

*Isu perdagangan perempuan dan eksplorasi seksual komersial terhadap mereka dianggap sebagai kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama di Dumai, Riau, bagian dari Indonesia yang dianggap sebagai salah satu titik strategis dimana penyimpangan aliran pekerja migran mungkin terjadi. Isu ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang akan menimbulkan dampak-dampak yang dapat mengancam stabilitas negara, terutama pada aspek sosial-budaya, psikologis, dan kemanan. Laporan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan trauma, penghinaan dan ketakutan kekerasan fisik dan psikologis bahkan aspek ancaman terhadap kemanan negara dinilai sangat mengkhawatirkan. Mengenai fenomena yang dijelaskan, studi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak sosial-budaya, psikologis dan kemanan negara terhadap masalah ini di Riau. Fokus diskusi kelompok diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan komprehensif. Data dianalisis dengan mempertimbangkan implikasi praktis dari aspek sosial-budaya, psikologi, dan nasional keamanan. Kajian ini menemukan bahwa terdapat dampak-dampak ancaman keamanan nasional yaitu keamanan non-tradisional dimana negara harus menangani melalui usaha-usaha dan sikap negara tersebut untuk menangani isu tersebut.*

**Kata kunci:** perempuan pekerja migran, perdagangan manusia, kekerasan terhadap perempuan, dampak sosial budaya dan keamanan

## Introduction

Globalization has entrenched the world economy which development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets that transcend nation-state boundaries. In part, globalization disseminates practices, values, technology, and other human products throughout the globe. Globalization fosters interdependence between states for commerce and facilitates the transfer of commodities. Comparative advantage in goods and cheap labor in developing states has played a significant role in objectifying and exploiting humans for economic ends. In developing states where agrarian lifestyles

<sup>1</sup> This paper was presented at the International Research Conference in Higher Education 2013 (IRCHE 2013), Manila October 3 – 4<sup>th</sup>.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta

<sup>3</sup> Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat ini sedang studi lanjut pada FISIP Jurusan Ilmu HI di Universitas Indonesia Depok

once predominated, citizens are left without education or appropriate skills to compete in an evolving work-force. To a large extent, the developing countries have become the factories and workshops for the developed countries. A high demand for cheap labor by multinational corporations in developed countries has resulted in the trafficking and exploitation of desperate workers who, in turn, are subjected to a lifetime of slave-like conditions.<sup>4</sup>

The opportunity for working outside the homeland to pursue a better life is opened, especially for those who are living unsettled in term of economic wise and have no proper education. The number of Indonesians seeking work abroad remains very high, with an estimated 6.5 million to 9 million Indonesian migrant workers worldwide. Indonesian women are particularly vulnerable to trafficking for sexual and labor exploitation. It is estimated that between 69 to 75 percent of all overseas Indonesian workers are female, the vast majority working as domestic workers.<sup>5</sup> This situation has brought to some issues pertaining abusement of migrant workers, especially women who are considered infirm. This condition gives an opportunity to the Chief among traffickers. They are organized criminal syndicates that capitalize on a lucrative sex-trafficking industry that has met with an insatiable demand. In particular, crime syndicates are notorious for their aplomb in identifying vulnerable females who entertain visions of a better life and may thus be more susceptible to deceptive job opportunities in a foreign country. Once they arrive in the “destination” country, it is often too late for these vulnerable women to escape the web of deceit as they are relegated to a life of slavery.

People in trafficking was a violation against humanity, as well as woman trafficking is a new model of slavery, which occurred about 200 years ago, and it still occurred nowadays. It has also continued to be a current international issue. It is like a never ending story pertaining migration. Virtually, every country in the world is affected by trafficking for sexual exploitation or forced labour. Reliable global data are limited, but the number of victims are believed to be reaching epidemic proportions. Data taken from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) report on trafficking in persons document, the trafficking of human beings from 127 countries to be exploited in 137 countries.<sup>6</sup> Trafficking, especially on woman, has become global-transnational issue which

---

<sup>4</sup> Devin Brewer, 2012. *Globalization and Human Trafficking*. The Conference of Human Rights & Human Welfare, New York.

<sup>5</sup> Indonesia <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia> accessed on 9 September 2013.

<sup>6</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Trafficking in Persons: Global Patterns* (Vienna, 2006) (<http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-globalpatterns-en.pdf> ).

spread and enhance the income pretty fast. It is approximately 7 to 12 billion dollar profit gained by the recruiters.<sup>7</sup>

Southeast Asia is one of the regions that has vulnerability toward trafficking cases in the world. The majority countries in Southeast Asia are developed countries. However, recently Southeast Asia has become one of the good development region in the world. The global crisis of 2008 has proven that the economies factor in Southeast Asia has its own power to survive and remain stable against the crisis. The countries that remain stable is Indonesia, Vietnam, Myanmar and Malaysia, but they are also majority destination place of women trafficking in Southeast Asia.<sup>8</sup>

### Woman Trafficking in Riau: An Overview

Indonesia is not only a major source of human capital for trafficking but also a destination and transit country for foreign victims from neighbouring countries. Internal trafficking across and between provinces and from rural to urban areas is equally pervasive. More than two-thirds of the provinces in Indonesia are destinations for internal trafficking.<sup>9</sup> Riau Islands are considered as a key hub in human trafficking activities in Southeast Asia. The proximity between Singapore and Malaysia indicate that both islands are very strategic to be part of both domestic and international trafficking of women and girls for commercial sex work and domestic work, or any other purposes.<sup>10</sup>

Recently, the supply side of trafficking and the conditions in sending countries have received most of the attention of researchers, NGOs, and policy makers, and little attention was focused on the demand side of trafficking. The trafficking process begins with the demand for women to be employed as housemaid or in prostitution. It begins when pimps place orders for women, when pimps need new women and girls, they contact someone or agent who can provide and send them.<sup>11</sup> For trafficking to work, the traffickers have either to force or to convince their victims to leave their familiar

<sup>7</sup> Saltanat Sulaimanova. 2006. Trafficking in Women from Former Soviet Union for the Purpose of Sexual Exploitation”, dlm. Karen Beeks & Delila Amir, *Trafficking and the Global Sex Industry*, Oxford: Lexington Books), hlm. 61.

<sup>8</sup> Julaporn Euarukkul, (1995), “The Asean Region”, dlm. Paul B. Stares, *the New Security Agenda a Global Survey*, New York: Japan center for international exchange, Pg. 275.

<sup>9</sup> Analysis of “Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia March 2005-March 2010/27042010”. Also Arna, Antarini and Mattias Bryneson. *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*. ECPAT International a d Plan International. Unpublished document (December 2004)

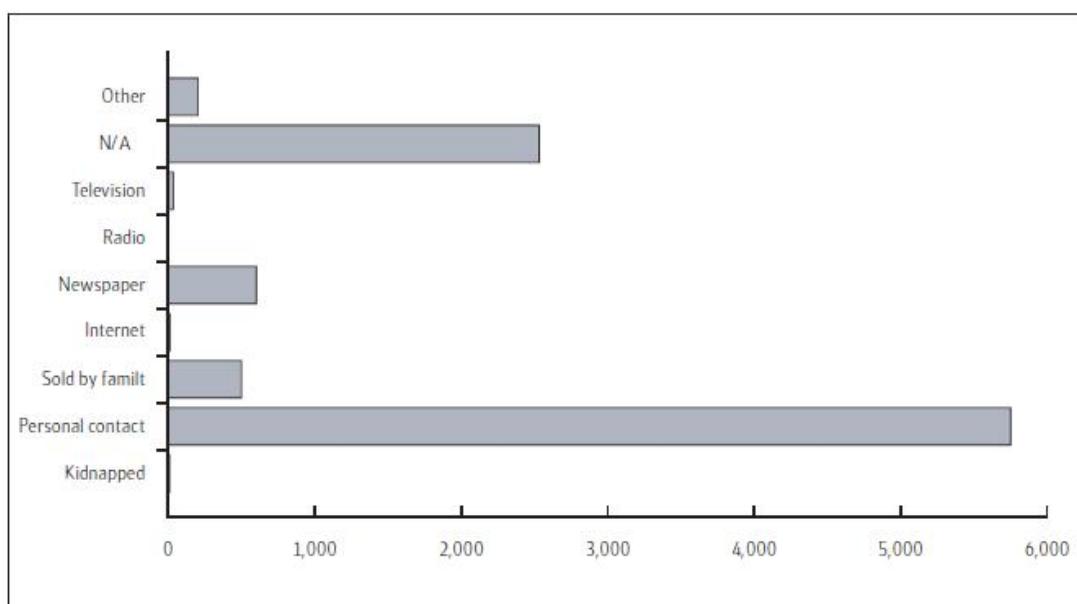
<sup>10</sup> Agustinanto, F. 2003. ‘Riau’, in Rosenberg, R. (ed.) *Trafficking of Women and Children in Indonesia*, Jakarta: International Catholic Migration Commission and the American Center for International Labor Solidarity. Pg, 178-182.

<sup>11</sup> Donna M. Hughes, 2004, *The Demand: Where Trafficking Begins*, A Call to Action: Joining the Fight Against Trafficking in Persons U.S. Embassy and the Holy See Pontifical Gregorian University Rome, June 17, 2004  
*Transnasional Vol.8 No.2 Desember 2013*

surroundings and to travel with them. This can be achieved in a number of ways. Based on the IOM Counter-Trafficking Database, 21 which includes information on victims who have been assisted by IOM projects in 78 countries, most recruitment occurs through personal contacts (Tabel 1). According to the database from IOM, 46 per cent of victims knew their recruiter and 54 per cent were recruited by strangers. In addition, 52 per cent of recruiters were men and 42 per cent women, and in 6 per cent of recruitments both men and women were involved as recruiters.<sup>12</sup>

**Tabel 1: Number of Victims by Recruitment Method**

Number of victims by recruitment method



Source: IOM Counter-Trafficking Database.

Riau Province is considered rich for it has abundant of natural resources. Nevertheless, human trafficking issue is remained high numbers in Riau since the location is becoming the transit point of trading to some destination countries. Riau Province is also stated as the connecting port among some South East Asia countries which facilitated the trafficking, therefore Riau considered as one of area with high rate of human trafficking cases. Most of trafficking occurred in Riau is pertaining woman trafficking. Some of them are traded as Sex labor.<sup>13</sup> These woman trafficking issues are triggered by

<sup>12</sup> International Organization for Migration, Counter-Trafficking Database, 78 Countries, 1999-2006 (1999).

<sup>13</sup> Anti, (2011), "Riau Wilayah Transit Trafficking", diakses dari <http://metrotvnews.com/read/news/2011/10/13/67941/Riau-Wilayah-Transit-Trafficking> pada tanggal 20 Juli 2012

the fact that many people in Indonesia are in the unsettled condition which lead to poverty, unstable yet low social status and social welfare.

We as researcher could see the impact of this woman trafficking issue in the society multidimensionally. Those victims would probably have faced economic issue, limited or no assurance during working and even abusement. These issues mentioned are part of governmental responsibility to guarantee the security and welfare of the citizens, especially those who are sojourning for working abroad. Therefore, the next part of the paper will be discussion that will consists of several themes as socio-cultural aspect, psychological aspect and national security aspect.

### **Discussion: Impact of Human Trafficking toward Women Migrant Workers**

In running the study, we used qualitative approach with case study of woman trafficking in Riau by focusing on the impact of the trafficking in three aspects; socio-cultural, psychological and national security. Uncertainty reduction theory and the concept of security were used to construct the research framework and support the analysis part. The theory helped the construction of how perception and attitude after sojourning and trafficking experience constructed, we explored on how and why does it happen and how the victims deal with society. Meanwhile, Security concept concerned on how this trafficking issue would probably lead to threaten the national security, especially in Riau. The discussion part will discuss the three aspects: socio culture, psychological and national security.

### **Socio Culture Aspect**

There are numbers of factors that lead people to sojourn; pull and push factors. Economy consideration is the main factor that forces people to move to other country. This phenomenon has brought to woman trafficking for most of the sojourners are women. The unsettled domestic economy condition has become crucial factor in pushing people to work abroad or pursue any possibilities to get a stable economy condition. Therefore, sojourning for working purposes becomes such a big reason for people's movement.

Poverty is considered as the main factor that triggered woman trafficking, especially from Indonesia to neighbor country. Poverty is the very rational reason for people to sojourn, especially women as part of the family who take a burden to keep her family in a good health and condition. The hope for a better life by having a proper job and income has become a very fundamental aspect that push them decide to work, even

outside their country with big opportunity of job vacancy and better economic condition.<sup>14</sup> Scholar argued that poverty, and economic condition, somehow becoming a main factor that lead to human trafficking.<sup>15</sup> When there could be seen so many people with hope waiting for opportunity to work abroad, there you go the opportunity for some group of people to take advantage of the condition. Therefore, trafficking is still possible to take place when demand of labor and interest of working abroad still high.

Poverty is one of the effects of the uneven economic welfare and development in the country. This condition occurred in numbers of South East Asia countries, Middle Asia and East Europe as developing countries which indicated as the active area for women trafficking. The mentioned factor also supported by another as low payment for labors in the origin country compared to destination countries, more job opportunities in destination countries and the willingness for enhance the quality of life. These becoming the pull and push factors for those who are migrating. We can see that people are push by the uncomfotting situation to do more effort for a better life. Besides, the opportunity in destination country has pulled them to move out from their origin place. The promising job opportunity has been a good factor to pull them for migrating. One of the factors that triggered the high number of women trafficking is that they are promised to have a job with high payment and young girls as the targets.<sup>16</sup>

Women trafficking are caused by high expectation that is not equal with their educational background. Therefore, they are easily manipulated by such a promising working opportunity set by the traffickers. Education is a vital requirement for people who are in the market of labor. They have to understand what kind of job they get, what are the requirements they need to fulfill, what is the right and responsibility pertaining the work, understanding the working contract and so forth. We can imagine if they cannot even read any word, what would it be? Low level of literacy is the impact of the low education development in the country.<sup>17</sup>

Working abroad, leaving their hometown is a new experience for them on how to face the new environment, new working place, new bosses and so forth. In fact, they have to face the reality that they become victims of human trafficking. This condition, when expectation does not meet reality, will probably affect their interaction in destination

---

<sup>14</sup> William A. E Ejalu, (2006), "From Home to Hell: The Telling Story of an African Women's Journey and Stay in Europe, dlm. Kareen Beeks & Delila Amir, *Trafficking and Global Sex Industry*. Oxford: Lexington Books, hal. 170.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Weiner, M. 1995. The Global Migration Crisis: Challenge to Staten's and to Human Rights. Boulder: HarperCollins College Publishers

<sup>17</sup> Neha Misra, (2005), "Girl's Education-IIIliteracy," dlm. Ruth Rosenberg, *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC, hal. 122-123.

country or their hometown after repatriation. Coming back home after decided to leave it once is another new experience for them in term of social interaction. Status as the victims of trafficking has brought them to certain social condition that is no longer similar as before they left. People might probably pity on them, expel them or put them in certain social status that they have never had before.

Besides the social interaction, women trafficking issue lead to the spread of sexual disease. The women trafficking have become the main source for sexual industry which has become the main cause of HIV and STD (Sexually transmitted diseases). The spreading of HIV has been seen as criminal act which imposed to women as having low control in the sexual life.<sup>18</sup> South East Asia is the most infected area after Africa which more than 7.5 million people have been infected by HIV. Therefore, their burden is not only pertaining social interaction wise but also about health and status which lead to psychological aspect.

### **Psychological Aspect**

Psychology is another factor which experienced by the victims of women trafficking. The social burden and the health condition which discussed before has affected them psychologically. One if the psychological factor is the history during their sojourn and became the victim of women trafficking in term of sexual abuse and sexual harassment. The experience makes them frustrated yet depressed.<sup>19</sup>

Sexual harassment toward women may cause the feeling of fear, low self-esteem, unpleasant feeling, and internal conflict that lead to frustration. The statement was stated by Kristi Poerwandari as the head of gender study program at Universitas Indonesia.<sup>20</sup> Those with the experience of being abused and harassed during the trafficking experience have trapped in such a condition that they cannot be escaped from. Traumatic cannot be hindered. Post-traumatic reaction leads to difficulties in getting back to the former life activity, the weakened of physical health and psychological aspects, distrust and low self-confidence that complicate the process to get back to the society and the former interaction.

---

<sup>18</sup> Beyer, C., & Stachowiak, J. 2003. Health Consequences of Trafficking of Women and Girls in Southeast Asia. *Journal of World Affairs* 10(1): 107.

<sup>19</sup> Zarina Othman, (2006), "Human (in) Security, Human Trafficking, and Security in Malaysia, dlm. Karen Beeks & Delila Amir, *Trafficking and Global Sex Industry*. Oxford: Lexington Books, hal. 53

<sup>20</sup> MetroTv News. 17 Desember 2011. Pelecehan seksual timbulkan Trauma," <http://metrotvnews.com/read/news/2011/12/17/75729/Pelecehan-Seksual-Timbulkan-Trauma>.

Women trafficking can threaten health and security as whole which hinder the social and economic development. The trafficking not only affects the individual as victim, but also the society and country as a solid system. Psychological burden as part of the society on taking part in the social interaction, get back to work in the home country, and back as the former life. Besides, the phenomenon has impacted toward women's rights, social status, reputation of the country and also national security wise.

### **National Security Aspect**

Security is a constructed concept which refers to the responsibility to protect the territory and citizen as a whole from any threat that might be caused by the trafficking issue.<sup>21</sup>- Therefore, trafficking, especially women trafficking is nowadays becoming part of national security issue. National security has changed at the very basic level. The concept of national security has no longer pertaining internal and external threats per se, it also *azimuthal* which refers to global threaten that cannot be considered as internal or external threats. Therefore, the threat is now multidimensional.

Referring to trafficking that occurred, the stagnant economic condition has led to social life among the society. About more than two million Indonesian, migrant workers, work as labor and unskilled workers as domestic helper, mill-hand and farm laborers. Some of the numbers are trapped in the trafficking activity which show that the government has not be able to create social welfare among the citizen that become one of the key aspects of national security.

Besides the social welfare issue, the feeling of being safe in their own environment is the key indicator of national security. Pleasant or unpleasant environment is such an issue in national security. If the unpleasant environment does exist because of the regime that frustrates the society, this may lead to the willingness for sojourning to get rid of the pressure. In some countries as Myanmar, regime that suppressed the citizen has caused frustration toward the citizens and later on they tend to choose to be migrant workers in order to escape from internal situation.<sup>22</sup> The never ending conflict in the country is one of the reasons why unpleasant feeling has arisen.<sup>23</sup> This condition has occurred in numbers

---

<sup>21</sup> Weiner, M. 1995. The Global Migration Crisis: Challenge to Statens and to Human Rights. Boulder: HarperCollins College Publishers

<sup>22</sup> Zarina Othman, (2006), "Human (in) Security, Human Trafficking, and Security in Malaysia, dlm. Karen Beeks & Delila Amir, *Trafficking and Global Sex Industry*. Oxford: Lexington Books, hal. 53.

<sup>23</sup> William A. E Ejalu, (2006), "From Home to Hell: The Telling Story of an African Women's Journey and Stay in Europe, dlm. Karen Beeks & Delila Amir, *Trafficking and Global Sex Industry*. Oxford: Lexington Books, hal. 173.

of countries, especially in East Europe, which countries have long history in conflict.<sup>24</sup> In order to leave the former environment, they have to think of the way to get out of the area and to get any kind of job to survive. Therefore, registration as migrant workers is such a promising way out.

Thus, the movement of people across borders is triggered by the gap of social and economical status that arisen in this globalization era. The gap grows in between the social realities that cannot hinder the migration flow and due to the unclear law.<sup>25</sup> The reasons mentioned that lead to women trafficking and therefore difficult to handle for the infirmity of law and the internal country condition. Therefore, the force of law that can effectively overcome the situation is needed.

## Conclusion

As conclusion, from the discussion above we can conclude some points that the trafficking toward women in Riau to neighbor is triggered by pull and push factors; pull factor is the tempted opportunity in the destination country to work with high payment, and push factors are the domestic condition in their home country. Post trafficking experience may lead to the uncertainty when the victims are back home. The process of repatriation post trafficking has impacted the social interaction, psychological stress due to health condition that they might accused as they infected the sexually transmitted disease and so forth. Besides, psychological aspect is another important thing that affect the victims. The feeling of fear, low self-esteem, unpleasant feeling, and internal conflict that lead to frustration may occur during repatriation. Another impact that also important pertaining human trafficking is national security aspect. This trafficking phenomenon cannot be separated from the security aspects due to internal, external and azimuthal threats that causing people in the country decided to move out for safety and better life. Therefore, solid and firmed law is absolutely needed to hinder such a condition.

---

<sup>24</sup> Susan Dewey, (2010), "Invisible Agent, Hollow Bodies. Neoliberal Notion of "Sex Trafficking" from Syaracuse to Sarajevo," dlm. Tiantian Zheng, *Sex Trafficking, Human Right and Social Justice.*" New York: Routlegde, hal. 103-104.

<sup>25</sup> Ryszard Cholewinski & Paul de Guchteneire, "Migration and Human Rights. The United Nations Convention on Migrant Worker's Rights", dlm. Antoine Pécoud, *UNESCO*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 677.

## References

- Anti. 2011. Riau Wilayah Transit Trafficking. <http://metrotvnews.com/read/news/2011/10/13/67941/Riau-Wilayah-Transit-Trafficking> diakses 20 Juli 2012
- Bales, Kevin. 1999. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Ewing: University of California Press.
- Bandoro, Bantarto. 2005. *Perspektif baru Keamanan Nasional*. CSIS: Jakarta
- Berger, C.R., & Bradac, J.J. 1982. *Language and social knowledge: Uncertainty in Interpersonal Relations*. London: Arnold.
- Berger, C. R., & Calabrese, R. J. 1975. *Some Explorations in Initial Interaction and Beyond: Toward a Developmental Theory of Interpersonal Communication*. *Human Communication Theory*. 1, page 99 – 112.
- Beyrer, C., & Stachowiak, J. 2003. *Health Consequences of Trafficking of Women and Girls in Southeast Asia*. *Journal of World Affairs* 10(1): 105 – 117.
- Budiman, M. 2011. *The Middle Class and Morality Politics in the Envisioning of the Nation in post-Suharto Indonesia*. *Inter-Asia Cultural Studies* 12(4): 482 – 499.
- Carolina S. Ruiz. 2006. *Conflicts and Interest: Trafficking in Filipino Women and the Philippine Government*.
- Christine B. N. Chin, 1998, *In Service and Servitude: Foreign Female Domestic Workers and the Malaysian Modernity Project*, Columbia University Press.
- Dharma, Surya. 2011. *Riau Dikenal Transit Kasus Perdagangan Manusia*. diakses dari <http://formatnews.com/beta/view.php?newsid=5500> pada tanggal 20 Juli 2012
- Department of State United State of America. 2010. *Trafficking in Person Report*. pp. 177 – 179.
- Heath, R.L. & Bryant, J. 2000. *Human Communication Theory and Research: Concept, Context and Challenges*. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Kasim, Azizah. 2012. *Dasar Pekerja Asing di Malaysia, Perlunya Anjakan Paradigma*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Laporan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 2003 [www.ham.go.id/](http://www.ham.go.id/) [accessed 17<sup>th</sup> July 2012]
- Lindquist, J. 2010. *Labor Recruitment, Circuits of Capital and Gendered Mobility: Reconceptualizing the Indonesian Migration Industry*. *Pacific Affairs* 85(1): 115 – 132.
- Miko, Francis T. & Grace (Jea-Hyun) Park. 2002. *Trafficking in Women and Children: The U.S. and International Response*. CRS Report for Congress <http://fpc.state.gov/documents/organization/9107.pdf> [accessed 17<sup>th</sup> July 2012]

- Olivie, Andre. 2008. *Identifying Cambodian Victims of Human Trafficking Among Deportees from Thailand*. Phnom Penh: United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking, pp. 8 – 34.
- Rita, Chi-Ying Chung. 2005. *Women, Human Rights, and Counseling: Crossing International Boundaries*. *Journal of Counseling & Development* 83: 202 – 208.
- Shirlena Huang, Brenda S. A. Yeoh, Noor Abdul Rahman. 2005. *Asian Women as Transnational Domestic Workers*. France: OECD, hal 75.
2000. *Trafficking: A Perspective from Asia*. *International Migration* 38(3): 7 – 30.
- Sukma, Rizal. 2002. *Konsep Keamanan Nasional*. FGD ProPatria, Jakarta 28<sup>th</sup> November CSIS.
- Sumulong, L., & Fan Zhai. 2008. *Asian Workers on the Move. Asian Development Outlook 2008: Workers in Asia*. Asian Development Bank.
- Surtees, Rebecca. 2005. *Commercial Sex Work* dlm. Ruth Rosenberg, *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC, hal. 122 – 123.
- Vermonte, J Philips. 2003. *Isu Terorisme dan Human Security, Implikasi terhadap Studi Kebijakan Keamanan. Global*, Jurnal Ilmu Politik FISIP UI
- Williams, C, P. 2008. *Female Transnational Migration, Religion and Subjectivity: The Case of Indonesian Domestic Workers*. *Asia Pacific Viewpoint*, 49(3), pp. 344 – 353.
- <http://www.bps.go.id> [accessed 1<sup>st</sup> August 2010]  
'Where are your victims?' How Sexual Health Advocacy came to be Counter-Trafficking in Indonesia's Riau Islands. International Feminist Journal of Politics 12(2): 255 – 264
- <http://www.riauinfo.com/main/news.php?c=4&id=5252> [[accessed 1<sup>st</sup> August 2013]  
Perdagangan Orang Capai 1-2 Juta setahun
- <http://riauterkini.com/hukum.php?arr=74> [diakses 22 Agustus 2013] Polisi Bekuk Sindikat Perdagangan Perempuan, Dua Warga Malaysia Turut Ditangkap.
- <http://www.antaroriau.com/berita/15948/riau-kawasan-transit-perdagangan-manusia.html> [diakses 22 Agustus 2013] Riau Kawasan Transit Perdagangan Manusia.

# TELAAH KONSEPTUAL DINAMIKA PERSENJATAAN: PERLOMBAAN SENJATA (ARM RACE) DAN PEMBANGUNAN KAPABILITAS PERSENJATAAN MILITER (ARMS MILITARY BUILD-UP) DALAM POLA AKSI-REAKSI

Anggun Puspitasari<sup>1</sup>  
[anggunpuspit@gmail.com](mailto:anggunpuspit@gmail.com)

## Abstract

*Arms Dynamics is a theory which there is an explanation about the pressures that forced the state to have the power of weaponry and improve them into quantity and quality as intended. In Arms Dynamics Theory, military competition between countries to improve the defense capabilities of either party will pose a threat to others, so that, the action-reaction configuration model between countries often occur. Therefore, the aggressive action of a country in improving its military capability would be a threat to other countries. The action-reaction model that occurs between these countries generally happen in the form of "arms military build up" up to the most extreme level which is "arm race". By definition, arms race and arms military build-up is very different, although both are often analogous as the two sides of a coin. [2] According to Barry Buzan and Eric Herrings in The Arms Dynamic in World Politics, to understand the arms dynamics we must to enclose both elements. Therefore, in writing this literature review, the author will try to examine the differences and links between concepts in the theory of arms dynamics, such as Arms Race and Arms Military Build-up.*

**Keywords:** Arms Dynamics, Arm Race, Arms Military Build-up, Action-Reaction Model

*"We owe our big brains less to inventiveness than to conflicts of interest among social minds engaged in an arms race to be the best at manipulating others."*

Mark Pagel

## Pendahuluan

Inovasi, modernisasi, dan peningkatan kapabilitas militer merupakan sub-kajian penting dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam Studi Pengkajian Strategis dan Keamanan karena dikotomi tersebut menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa salah satu negara meningkatkan kapabilitas militer nasionalnya melalui peningkatan kemampuan dan keunggulan militer secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara lain.<sup>2</sup> Namun, dalam perkembangannya, sangat sulit membedakan antara apakah peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara merupakan bagian dari perlombaan senjata dengan negara lain melainkan merupakan sekadar usaha untuk mempertahankan diri atau bahkan hanya

<sup>1</sup> Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat ini sedang studi lanjut pada FISIP Jurusan Ilmu HI di Universitas Indonesia Depok

<sup>2</sup> Stephen Biddle. 2001. *Rebuilding The Foundations of Offense Defense Theory*. The Journal Of Politics. Volume 63(33): 345.

untuk memelihara *status quo* hubungan keamanan dalam suatu kawasan tertentu.<sup>3</sup> Ini merupakan salah satu sebab mengapa selama ini tidak terdapat kajian yang cukup komprehensif mengenai perlombaan senjata. Hal itu bermula dari kerancuan konseptual, maupun kesulitan untuk memahaminya dari konteks logika, proses maupun implikasinya bagi interaksi strategis dalam hubungan antarnegara.<sup>4</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi dan penemuan senjata senjata baru telah menciptakan fenomena-fenomena baru terkait dengan seberapa jauh peningkatan kemampuan pertahanan suatu negara dapat terus berlangsung. Fenomena modernisasi kekuatan militer terkait erat dengan keamanan nasional suatu negara. Suatu negara hanya dapat merasa aman apabila negara tersebut dapat menjamin sendiri perlindungan dirinya. Oleh karena itu, kemudian sebagian besar negara merasa perlu untuk mendapatkan kekuatan militer sebanyak yang bisa dijangkau oleh sumber dayanya.<sup>5</sup> Fenomena-fenomena yang terkait dengan interaksi negara-negara dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan kapabilitas persenjataan militernya kemudian dapat dianalisis melalui teori dinamika persenjataan. Menurut Buzan, Dinamika persenjataan merupakan teori yang dapat menjelaskan model-model yang umumnya terjadi dalam interaksi peningkatan kapabilitas militer negara-negara tersebut.<sup>6</sup>

### **Pola Interaksi Dinamika Persenjataan**

Teori dinamika persenjataan dapat diartikan sebagai pola-pola hubungan antara dua negara atau lebih yang terjadi karena interaksi persenjataan. Teori ini dapat menjelaskan mengenai sebab yang terjadi terhadap suatu negara dalam meningkatkan kapabilitas militernya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sistem militer yang telah dimilikinya dengan tujuan untuk pencapaian keamanan nasional suatu negara.<sup>7</sup> Akan tetapi dalam dinamika persenjataan, suatu negara melakukan peningkatan kapabilitas militer melalui pembangunan, pemeliharaan, kompetisi dan perlombaan senjata adalah sebuah manifestasi dari dinamika persenjataan tersebut yang nantinya akan menyebabkan negara

---

<sup>3</sup> Richard A. Bitzinger. 1994. *The Globalization of the Arms Industry: The Next Proliferation Challenge*. International Security. Volume 19(2):190 – 191.

<sup>4</sup> Nordhaus, William, Oneal, John R, Russett Bruce. 2012. *The Effects of the International Security Environment on National Military Expenditures: A Multicountry Study*. International Organization. Volume 66(3): 502 – 503.

<sup>5</sup> Dima Adamsky. 2010. *The Culture of Military Innovation: The Impact of Cultural Factors on The Revolution In Military Affairs In Russia, The US, And Israel*. California: Stanford University Press, hal. 63.

<sup>6</sup> Barry Buzan, Eric Herrings. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*, London: Lynne Rienner Publisher, hal. 80.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 81.

lain yang merasa terancam akan melakukan peningkatan kapabilitas militer juga.<sup>8</sup> Dinamika persenjataan dapat berlangsung dengan mengikuti beberapa pola, antara lain:

- (a) Model Aksi-Reaksi (*classical action-reaction model*);
- (b) Model Struktur Domestik (*domestic structure model*);
- (c) Model Keharusan Teknologi (*technological imperative*)

### **Model Aksi Reaksi (Classical Action-Reaction Model)**

Barry Buzan dan Erric Hering memberikan pernyataan bahwa terdapat model aksi-reaksi yang dapat melihat pemicu utama dari dinamika persenjataan dalam persaingan negara dalam melakukan peningkatan kapabilitas militernya “*the basic proposition of the action-reaction model is that states strengthen their armaments because of the threats the states perceive from other state*”.<sup>9</sup> Model Aksi-Reaksi beranggapan bahwa negara-negara memperkuat sistem persenjataan mereka karena apa yang mereka anggap sebagai ancaman dari luar.<sup>10</sup> Dengan demikian model ini mengandalkan penalarannya pada anarki internasional dan ancaman luar. Asumsi pokok dalam model ini adalah rasionalitas para aktor (karena arus informasi sempurna, dua pihak) dan bahwa aksi-reaksi merupakan dorongan yang deterministik pada dinamika persenjataan.<sup>11</sup> Dalam Dinamika Persenjataan, proses aksi-reaksi akan terus berlanjut hingga tercapainya suatu keseimbangan.

Jika perimbangan kapabilitas militer tidak tercapai, maka salah satu pihak akan merasa terancam. Model aksi-reaksi tidak tergantung pada proses yang terus-menerus menyebabkan peningkatan inovasi teknologi dalam teknologi militer. Tetapi jika inovasi tersebut terjadi, tentu menjadi bagian dari dinamika aksi-reaksi.<sup>12</sup> Bahkan jika kualitas teknologi militer itu statis, dan merata dalam sistem internasional, proses aksi-reaksi masih bisa terjadi jika suatu entitas atau negara menyatakan bersaing dalam militer yang kuantitatif. Peningkatan jumlah tentara (*arms build-up*) atau kapal perang dalam suatu negara masih akan menciptakan tekanan untuk meningkatkan respon terhadap negara-negara lain.<sup>13</sup> Terdapat empat kemungkinan yang dilakukan para aktor untuk menghadapi tekanan yang ada yaitu *arm racing*, *maintenance of the military status quo*, *military competition or build-up*, dan *military build down*.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 83.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 85.

<sup>11</sup> Barry Buzan, Eric Herrings. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*. London: Lynne Rienner Publisher, hal. 90.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 95.

### **Model Struktur Domestik (Domestic Structure Model)**

Model ini didasarkan pada gagasan dinamika persenjataan dihasilkan oleh kekuatan di dalam negara dan menjelaskan perilaku negara-negara terutama dalam hal struktur domestik dan urusan internal. Model ini juga menjelaskan perilaku negara dalam bidang aktivitas militer. Model struktur domestik ini terdiri dari serangkaian faktor yang berinteraksi untuk membentuk kekuatan pendorong domestik yang menjelaskan dinamika persenjataan dan mendorong pengembangan dan modernisasi militer.<sup>14</sup> Model domestik ini beranggapan bahwa dinamika persenjataan lebih didorong oleh faktor-faktor internal. Mernang model ini tidak pernah mengatakan bahwa persaingan antarnegara menjadi tidak relevan. Mereka hanya menggarisbawahi bahwa tatanan domestik (ekonomi dan politik) telah melembaga sedemikian kuat sehingga menggeser tekanan-tekanan luar yang semula menentukan arah dinamika persenjataan. Faktor luar masih tetap penting dalam memberi motivasi. Yang menjadi soal bagi pendekatan ini adalah bahwa anggaran militer, *procurements* dan teknologi yang dipakai dalam dinamika itu adalah ditetapkan di dalam negeri.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, apakah dinamika persenjataan akan mengikuti pola simetris dan/atau asimetris adalah persoalan yang semata-mata bersifat domestik, misalnya strategi penangkalan, doktrin pertahanan.<sup>16</sup> Persoalan yang diangkat oleh model ini untuk melacak struktur dan mekanisme domestik seperti apa yang mempengaruhi dinamika persenjataan. Misalnya, mempelajari pelembagaan riset kemiliteran, politik-birokrasi, manajemen ekonomi, dan politik domestik. Ancaman luar selalu merupakan bagian penting dari model ini, tetapi ia ditafsirkan dalam konteks domestik. Dengan perkataan lain, berbeda dari model aksi-reaksi yang bermanfaat pada tingkatan analisa sistem (interaksi antar negara), model domestik ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai tingkah laku suatu negara; dan analisa politik luar negeri dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat untuk menganalisis model ini.<sup>17</sup>

### **Model Keharusan Teknologi (Technological Imperative)**

Ada beberapa unsur yang belum terliput dalam dua model tersebut di atas. Yaitu kaitan antara teknologi militer dan sipil, misalnya, seringkali memainkan peranan penting dalam dinamika persenjataan. Pertama, karena tuntutan untuk perkembangan dan kemajuan teknologi tidak selamanya terletak pada teknologi militer, dan, kedua, karena

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 96.

<sup>15</sup> Jaap de Wilde, Ole Wæver, Barry Buzan. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher, hal. 201.

<sup>16</sup> Eliot, A. Cohen. 2005. *Stephen Biddle on Military Power*. Journal of Strategic Studies. Volume 28(3): 413.

<sup>17</sup> Zagare C. 1997. *The Dynamic of Deterrence*. New York: University of Chicago Press, hal. 19.

sektor militer tidak dapat memisahkan dirinya dari kecenderungan perkembangan teknologi-teknologi tertentu yang memang berada di luar kendali mereka. Model/pendekatan ini terutama berlaku di negara-negara kapitalis maju yang memiliki komitmen besar pada inovasi teknologi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Relevansinya bagi negara-negara berkembang terletak pada keharusan negara-negara itu untuk mengejar ketertinggalan teknologi (sipil maupun militer); ia dimaksudkan untuk "memelihara *status quo* militer" daripada "untuk mengantisipasi ancaman luar". Dinamika persenjataan setelah berakhirnya Perang Dingin di beberapa kawasan (misalnya Asia Tenggara) mungkin lebih tepat dijelaskan dengan pendekatan ini daripada dengan dua pendekatan sebelumnya.<sup>18</sup>

Relevansi setiap pendekatan berbeda dalam konteks analisis historis, studi kasus, dan/atau studi komparasi. Ini terutama disebabkan karena setiap faktor tidaklah memainkan peranan yang sama pentingnya dalam kurun waktu yang berlainan. Ancaman Vietnam, misalnya, merupakan faktor pokok peningkatan dan modernisasi senjata-senjata baru Thailand dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an; tetapi kemampuan ekonomi dan industri lokal mungkin merupakan faktor yang lebih penting di masa-masa mendatang.<sup>19</sup> Dinamika hubungan persenjataan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada dasawarsa 1970-an, yang ditandai oleh merosotnya kuantitas persenjataan, namun tetap diwarnai oleh peningkatan kecanggihan teknologinya. Di kedua belah pihak mungkin memperlihatkan bahwa inovasi teknologi militer merupakan suatu fenomena global yang penting diperhitungkan.<sup>20</sup> Pemahaman mengenai dinamika persenjataan dapat dilihat melalui tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. Konseptualisasi Dinamika Persenjataan**

| Konsep                | Variabel                  | Indikator                          | Kategori                      |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Dinamika Persenjataan | Model Aksi Reaksi         | <i>Magnitude</i>                   | <i>Arms Reduction</i>         |
|                       |                           |                                    | <i>Arms Maintenance</i>       |
|                       | Model Struktur Domestik   | <i>Awareness</i>                   | <i>Military Modernization</i> |
|                       |                           |                                    | <i>Military Build Up</i>      |
|                       | Model Keharusan Teknologi |                                    | <i>Arm Race</i>               |
|                       |                           | <i>Internal Cause</i>              | <i>Politik</i>                |
|                       |                           |                                    | <i>Militer</i>                |
|                       |                           | <i>Technological modernization</i> | <i>Civil</i>                  |
|                       |                           |                                    | <i>Military</i>               |

<sup>18</sup> Bruce Russet. 1983. *The Prisoners of Insecurity: Nuclear Deterrence, the Arms Race, and Arms Control*. New York: W.H. Freeman and Company. hal. 91 – 92.

<sup>19</sup> Amitav Acharya. 1994. *An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia: Prospects for Cooperation*. Pacific Strategic Papers. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, hal.79.

<sup>20</sup> Richardson, Lewis Fry. 1990. *Arms and Insecurity: A Mathematical Study of the Causes and Origins of War*. Pittsburgh: Boxwood Press, hal 21.

## Analisis Konseptual Perlombaan Senjata (Arm Race) dan Pembangunan Kapabilitas Persenjataan Militer (Arms Military Build-Up) dalam Pola Aksi-Reaksi

Dinamika persenjataan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan konsep perlombaan senjata. Dinamika persenjataan lebih menitikberatkan kepada situasi yang lebih normal atau stabil, dalam hal ini tidak perlu ada perlombaan senjata antarnegara.<sup>21</sup> "Perlombaan persenjataan" menurut definisinya amat berbeda dengan pengertian "pembangunan persenjataan" (*arms build-up*), walaupun keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang."Pembangunan persenjataan" hanya merujuk pada grafik spiral ke atas (*upward spiral*) pada indikator-indikator utama militer seperti pengeluaran pertahanan dan pemilikan persenjataan.<sup>22</sup> Meningkatnya anggaran belanja pertahanan, angkatan bersenjata yang lebih modern, akuisisi senjata yang lebih meningkat dan produksi persenjataan di suatu kawasan tidak harus mengidentifikasi adanya perlombaan senjata apabila tidak didorong oleh interaksi atau dinamika kompetisi di antara mereka yang terlibat. Dengan kata lain, "pembangunan senjata" bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar antarnegara. Seperti faktor domestik dan sebagainya. Perwujudan dari keinginan suatu negara untuk membangun kekuatan militernya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertentu dalam maksud terbatas, karena adanya rasa tidak aman. Namun demikian, "pembangunan senjata" juga merupakan salah satu indikator dari adanya "perlombaan senjata".<sup>23</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa karakteristik umum perlombaan senjata adalah adanya derajat yang sangat cepat dari akuisisi senjata, akan tetapi sejumlah literatur lain berargumentasi bahwa mungkin juga terjadi perlombaan senjata dengan gerak yang "sangat lambat" (*slow motion*). Pada sisi inilah pembangunan persenjataan ditempatkan. Dalam terminologi ini, menurut Steiner perlombaan senjata didefinisikan sebagai "penyesuaian kemampuan mesin perang secara berulang, kompetitif dan timbal balik (*reciprocal*) antara dua negara atau dua kelompok negara".<sup>24</sup> Sementara Huntington lebih melihat dari segi kapan peristiwa dinamika itu terjadi dengan mendefinisikannya sebagai "peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara atau kelompok negara secara progresif yang terjadi pada masa damai yang disebabkan oleh perbedaan

<sup>21</sup> Barry Buzan, Eric Herrings. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*, London: Lynne Rienner Publisher, hal. 87.

<sup>22</sup> Barry Buzan. 1990. *An Introduction to Strategic Studies, Military Technology, and International Relation*, New York: St. Martin Press, hal. 76.

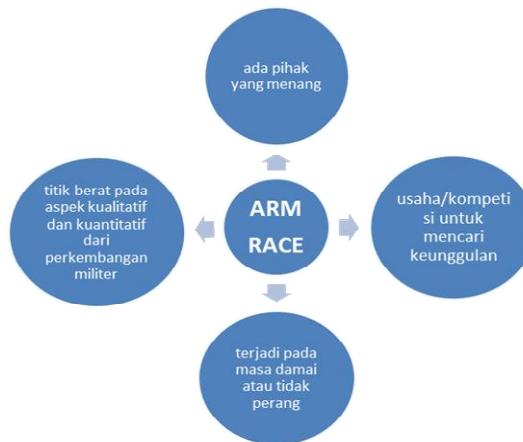
<sup>23</sup> T May Rudi. 2002. *Studi Strategi: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama, hal. 32.

<sup>24</sup> Steiner Barry H. 2010. *To Arms Control or Not: Lessons of Focused Case Comparisons*. *Contemporary Security Policy*, Volume 31(3): 390.

kepentingan dan saling ketakutan".<sup>25</sup> Sedangkan Hedley Bull mendefinisikan perlombaan senjata sebagai "kompetisi yang intens antara negara atau kelompok negara yang saling bertengangan bahwa setiap pihak berusaha untuk mencapai keunggulan kekuatan militernya dengan cara meningkatkan kuantitas atau memperbaiki kualitas sistem persenjataannya".<sup>26</sup> Di lain pihak Colin Gray mencatat empat kondisi dasar untuk menunjukkan adanya perlombaan senjata:

1. Harus ada dua atau lebih negara yang bertikai;
2. Negara yang terlibat perlombaan senjata harus menyusun kekuatan bersenjata dengan perhatian terhadap efektivitas angkatan bersenjata dalam menghadapi, bertempur atau sebagai penangkal terhadap peserta lomba senjata;
3. Mereka harus berkompetisi dalam kuantitas (SDM, senjata) dan/atau kualitas (SDM, senjata, organisasi, doktrin, dan penggelaran);
4. Harus ada peningkatan cepat dalam kuantitas atau peningkatan dalam kualitas<sup>27</sup>

Hubungan antarkomponen perlombaan senjata tersebut dapat dipahami melalui gambar berikut.



Dalam implikasinya terhadap hubungan antarnegara, perlombaan senjata mencerminkan makna adanya *self-stimulating* persaingan militer antarnegara bahwa usaha peningkatkan kemampuan pertahanan salah satu pihak menimbulkan ancaman baru bagi pihak lain "...self-stimulating military rivalry between states, in which their efforts to defend themselves militarily cause them to entrance the threats they pose to each other."<sup>28</sup> Sementara implikasinya dalam interaksi strategis terlihat dari adanya perubahan

<sup>25</sup> Samuel P. Huntington. 1975. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations*. New York: Harvard Press, hal. 28.

<sup>26</sup> Hedley Bull. 1985. *The Control of the Arms Race : Disarmament and Arms Control in the Missile Age*. Canberra: Frederick A. Praeger Press, hal. 58.

<sup>27</sup> Colin S. Gray. 1974. *The Urge to Compete: Rationales for Arms Racing*. Journal of World Politics, Volume 26(2): 212.

<sup>28</sup> Jennifer Mitzen. 2006. *Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma*. European Journal of International Relations, 2(3): 345.

konseptual yang kemudian dikenal sebagai "stabilitas perlombaan senjata". Selama bertahun-tahun stabilitas strategis telah menempati bagian penting bagi para pengambil keputusan. Konsep ini terdiri dari dua komponen, yaitu stabilitas krisis (*crisis stability*) atau stabilitas pembangunan senjata dan stabilitas perlombaan senjata (*arms-race stability*). Stabilitas krisis mempelajari keuntungan dan biaya serangan pertama pada saat krisis terkait dengan pecah atau tidaknya perang. Kemudian stabilitas perlombaan senjata terutama mempelajari keuntungan dan biaya penggelaran senjata-senjata baru dan terkait dengan ada atau tidaknya dorongan untuk menemukan senjata-senjata baru meskipun tidak ada kemungkinan perang.<sup>29</sup>

## Kesimpulan

Pendekatan aksi-reaksi dengan sendirinya memerlukan suatu strategi yang efektif untuk pengaturan sistem persenjataan, terutama oleh karena meningkatnya kemampuan pertahanan suatu negara dapat dianggap sebagai meningkatnya kadar dan bobot ancaman pada negara lain. Sebaliknya, jika motivasi utama suatu dinamika persenjataan negara-negara dalam sistem internasional didorong oleh struktur domestik dan/atau keharusan teknologi, usaha pengaturan persejataan mungkin harus dilakukan dalam kaitannya dengan pembentukan suatu tata internasional yang baru. Akibat dari relevansi setiap pendekatan yang disebut di atas mungkin terlihat perbedaan antara (*Arms Build-up*) dan perlombaan persenjataan (*arms control*). Pembangunan persenjataan hanya merujuk pada grafik spiral ke atas (*upward spiral*) pada indikator-indikator utama militer seperti pengeluaran pertahanan dan pemilikan persenjataan. Sedangkan Perlombaan Persenjataan, peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara atau kelompok negara secara progresif dan agresif.

## Daftar Pustaka

- Amitav Acharya. 1994. *An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia: Prospects for Cooperation*. Pacific Strategic Papers. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, hal.79.
- Barry Buzan. 1990. *An Introduction to Strategic Studies, Military Technology, and International Relation*, New York: St. Martin Press, hal. 76.
- Barry Buzan, Eric Herrings. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*, London: Lynne Rienner Publisher, hal. 87.
- Bruce Russe. 1983. *The Prisoners of Insecurity: Nuclear Deterrence, the Arms Race, and Arms Control*. New York: W.H. Freeman and Company, hal. 91 – 92.

<sup>29</sup> Robert Gilpin. 1985. *War and Change in World Politics*, Australia: Cambridge University Press, hal. 99.  
Transnasional Vol.8 No.2 Desember 2013

- Colin S. Gray. 1974. *The Urge to Compete: Rationales for Arms Racing*. Journal of World Politics. Volume 26(2): 209.
- Dima Adamsky. 2010. *The Culture of Military Innovation: The Impact of Cultural Factors on The Revolution In Military Affairs In Russia, The US, And Israel*. California: Stanford University Press, hal, 63.
- Eliot, A. Cohen. 2005. *Stephen Biddle on Military Power*. Journal of Strategic Studies. Volume 28(3): 413.
- Hedley Bull. 1985. *The Control of the Arms Race : Disarmament and Arms Control in the Missile Age*. Canberra: Frederick A. Praeger Press, hal. 58.
- Jaap de Wilde, Ole Wæver, Barry Buzan. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner Publisher, hal. 201.
- Jennifer Mitzen. 2006. *Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma*. European Journal of International Relations. 2(3): 345.
- Nordhaus, William, Oneal, John R, Russett Bruce. 2012. *The Effects of the International Security Environment on National Military Expenditures: A Multicountry Study*. International Organization. Volume 66(3): 502 – 503.
- Richard A. Bitzinger. 1994. *The Globalization of the Arms Industry: The Next Proliferation Challenge*. International Security. Volume 19(2):190 – 191.
- Richardson, Lewis Fry. 1990. *Arms and Insecurity: A Mathematics Study of the Causes and Origins of War*. Pittsburgh: Boxwood Press. hal 21.
- Robert Gilpin. 1985. *War and Change in World Politics*. Australia: Cambridge University Press. hal. 99.
- Samuel P. Huntington. 1975. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations*. New York: Harvard Press. hal. 28.
- Steiner Barry H. 2010. *To Arms Control or Not: Lessons of Focused Case Comparisons*. Contemporary Security Policy. Volume 31(3): 390.
- Stephen Biddle. 2001. *Rebuilding the Foundations of Offense Defense Theory*. The Journal of Politics. Volume 63(33): 345.
- T May Rudi. 2002. *Studi Strategi: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca-Perang Dingin*. Bandung: Refika Aditama, hal. 32.
- Zagare C. 1997. *The Dynamic of Deterrence*. New York: University of Chicago Press, hal. 19.

## PENULIS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Elistania</b>               | Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Saat ini sedang studi lanjut pada Program Magister Kajian Wilayah Eropa di Universitas Indonesia.                 |
| <b>Yugolastarob Komeini</b>    | Pengajar di SESKOAL dan Pemerhati Hubungan Internasional  |
| <b>Yusran</b>                  | Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.  |
| <b>Jeanie Annissa</b>          | Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.  |
| <b>Arin Fithriana</b>          | Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.  |
| <b>Soni Iriawan</b>            | Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta  |
| <b>Tulus Yuniasih</b>          | Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta  |
| <b>Budi Hartono</b>            | Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Kandidat Magister Sains Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Sentul, Jawa Barat |
| <b>Denik Iswardani Witarti</b> | Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.  |
| <b>Anggun Puspitasari</b>      | Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta. Saat ini sedang studi lanjut pada FISIP Jurusan Ilmu HI di Universitas Indonesia Depok.                           |

## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL**

1. Artikel harus orisinil tidak pernah dimuat di media lain termasuk *blog*, tidak bersamaan dikirim ke media lain dan merupakan penelitian dalam lingkup kajian Ilmu Hubungan Internasional.
2. Naskah diketik satu kolom menggunakan font Arial 11, 1.5 spasi 3000 – 5000 kata atau setara dengan 10 – 20 halaman.
3. Artikel dapat ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format essai.
4. Pengiriman file naskah dapat di-*email* ke alamat: transnasional\_bl@yahoo.co.id
5. Sistematika artikel adalah: Judul, Nama penulis (tanpa gelar akademik), lembaga/instansi, abstrak (jika naskah berbahasa Indonesia, maka abstrak berbahasa Inggris dan sebaliknya), kata kunci, Pendahuluan (latar belakang masalah, masalah), hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran (jika ada).
6. Judul artikel berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis terdiri dari empat orang atau lebih, maka hanya penulis utama yang dicantumkan dibawah judul artikel. Nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah.
7. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *email* untuk memudahkan komunikasi
8. Sumber rujukan sebaiknya terbitan 10 tahun terakhir.
9. Teknis perujukan dan pengutipan menggunakan catatan perut dan catatan kaki untuk informasi pelengkap, dengan format sebagai berikut: ([nama belakang], [tahun]: [halaman jika ada]). Contoh: (Stiglitz, 2009:28).
10. Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada di atas, sedangkan judul pada gambar berada di bawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1, 2, dst).
11. Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.
12. Semua naskah ditelaah oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh penyunting sesuai bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas rekomendasi dari *reviewer*.
13. Artikel dapat dibatalkan pemuatannya jika diketahui bermasalah. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui *email* kepada penulis.
14. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan atau pengutipan dari berbagai sumber untuk pembuatan naskah yang dilakukan oleh penulis, menjadi tanggung jawab penulis yang bersangkutan berikut konsekuensi yang timbul karenanya.